

ISSN: 1979-6145



# Buletin LITBANG

BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah



Edisi: **XXVI**  
**2023**

# Pengantar Redaksi

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buletin Litbang dan Pembangunan Daerah BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah Edisi XXVI (Tahun 2023) ini dapat diselesaikan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) elalui Bidang Penelitian dan Pengembangan salah satu tugasnya adalah membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam menentukan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan daerah, baik penelitian dasar, terapan dan teknologi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pada edisi ini Buletin Litbang memuat berbagai informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappedalitbang berupa hasil-hasil kajian/penelitian dan kegiatan pembangunan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhirnya Tim Redaksi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi hingga terbitnya Buletin Litbang, dan Selamat Membaca.



## **Penanggung Jawab:**

Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah  
(Ir. Leonard S. Ampung, M.M., M.T)

## **Redaktur/Pimpinan Redaksi:**

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah  
(Endy, St, MT)

## **Penyunting/Editor:**

Peneliti Ahli Muda BAPPEDALIBANG Provinsi  
Kalimantan Tengah  
(Agastinus B. Assan, S.Sos)

## **Design Grafis :**

Peneliti Ahli Muda BAPPEDALIBANG Provinsi  
Kalimantan Tengah  
(Sastori Aryanto, SE)

## **Fotografer :**

Eddi Putra  
Antonius Tendi, ST  
Stefanus Konoralma, ST

## **Sekretariat:**

Lifrina, ST  
Yuni Hartati, SE., M. Si  
Ratnasari Sangalang, SE  
Rostiana Hermawati, A. Md  
Guruh, ST

## Daftar Isi

PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TEPIAN SUNGAI DI  
KELURAHAN PAHANDUT (1)

ANALISA ARSITEKTUR KOTA SEBAGAI "IDENTITY"  
KOTA PALANGKA RAYA (11)

REFLEKSI PEMBANGUNAN PEMUDA: BIAS  
DEFEKTOLOGI KEPEMUDAAN DALAM  
GOVERNMENTALITY (21)

ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN PERIKANAN  
BERKELANJUTAN INOVATIF DI KALIMANTAN  
TENGAH (29)

KAJIAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN  
PERIKANAN SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN  
SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2023 (36)

KAJIAN DETERMINAN, INTERVENSI SPESIFIK DAN  
SENSITIF UNTUK PENCEGAHAN STUNTING  
TERHADAP KEJADIAN STUNTING DI KABUPATEN  
MURUNG RAYA KALIMANTAN TENGAH (43)

KAJIAN PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DI DESA  
KUBU KECAMATAN KUMAI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH (55)

ANTISIPASI DAN KESIAPAN BUDIDAYA PADI DI  
KAWASAN FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH  
DALAM MENGHADAPI EL NINO (60)

KAJIAN PENENTUAN POTENSI LOKASI RUMAH SAKIT  
KELAS A DI KOTA PALANGKA RAYA MENGGUNAKAN  
METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)  
DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) (70)

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INOVATIF,  
KREATIF, AKTIF (PIKA) YANG EFEKTIF DALAM  
MENINGKATKAN PRESTASI DAN MOTIVASI SISWA (83)

POTENSI DAN PRIORITAS INDUSTRI KREATIF SKALA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR (93)

## PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TEPIAN SUNGAI DI KELURAHAN PAHANDUT

Oleh :

**Anna Rusdanisari<sup>1</sup>, Noor Hamidah<sup>2</sup>, Tatau Wijaya Garib<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya

<sup>2</sup>Pengajar di Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya

### Abstrak :

Permukiman merupakan suatu wadah sebagai kebutuhan manusia atau wujud fisik budaya yang isinya saling mempengaruhi, dan bertempat di lingkungan yang alami. Permukiman memiliki lima elemen dasar yaitu alam, manusia, masyarakat bangunan dan jaringan. Permukiman di dunia mempunyai masalah yang krusial seperti hal kesenjangan ruang, ekonomi dan akses sumberdaya alam yang semakin memburuk. Permukiman kumuh di Indonesia salah satunya terdapat di provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya. Permukiman kumuh di Kota Palangka Raya secara spasial tata ruang adalah kepadatan hunian dan kekurangan infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rancangan bangunan rumah dan jalan titian dengan pendekatan co-housing di tepian sungai Kelurahan Pahandut. Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Pahandut memiliki tipologi berada di dataran rendah dan sebagian ada yang di atas air. Kondisi fisik bangunan di kawasan ini merupakan rumah non permanen dan semi permanen dengan konstruksi rumah panggung. Kondisi bangunan di pasanggrahan dan murjani bawah sangat berdempetan serta banyak bangunan yang kondisinya tidak memenuhi persyaratan teknis. Jaringan jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh pahandut berpola organik dan mengikuti pertumbuhan permukiman. Penataan di permukiman di Kelurahan Pahandut yang berada di tepian air ini diharapkan tetap memperhatikan karakteristik dan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang terikat dengan konteks sungai sebagai bagian hidupnya. Dengan konsep co-housing sebagai perpaduan ide (kolaboratif)

desain untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan meminimalisir tingkat stress, rasa kesepian yang membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani maupun rohani. Pendekatan arsitektur tepi air dengan konsep co-housing dalam bentuk vertical building pada penataan kawasan permukiman kumuh tepian sungai di Kelurahan Pahandut ini akan di implementasikan.

### Kata kunci :

*Permukiman kumuh, Tepian Sungai, konsep co-housing*

### Abstract:

*Settlement is a place for human needs or a physical form of culture whose contents influence each other, and is located in a natural environment. Settlements have five basic elements, namely nature, people, building communities and networks. Settlements in the world have crucial problems, such as space, economic inequality and access to natural resources that are getting worse. One of the slum settlements in Indonesia is in the province of Central Kalimantan, especially in the City of Palangka Raya. Slum settlements in Palangka Raya City spatially are occupancy density and lack of infrastructure. The purpose of this research is to obtain a design for a house and a walkway with a co-housing approach on the riverbank of Pahandut Village. The slum area of Pahandut sub-district has a typology of being in the lowlands and some of it is above the water. The physical condition of the buildings in this area are non-permanent and semi-permanent houses with the construction of houses on stilts. The condition of the buildings*

*in Passanggrahan and Murjani Bawah is very close together and many buildings do not meet the technical requirements. The environmental road network in the Pahandut slum area has an organic pattern and follows the growth of the settlement. The arrangement in settlements in Pahandut Village, which is on the water's edge, is expected to continue to pay attention to the characteristics and aspects of community needs that are tied to the context of the river as part of their life. With the concept of co-housing as a combination of (collaborative) design ideas to meet housing needs and minimize stress levels, feelings of loneliness have a negative impact on physical and spiritual health. The waterfront architectural approach with the concept of co-housing in the form of vertical buildings in the arrangement of riverbank slum areas in Pahandut Village will be implemented.*

**Keywords:**

*Slums, Riverside, co-housing concept.*

## 1. PENDAHULUAN

Permukiman merupakan suatu wadah sebagai kebutuhan manusia atau wujud fisik budaya yang isinya saling mempengaruhi, dan bertempat di lingkungan yang alami (Hamidah, 2014). Permukiman memiliki lima elemen dasar yaitu alam, manusia, masyarakat bangunan dan jaringan (Doxiadis, 1968). Permukiman di dunia mempunyai masalah yang krusial seperti hal kesenjangan ruang, ekonomi dan akses sumberdaya alam akan semakin memburuk. Hasil analisa dari Upward and Outward Growth: Managing Urban Expansion for More Equitable Cities in the Global South kota-kota makmur di Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur tumbuh secara vertikal dengan gedung-gedung pencakar langitnya, sedangkan kota-kota di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan justru tumbuh secara horizontal. Hal yang memprihatinkan ini membuat kondisi fisik di suatu negara memburuk salah

satunya yaitu seperti kondisi permukiman kumuh Indonesia. Permukiman kumuh di Indonesia salah satunya terdapat di provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya. Permukiman kumuh di Kota Palangka Raya secara spasial tata ruang adalah kepadatan hunian dan kekurangan infrastruktur. Kota Palangka Raya merupakan salah satu kota yang awalnya rumah-rumah penduduk di tepian Sungai Kahayan. Permukiman awal di Kota Palangka Raya adalah Kampung Pahandut. Perkembangan permukiman di tepian Sungai Kahayan semakin padat karena banyak migran yang bermukim di kawasan tersebut.

Kota Palangka Raya pada awal mulanya adalah 1.200 km<sup>2</sup>, dan sekarang telah dimekarkan menjadi 2.400 km<sup>2</sup>. Kota Palangka Raya mempunyai luas 2.400 km<sup>2</sup> dengan kawasan terbangun terletak di tepian sungai sepanjang sekitar 100 km. Embrio kota Palangka Raya dibangun di tepi sungai Kahayan. (Wijanarka, 2008). Kawasan permukiman di tepian sungai Kahayan yaitu Kampung Pahandut terletak di sebelah timur embrio kota Palangka Raya yang merupakan kampung tradisional dan berada di tepi sungai. Awal mulanya kawasan Kampung Pahandut ini dihuni oleh masyarakat asli kota Palangka Raya, namun saat ini Kampung Pahandut mulai didominasi oleh masyarakat pendatang terlebih dari Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat keturunan dari masyarakat asli Palangka Raya disini mulai memasuki daerah perkotaan (darat) dan menyewakan tanah dan rumahnya untuk masyarakat pendatang dengan harga yang terbilang murah. Setelah tanah dan bangunan yang disewakan tersebut dibangun kembali dengan orientasi memanjang mengarah ke tengah sungai dan saling berhadapan dengan jalan ditengahnya. Rumah yang dibangun sejak awal memiliki ciri menghadap ke arah sungai dan berupa rumah panggung karena masih

menggunakan jalur transportasi air kemudian menjadi keunikan dari kawasan permukiman tepian sungai ini. Menurut hasil laporan akhir Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Palangka Raya Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Pahandut memiliki tipologi berada di dataran rendah dan sebagian ada yang di atas air. Kondisi fisik bangunan di kawasan ini merupakan rumah non permanen dan semi permanen dengan konstruksi rumah panggung. Kondisi keteraturan bangunan di sepanjang Kawasan Pesanggrahan dan Murjani Bawah masih banyak yang tidak teratur dikarenakan banyak rumah yang membelakangi sungai. Kondisi bangunan di Passanggrahan dan Murjani Bawah sangat berdempetan serta banyak bangunan yang kondisinya tidak memenuhi persyaratan teknis.

Kondisi yang demikian ditambah lagi dengan laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang demikian pesatnya menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan perkotaan, seperti masalah kebutuhan akan ruang, penurunan kualitas lingkungan, penyediaan perumahan, serta konsekuensi peningkatan kebutuhan sarana-prasarana perkotaan (Sujarto,1996). Berdasarkan latar belakang diidentifikasi ada beberapa masalah pada kawasan permukiman tepian Sungai Kahayan yaitu permukiman kumuh dan tidak aman akses ke kawasan. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan penataan untuk menangani permukiman kumuh tepian sungai di Kelurahan Pahandut .Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rancangan bangunan perumahan dengan pendekatan co-housing di tepian sungai Kelurahan Pahandut. Sasaran yaitu Mengumpulkan data tentang permukiman kumuh tepian sungai Kelurahan Pahandut, Mengkaji teori ruang kota permukiman dan kawasan, Melakukan studi banding dan preseden, Analisa tapak, survey

dan wawancara, Menganalisa teori permukiman pada kawasan permukiman kumuh, Menghasilkan konsep redesain permukiman.

Penataan di permukiman di Kelurahan Pahandut yang berada di tepian air ini diharapkan tetap memperhatikan karakteristik dan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang terikat dengan konteks sungai sebagai bagian hidupnya. serta memberikan alternatif desain rumah untuk solusi dari dampak lingkungan dan menyesuaikan pembangunan kawasan tepi air. Perkembangan permukiman kumuh lambat laun akan bertambah luasannya apabila pemerintah tidak memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan. Pengentasan kawasan permukiman kumuh melalui strategi penataan kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan. Salah satu strategi untuk mengentaskan persebaran permukiman kumuh yang tidak terkendali adalah dengan penataan kawasan berkonsep Co-Housing (Collective Housing). Pendekatan Arsitektur Tepi Air dengan konsep co-housing dalam bentuk vertical building pada penataan kawasan permukiman kumuh tepian sungai di Kelurahan Pahandut ini akan di implementasikan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu kualitatif berdasarkan kajian literatur, survey dan wawancara. Pendekatan dilakukan melalui kajian preseden, dengan mengamati aktivitas, kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang bermukim di tepian sungai. Kajian preseden meliputi kajian desain rumah sehat di tepi air atau tepi sungai. Kajian literatur dari jurnal terkait penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan di tepian sungai.

Delineasi kawasan permukiman kumuh Kelurahan Pahandut merupakan kawasan yang

terletak pada bantaran Sungai Kahayan, yang lebih dikenal dengan sebutan Kawasan Pesanggrahan dan Murjani Bawah secara administratif berada di Kecamatan Pahandut. Total luas kawasan kumuh ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palangka Raya No. 188.45/564/2018 tentang Penetapan Kawasan dan Luasan Permukiman Kumuh Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh melalui National Slum Upgrading Program (NSUP) Tahun 2018 di Kota Palangka Raya memiliki luasan 38,34 Ha. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, terjadi pengurangan luasan kumuh menjadi 36,48 Ha. Tipologi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Pahandut adalah kawasan permukiman kumuh di dataran rendah, tepi dan diatas air. Kelurahan Pahandut terletak pada ketinggian rata-rata 20-25 meter di atas permukaan laut. Kawasan kumuh Kelurahan Pahandut, Murjani Bawah dan Pesanggrahan terdiri atas 38 RT dari 10 RW.

Secara administratif batas wilayah Kelurahan Pahandut adalah sebagai berikut:

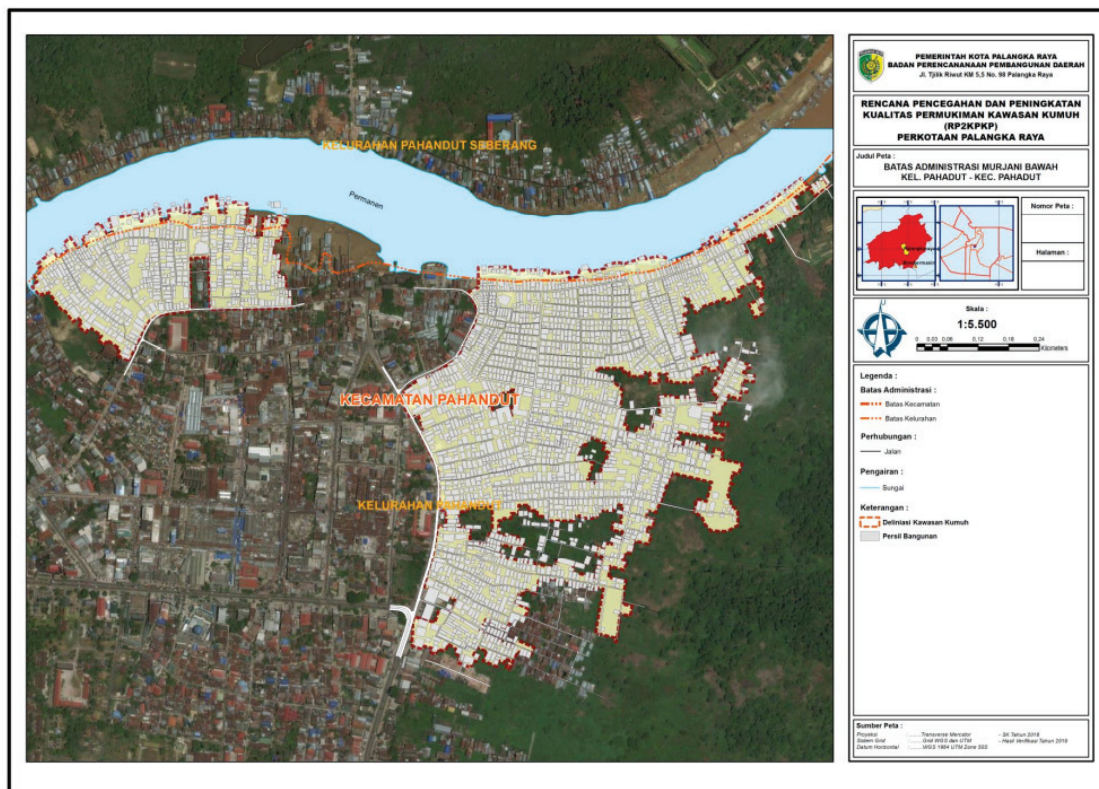
Sebelah Utara : Kelurahan Pahandut Seberang  
Sebelah Timur : Kelurahan Tanjung Pinang  
Sebelah Selatan : Kelurahan Panarung  
Sebelah Barat : Kelurahan Pahandut Seberang

Untuk deliniasi permukiman kumuh Kelurahan Pahandut dapat dilihat pada gambar 1.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1. Hasil

Menurut Kriteria RP2KPKP Kota Palangka Raya untuk perbaikan kawasan Kelurahan Pahandut yang harus diperhatikan seperti bangunan kawasan, air bersih, persampahan dan proteksi kebakaran. Mengacu dari kriteria tersebut maka terpilihlah lokasi yang harus menjadi prioritas penataan permukiman kumuh di Kelurahan Pahandut yaitu kawasan RW 21/ RT 1-4. Kawasan alternatif site yang terpilih untuk dijadikan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Pahandut adalah RW 21/ RT 1-4 seperti terlihat pada gambar 2.



Gambar 1 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kelurahan Pahandut (Sumber : RP2KPKP Kota Palangka Raya, 2019)



Gambar 2 Kawasan Site Terpilih  
(Sumber : RP2KPKP Kota Palangka Raya, 2019)

Tabel 1 Hasil Survey Eksisting

VARIABEL	RUMAH 1	RUMAH 2	RUMAH 3	RUMAH 4
Bangunan Rumah	Rumah tipe 36 terbuat dari kayu dengan penghawaan alami 	Rumah tipe 54 terbuat dari kayu menggunakan listrik pln dan penghawaan kipas angin 	Barak sewa terbuat dari kayu menggunakan listrik pln dan penghawaan kipas angin 	Rumah tipe 45 terbuat dari kayu menggunakan listrik pln dan penghawaan kipas angin 
Jalan Lingkungan	Jalan cor beton	Jalan titian kayu	Jalan titian kayu	Jalan titian kayu
Penyediaan Air Minum	Sumber air dari air tanah/sumur bor	Sumber air dari air tanah/sumur bor	Sumber air dari air tanah/sumur bor	Sumber air dari air tanah/sumur bor
Drainase Lingkungan	Tidak memiliki drainase	Tidak memiliki drainase	Tidak memiliki drainase	Tidak memiliki drainase
Pengelolaan Air Limbah	Menggunakan wc komunal dengan septictank	Menggunakan wc pribadi dengan septictank	Menggunakan wc pribadi dengan septictank	Menggunakan wc pribadi dengan septictank
Pengelolaan Persampahan	Dibuang ke TPS	Sampah dibakar	Sampah dibuang ke sungai	Sampah dibuang ke bawah
Proteksi Kebakaran	Tidak ada gardu pemadam kebakaran	Tidak ada gardu pemadam kebakaran	Tidak ada gardu pemadam kebakaran	Hanya ada pompa air
Ruang Publik	Ruang bersama di rumah ketua rt/rw	Ruang bersama di rumah ketua rt/rw	Tidak memiliki ruang publik	Ruang bersama di rumah ketua rt/rw

Pada gambar 4 merupakan gambar kondisi bangunan di kawasan ini yang rata-rata terbuat dari kayu dengan lebar 36-54 m<sup>2</sup>. Fungsi rumah di kawasan ini selain menjadi rumah tinggal juga sebagai tempat berdagang.



Gambar 4 Kondisi Bangunan Rumah  
(Sumber : Hasil Survey, 2021)

Pada gambar 5 merupakan kondisi jalan lingkungan pada kawasan kumuh yang terdiri dari jalan titian kayu dan jalan cor beton dengan lebar 1-4 meter.



Gambar 5 Kondisi Jalan Lingkungan  
(Sumber : Hasil Survey, 2021)

Pada gambar 6 merupakan kondisi Pengelolaan air limbah masyarakat yang kebanyakan sudah menggunakan septictank untuk pembuangannya tapi untuk air limbah cucian dan mandi masih turun kebawah rumah.

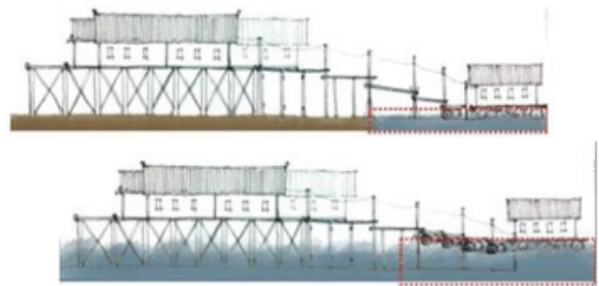


Gambar 6 Kondisi Pengelolaan Air Limbah  
(Sumber : Hasil Survey, 2021)

Pada gambar 7 merupakan kondisi persampahan di kawasan ini yang masih banyak masyarakat membuang sampah langsung kebawah rumah dan sungai yang menjadikan banyaknya sampah di kawasan ini.



Gambar 7 Kondisi Persampahan  
(Sumber : Hasil Survey, 2021)



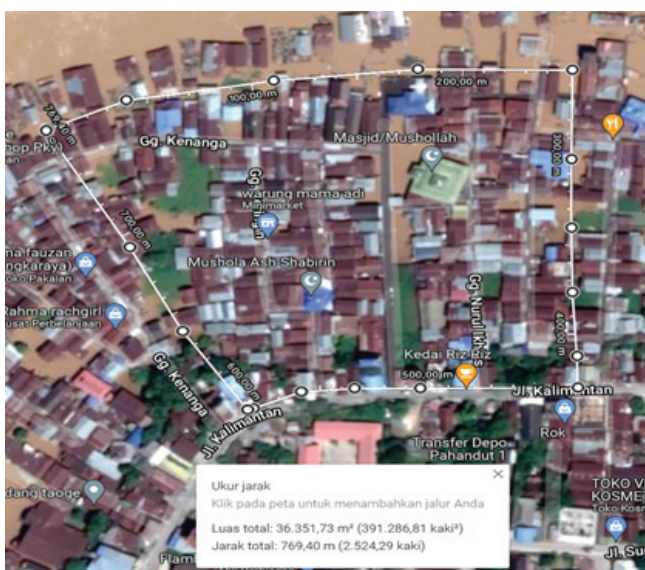
Gambar 8 Kondisi Persampahan  
(Sumber : Hasil Survey, 2021)



Pasang surut permukaan air pada Kawasan ini, sering terjadi pada musim hujan. Ketinggian maksimum kenaikan permukaan air yang di capai yaitu sekitar 1-1.5m dari permukaan air normal. Kenaikan permukaan air yang mencapai  $\pm 1-1.5m$  belum menyebabkan banjir pada wilayah sekitarnya. Tetapi masyarakat sudah mulai siaga, karena kenaikan permukaan air yang bertambah akan menjadi bencana banjir yang merendam segala sirkulasi jalan maupun menghambat segala aktivitas sehari-hari. Jika air sungai naik 2-3 m dari permukaan air sungai normal, maka sirkulasi jalan akan tertutup dan kendaraan darat tidak dapat digunakan.

### 3.2. Pembahasan

RT 1-4 / RW 21 yaitu lokasi Penataan permukiman kumuh yang akan ditangani ini merupakan lokasi permukiman yang berada di tepian sungai bahkan diatas air sungai kahayan. Pembangunan perumahan yang cenderung menjorok ke tengah sungai kahayan menjadikan lokasi ini semakin luas. Perumahan warga dibangun secara turun temurun sehingga jalur permukiman cenderung memanjang ke tengah sungai.



Gambar 9 Luasan Kawasan Kumuh Terpilih  
(Sumber : google.maps, 2021)

Pada gambar 9 merupakan luasan dileanasi kawasan kumuh yang terpilih yaitu sebesar 3,6 Ha dengan total rumah dan kepala keluarga sekitar 173 buah, dari kawasan itu akan dipilih rumah-rumah yang layak dipertahankan dan tidak layak untuk dilakukan penataan untuk permukiman kumuh dengan menggunakan konsep co-housing.

Parameter Bangunan yang tidak layak dipertahankan yaitu :

1. Kualitas konstruksi bangunan yang layak
2. Kecukupan minimum luas bangunan  $< 36m^2$
3. Usia bangunan dibawah 10 tahun.

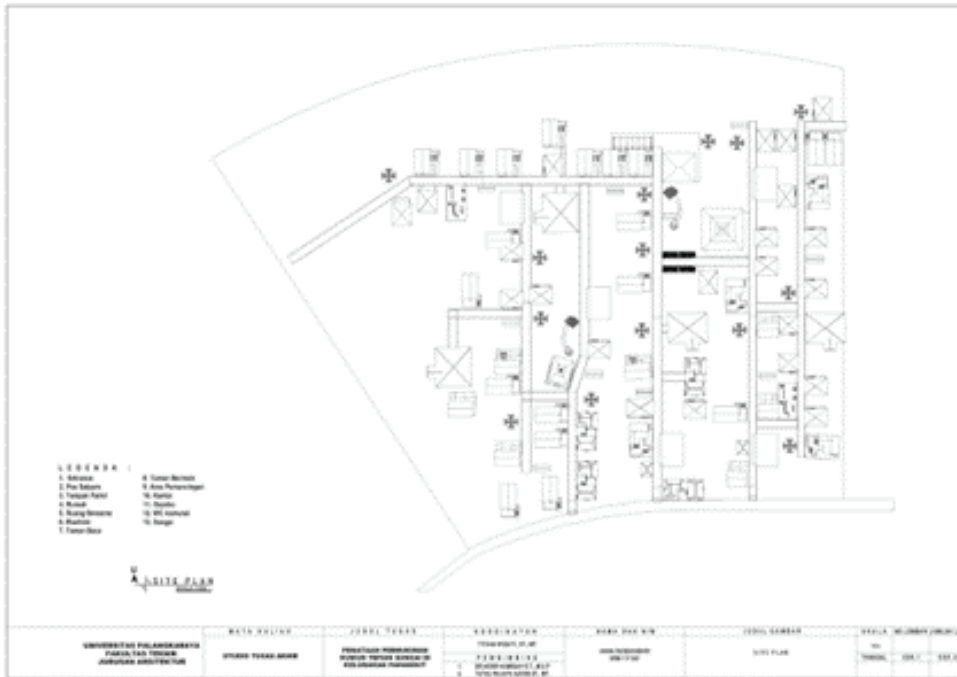


Gambar 10 Peta Analisa Rumah  
(Sumber : Analisa Pribadi, 2021)

Dari hasil analisa pada gambar 10 terdapat 71 rumah yang layak dipertahankan berdasarkan dari parameter yang sudah ditentukan dan 102 rumah yang tidak layak dipertahankan akan di co-housing kan pada rumah yang layak, terlihat pada gambar 10 merupakan peta dari rumah-rumah yang layak dipertahankan.

Konsep Tapak Mengikuti eksisting dan hasil analisa dari rumah yang layak dengan parameter yang sudah ditentukan. Dari hasil analisa tersebut terciptalah ruang-ruang terbuka dari bangunan tidak layak yang di co-housing kan. Ide bentuk Kawasan mengikuti eksisting dan hasil analisa dari rumah yang layak dengan parameter yaitu konstruksi yang bagus, luas bangunan  $> 36m^2$  dan usia bangunan yang tidak tua, dari hasil

analisa tersebut terciptalah ruang-ruang terbuka dari bangunan tidak layak yang di co-housing kan. Pada gambar site plan terdapat akses masuk, jalan lingkungan, tempat parkir bersama, pos satpam, ruang bersama, rumah-rumah, taman bermain, taman baca, tempat memancing, mushola, kantor dan wc komunal, terlihat pada gambar 11.



Gambar 11 Site Plan  
Sumber : Analisa Pribadi, 2021

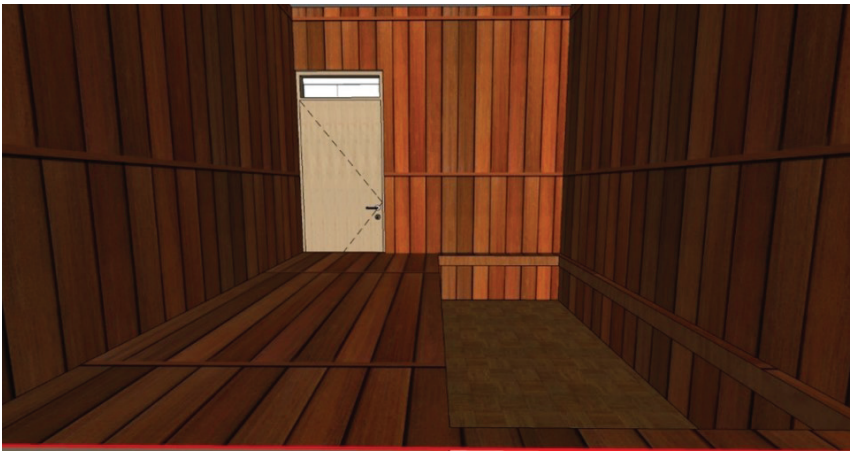
Pada Lingkungan Kawasan dilakukan penataan penerang jalan agar kawasan aman bagi pengguna dengan pola lampu mengikuti pola jalan yaitu linier dan jarak antara lampu jalan 2 sampai dengan 3 meter dan menambahkan tempat membuang sampah seperti tong-tong sampah, membuat taman dan tempat santai dan memancing di pinggir sungai, terlihat pada gambar 12.



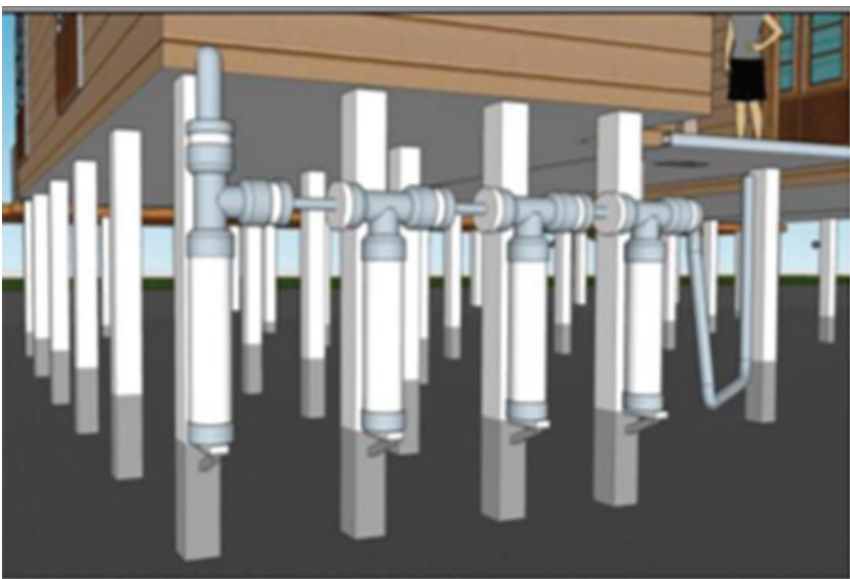
Gambar 13 Perspektif Eksterior Rumah  
Sumber : Analisa Pribadi, 2021

Interior rumah yang dibuat disini adalah Ruang tamu, ruang keluarga dan kamar tidur. Interior dibuat natural dari material kayu yang digunakan. Pada lantai rumah dibuat struktur bongkar pasang gambar 14 (knock down) yang dinaikan diatas ketinggian lantai yang terkena banjir sekitar 30cm sebagai solusi apabila terjadi banjir dan masuk kerumah.

Sistem air kotor dan limbah menggunakan RPS (Repeated Processing Septictank), yaitu septictank untuk rumah panggung di atas kawasan berair (sanitasi daerah spesifik). Terlihat pada gambar 15.



Gambar 14 Perspektif Eksterior Rumah  
(Sumber : Analisa Pribadi, 2021)



Gambar 15 Repeated Processing Septic Tank (RPS)  
(Sumber : Nhamidah dkk, 2020)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020: “LAPORAN AKHIR” *Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Palangka Raya*, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Hamidah, N., Rijanta dan Setiawan, B. 2014. *Model Permukiman Kawasan Tepian Sungai Kasus: Permukiman Tepian Sungai Kahayan Kota Palangka Raya*. Palangka Raya. Jurnal
- Lussetyowati, T. 2019. *Analisis Elemen-Elemen Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Tepian Sungai Di Kota Palembang*. Palembang.
- Trancik, R. 1988. *Finding Lost Space : Theories Of Urban Design*. Van Nostrand Reinhold Co. New York.
- Kresna Murti, N. Suparti, A. Budi, A. 2020. *Transformasi Adaptasi Bangunan Di Permukiman Informal Tepi Sungai Kahayan*.
- Kotaku. 2019. *Laporan Akhir Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)*. Palangka Raya
- Khudori Darwis. 2002. *Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code*. Yogyakarta.
- Khaliesh, H. 2013. *Pondasi Tiang Tongkat Sebagai Adaptasi Konstruksi Lahan Gambut Di Kalimantan Barat*. Pontianak.

Tata Loka, Volume Nomor Halaman

Hamidah, N., Garib, T. W., Nindito, D. A., & Santoso, M. (2021). *Installation Assistance Repeated Processing Technology Septic Tank (RPS) in Pahandut Seberang Village, Palangka Raya City*. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 832, No. 1, p. 012056). IOP Publishing.

Kotaku. 2019. *Laporan Akhir Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)*. Palangka Raya

Khudori Darwis. 2002. *Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code*. Yogyakarta.

Khaliesh, H. 2013. *Pondasi Tiang Tongkat Sebagai Adaptasi Konstruksi Lahan Gambut Di Kalimantan Barat*. Pontianak.

Lussetyowati, T. 2019. *Analisis Elemen-Elemen Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Tepian Sungai Di Kota Palembang*. Palembang.

Trancik, R. 1988. *Finding Lost Space : Theories Of Urban Design*. Van Nostrand Reinhold Co. New York.

Kresna Murti, N. Suparti, A. Budi, A. 2020. *Transformasi Adaptasi Bangunan Di Permukiman Informal Tepi Sungai Kahayan*.

- Semarang
- Wijanarka. 2000. *Konsep Dasar Pengembangan Struktur Ruang Kota/Permukiman Di Kalimantan Tengah (Belajar Dari Kota Palangkaraya)*. Tesis Tidak dipublikasikan Universitas Diponegoro. Palangka Raya
- Nidikara,A. Widjaja, G. 2017. *Strategi Adaptasi Arsitektural Terhadap Dinamika Perubahan Ketinggian Permukaan Air Sungai Kahayan Di Kampung Pahandut, Kota Palangkaraya*. Parahyangan.
- Rahman, S. Mentayani, I. Rusmilyansari. Mahreda, E, S. 2019. *Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai Di Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin*. Banjarmasin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomot 02/PRT/M/2016
- Scotthanson, C. Scotthanson, K. 2005. *The Cohousing Handbook Building: A Place For Community*. Canada.
-

# ANALISA ARSITEKTUR KOTA SEBAGAI “IDENTITY” KOTA PALANGKA RAYA

Oleh :

Noor Hamidah<sup>1</sup>; Mahdi Santoso<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Staf Pengajar di Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya

<sup>2</sup>Staf Pengajar di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya

Email: noor.hamidah@arch.upr.ac.id; mahdisantoso@gmail.com

## Abstrak

*Identitas kota merupakan refleksi dari arsitektur kota sebagai salah satu proses dalam tahap menganalisa perencanaan dan perkembangan kota. Sejarah kota adalah potensi dan usaha nyata untuk pelestarian dan konservasi bangunan-bangunan tua kota sebagai bagian dari rangkaian pembangunan kota. Kota Palangka Raya merupakan kota mandiri yang kehadirannya mengingatkan kita pada citra dan jati diri perkembangan kota yang lahir setelah Indonesia merdeka. Palangka Raya merupakan ibukota Kalimantan Tengah mengalami proses pembangunan perkotaan yang berkelanjutan baik berpengaruh pada perkembangan fisik maupun non fisik. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi arsitektur kota (urban architecture) awal hingga kini hadir sebagai bagian pembangunan kota (urban development) yang mengingatkan akan perkembangan Kota Palangka Raya dalam sekuensi ruang dan waktu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dari data primer di lapangan yang dijabarkan secara deskriptif. Analisa arsitektur kota meliputi nilai kesejarahan, nilai arsitektur keistimewaan/arsitektur lokal, nilai kelangkaan, nilai keselarasan, dan nilai sosial budaya.*

**Kata kunci:** Potensi, identitas, arsitektur kota, Kota Palangka Raya.

## I. Pendahuluan

Kotamerupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang paling kompleks dipengaruhi oleh aktivitas pengguna kota sesuai dengan tuntutan dan perkembangan penduduk yang dinamis (Hamidah dan Santoso, 2019). Arsitektur kota adalah suatu bentuk karya arsitektur baik berupa bentuk bangunan maupun bagian dari kawasan yang hadir untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat dan mudah dikenal masyarakat melalui fungsi dan kegunaannya. (Hendraningsih, 1982). Bagian elemen pembentuk kota disebut arsitektur kota sebagai identitas kota yang ditangkap melalui mental mapping terbentuk dari cerminan ruang dan waktu (*space of time dan space of place*) secara mengakar terbentuk oleh kagiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kota (Hamidah dkk, 2017). Dalam upaya penggalian dan pelestarian arsitektur kota yang merupakan elemen pembentuk kota dan identitas kota dapat ditelusuri dengan melakukan pemetaan citra mental (*mental mapping*) masyarakat kota sebagai lambang atau identitas pencapaian perkembangan kota (Lynch, 1972). Zaidulfar dan Alavarez, (2002) menyebutkan identitas suatu kota berakar dari budaya lokal dan muncul dari ikatan kesinambungan masa lampau-masa kini-masa depan.

Lahirnya arsitektur-arsitektur kota (*urban architectures*) sebagai bagian awal dari suatu pembangunan kota (*urban development*) yang menandai dari perkembangan sebuah kota

(*city development*). Bagian penting dari elemen pembentuk kota adalah Arsitektur kota sebagai pengingat akan keberadaan kota dalam sekuensi perkembangannya berdasarkan ruang dan waktu (*city identity*). Identitas kota tercermin dari elemen pembentuk kota sebagai salah satu proses dalam tahapan perencanaan kota. Arsitektur kota sebagai penghubung rangkaian sejarah kota dan perkembangan terkini sebagai refleksi upaya konservasi dan pelestarian artefak kota. Kehadiran arsitektur Kota Palangka Raya besar peranannya yang mengingatkan penduduk kota pada citra dan jati diri yang khas dari perkembangan sebuah kota (Hamidah dan Santoso, 2016). Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang sedang membangun sekarang ini sedang mengalami proses penataan kota yang berkesinambungan. Kota Palangka Raya seiring perkembangannya telah mengalami perubahan baik fisik maupun non fisik.

Peranan arsitektur kota sebagai rancangan kawasan/ kota, kehadirannya tidak terlepas dari pandangan penduduk kota terhadap pembenahan lingkungan fisik kota (*serial vision*). Ditinjau dari perkembangan Kota Palangka Raya keberadaan arsitektur kota ini kurang berfungsi optimal. Faktor yang utama karena arsitektur kota hanya dianggap sebagai hiasan untuk memperindah kota dan fungsinya pun mulai bergeser yaitu untuk memwadahi kegiatan komersial bagi masyarakat kota Palangka Raya. Hal ini dapat terlihat pada eksistensi arsitektur kota seperti Bundaran Besar, dimana awalnya Bundaran Besar sebagai arsitektur kota yang dirancang untuk Pembentuk tata massa dan pengarah sirkulasi kota Palangka Raya, kini berkembang menjadi kegiatan komersial yaitu perdagangan temporer seperti menjamurnya pedagang kaki lima di akhir minggu. Keberadaan arsitektur kota sekarang ini hanya dianggap sebagai bagian bangunan kota tanpa makna, karena kaburnya mental mapping warga kota

melihat peranan arsitektur kota dalam sejarah perkembangan kota Palangka Raya (Hamidah et al, 2021).

Arsitektur kota merupakan potensi identitas kota dengan menjaga nilai kesejarahan yang dimilikinya terhadap perkembangan Kota Palangka Raya (Hamidah dan Santoso, 2019). Upaya pelestarian dan penataan fungsi arsitektur kota yaitu sebagai penanda perkembangan kota merupakan prospek andalan sebagai bagian dari perencanaan dan pengembangan Kota Palangka Raya. Selama ini keberadaan arsitektur kota kurang mendapat perhatian dalam perencanaan, penataan dan pelestariannya, kondisi arsitektur kota yang dipandang kurang memiliki nilai penting bagi perkembangan Kota Palangka Raya, padahal arsitektur kota ini dapat ditingkatkan nilainya dan akan menjadi andalan Kota Palangka Raya melalui potensi yang dimilikinya sebagai sejarah nyata dari proses pertumbuhan kota dan kehadirannya mampu mewakili identitas perkembangan kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan menganalisa potensi arsitektur Kota Palangka Raya kehadirannya mampu mewakili sejarah pertumbuhan dan perkembangan Kota Palangka Raya. Manfaat penelitian antara lain: menggali berbagai arsitektur Kota Palangka Raya yang berpotensi sebagai elemen-elemen pembentuk Kota Palangka Raya, mengidentifikasi arsitektur kota yang ada di Kota Palangka Raya sebagai elemen pembentuk kota, menganalisa awal bentuk arsitektur kota sampai perkembangan terkini sebagai pelestarian aset budaya dan arsitektur Kota Palangka Raya, dan menginventarisasi data arsitektur Kota yang bernilai historis dalam perkembangan Kota Palangka Raya.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan penjabaran deskriptif dari hasil survei yang dilakukan didukung data lapangan (Groat and Wang, 2013). Teknik perekaman dan Pengumpulan data-data mengenai arsitektur kota akan dilakukan melalui penggalian informasi dan dokumentasi foto-foto obyek arsitektur kota berdasarkan periode waktu (Trancik, 1986) Untuk menangkap titik obyek amatan akan dibantu dengan pendekatan: (1) Pendekatan Diakronik; yaitu pendekatan berdasarkan proses pembentukan kota, dan evolusi global gradual pembentukan kota/ sejarah sebuah kota (*Logic of Space*); dan (2) Pendekatan Sinkronik; yaitu pendekatan berdasarkan konteks kurun waktu tertentu akan terjadi evolusi morfologi perubahan fungsi dan makna ruang kota Zaidulfar dan Alavarez, (2002).

Analisa dan menilai arsitektur Kota Palangka Raya yang telah terekam berdasarkan survey dan wawancara dengan masyarakat, metode yang digunakan berupa metode yang digunakan berupa metode pembobotan terhadap kriteria tolak ukur fisik-visual dan tolak ukur non visual yang dimiliki tiap-tiap wujud arsitektur Keseluruhan dari jumlah hasil penilaian ditetapkan 3 (tiga) peringkat sebagai arsitektur kota yang berpotensi sebagai penanda kota (*landmark*). Kategori peringkat tersebut antara lain: (1) Peringkat I = Total nilai 19-27; (2) Peringkat II= Total nilai 10-18; dan (3) Peringkat III= Total nilai 1-9.

Lokasi penelitian berada di Kota Palangka Raya, Kawasan Bundaran Besar, Bundaran Besar, Monumen Perletakan Batu Pertama Kota Palangka Raya, Tugu Bundaran Burung, Boulevard Jalan Yos Sudarso, Bandara Tjilik Riwut, Rumah Betang Mandala Wisata dan Tugu Jam Bundaran Kecil, Kantor DPRD, Rumah Jabatan Gubernur, dan sebagainya. Waktu yang diperlukan dari penelitian hingga pembuatan laporan selama 6 (Enam)

bulan. Bahan dan alat penelitian antara lain: (1) Foto udara Kota Palangka Raya tahun 1970, 1980, 1990, 2000 dan 2010, dan 2020. (2) Data-data statistik kawasan terkait jumlah arsitektur kota, potensi lahan, sarana umum, dan data pendukung lainnya. (3) Bahan untuk kuis dan wawancara. (4) GPS, Kertas Gambar dan kertas untuk pembuatan laporan.

Pendekatan dalam analisa menggunakan tolak ukur antara lain: (1) pendekatan analisa nilai kesejarahan. (2) pendekatan analisa nilai keistimewaan/ arsitektur lokal/ arsitektur tradisional. (3) pendekatan analisa nilai kelangkaan/ arkeologis. (4) Pendekatan analisa nilai estetika/ keunikan. (5) Pendekatan analisa nilai keselarasan pengaruh lingkungan. (6) Pendekatan analisa nilai sosial budaya/ religiolitas (Hamidah dan Santoso, 2016)

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Arsitektur kota merupakan identitas kota yang dirancang sebagai salah satu tolak ukur dalam perencanaan kota yang berhubungan dengan pelestarian bangunan bersejarah kota sebagai usaha nyata untuk konservasi kota. Demikian pula arsitektur kota Palangka Raya besar peranannya, kehadirannya mengingatkan kita pada citra dan jati diri perkembangan kota Palangka Raya.

Dengan berkembangnya bidang arsitektur dan teknologi, sekarang ini banyak ditemukan berbagai macam bentuk bangunan yang merupakan bagian dari arsitektur kota. Diantara bentuk-bentuk tersebut acapkali ada yang hampir serupa, meskipun fungsinya berbeda sama sekali. Hal ini membingungkan, terlebih bagi masyarakat awam yang melihatnya. Karya arsitektur hadir untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat, karena itu wajarlah bila selain karya arsitektur harus berfungsi sesuai dengan kegunaannya, karya

arsitektur hadir menjadi sesuatu yang dikenal dan mudah diingat oleh masyarakat, meskipun bentuk karya tadi banyak dipengaruhi oleh alam, budaya dan arsiteknya.

Kenyataan sekarang ini masyarakat sering tidak mengenal apalagi mengerti bentuk-bentuk arsitektur kota yang berada diantara mereka. Berbagai upaya mencari identitas suatu kota melalui bentuk arsitektur kotanya. Salah satu tolak ukur yang menduduki urutan pertama dalam perencanaan kota adalah nilai kesejarahan arsitektur kota yang hadir dalam bentuk arsitektur sebagai pesan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi media komunikatif terhadap perkembangan sebuah kota

Sebagaimana diketahui, kesinambungan masa lampau-masa kini-masa depan, yang menjadi pengejawantahan dalam karya arsitektur setempat merupakan faktor kunci dalam menumbuhkan harga diri, percaya diri, jati diri dan identitas sebuah kota. Keberadaan arsitektur kota Palangka Raya tampil dalam bangunan kuno mencerminkan nilai kisah kesejarahan, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakat kota Palangka Raya yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk melestarikan dan memelihara arsitektur kota tersebut. Demikian halnya yang ingin dicapai dari penataan arsitektur kota Palangka Raya ini yaitu ingin mengetahui bentuk arsitektur kota, mengidentifikasi dan menata arsitektur kota Palangka Raya, sehingga arsitektur kota tersebut terus eksis sebagai penanda dari perkembangan kota Palangka Raya.

Tolak ukur yang dapat digunakan dalam upaya menelusuri dan menemukan arsitektur kota Palangka Raya ditinjau dari pengantar arsitektur kota (James C. Snyder dan Anthony J. Catanese, 1979) yang mengemukakan tentang kriteria arsitektur kota antara lain: (1) Nilai kesejarahan baik nilai kesejarahan yang kasat

mata (melalui bangunan bersejarah) maupun nilai kesejarahan yang tidak kasat mata (melalui sejarah perkembangan kota). (2) Nilai arsitektur lokal/arsitektur tradisional sebagai inspirasi dan patokan dalam pengembangan kota dalam upaya pelestarian dilihat melalui bangunan tradisional. (3) Nilai arkeologis ditemukan dari eksistensi peninggalan sejarah kuno di kota tersebut berupa candi. (4) Nilai religiositas berdasarkan visual bangunan berhubungan dengan sistem religi masyarakat setempat berupa bangunan tempat ibadah. (5) Nilai kekhasan dan keunikan setempat adalah nilai kekayaan budaya, sosial dan ekonomi lokal yang dimiliki oleh kota tersebut. (6) Nilai keselarasan antara lingkungan buatan dengan potensi alam yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil survey di lapangan maupun wawancara dengan responden yang mengacu pada tinjauan pustaka tentang penilaian penanda arsitektur kota dalam bab II diatas (Cohen et al, 1989) pada Kota Palangka Raya didapatkan arsitektur kota yang dapat dibedakan dalam 5 (lima) bentuk fisik. Kelima bentuk fisik visual ini antara lain: (1) Monumen Perjuangan; (2) Tugu; (3) Taman Kota; (4) Bangunan Berarsitektur Khas; (5) Halaman yang luas memiliki kekhasan. Kelima bentuk fisik visual ini tersebar diberbagai lokasi dalam Kota Palangka Raya, sebagian besar berada di pusat Kota Palangka Raya (Hamidah dan Santoso, 2012).

Beberapa arsitektur kota yang terdapat di Kota Palangka Raya menurut bentuk fisik visual dapat dilihat pada rincian Tabel 1.



Tabel 1. Arsitektur Kota yang ada di Kota Palangka Raya

Bentuk Fisik	Nama Arsitektur Kota
1. Monumen Perjuangan	1. Monumen Perletakan Batu Pertama Kota P.Raya 2. Monumen (Depan Kantor Gubernur)
2. Tugu	1. Tugu Jam Bundaran Kecil 2. Tugu Bundaran Burung 3. Tugu Adipura 4. Tugu Jam Keluarga Berencana
3. Taman Kota	1. Boulevard Jalan Yos Sudarso 2. Bulevard Jalan RTA. Milono 3. Boulevard Jalan Tjilik Riwut
4. Bangunan yang memiliki kekhasan	1. Gedung DPRD Tingkat I Kalteng 2. Rumah Dinas Gubernur 3. Gedung Pusat Batang Garing 4. Kantor Setwilda Propinsi Tingkat I Kalteng 5. Kantor Setwilda Kotamadya Palangka Raya 6. Masjid Besar Nurul Iman 7. Masjid Raya Darul Salam 8. Gereja Immanuel 9. Gereja Katolik Keuskupan Palangka Raya 10. Rumah Betang Mandala Wisata 11. Gedung Pertemuan Umum Tambun Bungai 12. Kantor PT. PLN. 13. Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Kalteng 14. Kantor Kapolda Kalteng 15. Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Kalteng 16. Kantor Wilayah Departemen Keuangan 17. Kantor Pusat BPK Kalteng 18. Bandara Tjilik Riwut 19. Pelabuhan Rambang 20. Perpustakaan Daerah 21. Gerbang Utama Universitas Palangka Raya 22. Pertokoan Flamboyan
5. Halaman yang luas memiliki kekhasan	1. Bundaran Besar 2. Lapangan Sanaman Mantikai

(Sumber: Hamidah dan Santoso, 2012)

Dari hasil pengkajian diatas didapatkan 5 kategori arsitektur kota yaitu:

1. Nilai kesejarahan ditemui pada “Monumen Perletakan Batu Pertama Kota Palangka Raya”.
2. Nilai keistimewaan / arsitektur lokal pada “Perpustakaan Daerah Provinsi Kalteng”.
3. Nilai kelangkaan / arkeologis ditemui pada “Pelabuhan Rambang”
4. Nilai sosial budaya / regiolitas pada “Kantor DPRD Kalteng”
5. Nilai estetika / keunikan pada “Bundaran Besar”
6. Nilai keselarasan / pengaruh lingkungan ditemui pada bangunan “Taman Pasuh Kameloh”

Kelima arsitektur kota peringkat pertama tersebut diujikan pada 216 responden yang terdiri dari kalangan masyarakat kota Palangka Raya dan mahasiswa Universitas Palangka Raya. Hasil penilaian responden ini adalah kriteria awal mengetahui arsitektur kota yang berpotensi

sebagai penanda kota Palangka Raya.

Secara umum keberadaan arsitektur kota adalah sebagai bagian terpenting yang menunjukkan identitas dari perkembangan Kota Palangka Raya. Sebagaimana diketahui bahwa identitas kota adalah jiwa atau semangat suatu kawasan kota yang menjadi ciri atau penanda eksistensi suatu kota (Hamidah dan Santoso, 2019). Apabila kita kehilangan identitas berarti kita kehilangan ingatan dan tanpa disadari kita tidak tahu siapa diri kita. Arsitektur kota sebagai identitas Kota Palangka Raya ini merupakan nilai potensial sebagai pengingat bagi warga kota akan proses perkembangan Kota Palangka Raya. Identitas kota yang hadir dalam arsitektur kota merupakan perpaduan antara sejarah pertumbuhan kota dan akar dari budaya lokal muncul sebagai suatu ikatan kesinambungan masa lampau-masa kini-masa depan. Secara psikologis hakekat dari penelitian arsitektur kota ini sebagai pengenalan an upaya penataan keberadaan identitas kota. Dukungan warga kota dalam mengingat citra mental yang terbentuk dari arsitektur Kota Palangka Raya yang timbul sebagai ritme biologis berdasarkan ruang, tempat dan kurun waktu tertentu (sense of time) yang tercermin tumbuh dan mengakar sebagai bagian dalam aktifitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kota Palangka Raya merupakan tahapan dari proses perkembangan Kota Palangka Raya.

Identitas kota akan ditelusuri dengan melakukan pemetaan mental (mental mapping) warga Kota Palangka Raya sebagai langkah awal untuk mengingat peranan arsitektur kota merupakan identitas terpenting dalam sekuensi sejarah perkembangan Kota Palangka Raya. Pendekatan dilakukan berdasarkan

dari hasil analisa potensi arsitektur kota dituangkan dalam bentuk pendekatan konsep. Pemanfaatan potensi arsitektur kota memunculkan ide penelitian ini adalah untuk menganalisa pengembangan elemen arsitektur kota dalam perencanaan awal kota Palangka Raya yang memiliki potensi terhadap kepentingan perkembangan kota. Rencana pemanfaatan potensi arsitektur Kota Palangka Raya meliputi:

1. Analisa nilai kesejarahan kasat mata (melalui bangunan bersejarah) maupun nilai kesejarahan tidak kasat mata (melalui sejarah perkembangan kota) pada “Monumen Perletakan Batu Pertama” sebagai konsep obyek wisata bagian daya tarik point of interest perkembangan kawasan Kota Palangka Raya. Palangka Raya adalah salah satu ibukota baru di Indonesia yang direncanakan kotanya oleh Presiden Republik Indonesia I yaitu Ir. Soekarno. Palangka Raya sebagai ibukota Kalimantan Tengah berdiri pada tanggal 17 Juli 1957 yang memiliki nilai kesejarahan perencanaan kota yang baik (Riwut, 1979) Kota Palangka Raya memiliki luas lahan terbangun adalah 2.400 km seperti tertera pada Gambar 1 (Dinas Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, 2019).



Gambar 1. Pendekatan Konsep Monumen Perletakan Batu Pertama (Sumber: dokumentasi pribadi, 2022)

2. Analisa nilai keistimewaan/ arsitektur lokal/ arsitektur tradisional sebagai inspirasi dan patokan dalam pengembangan kota dalam upaya pelestarian dilihat melalui bangunan: “Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah” konsep kesan vista (image) bangunan komunikatif paduan alam untuk menyalurkan aspirasi masyarakat seperti tertera pada Gambar 2.
3. Analisa nilai kelangkaan/ arkeologis ditemukan dari eksistensi peninggalan sejarah kawasan kota tua pada “Pelabuhan Rambang” sebagai konsep peningkatan kualitas lingkungan kawasan tepian sungai. Menurut Wijanarka (2001) Kawasan tepian sungai merupakan bagian pengembangan kota (urban redevelopment) dan upaya menghidupkan



Gambar 2. Pendekatan Konsep Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Sumber: dokumentasi pribadi, 2022)



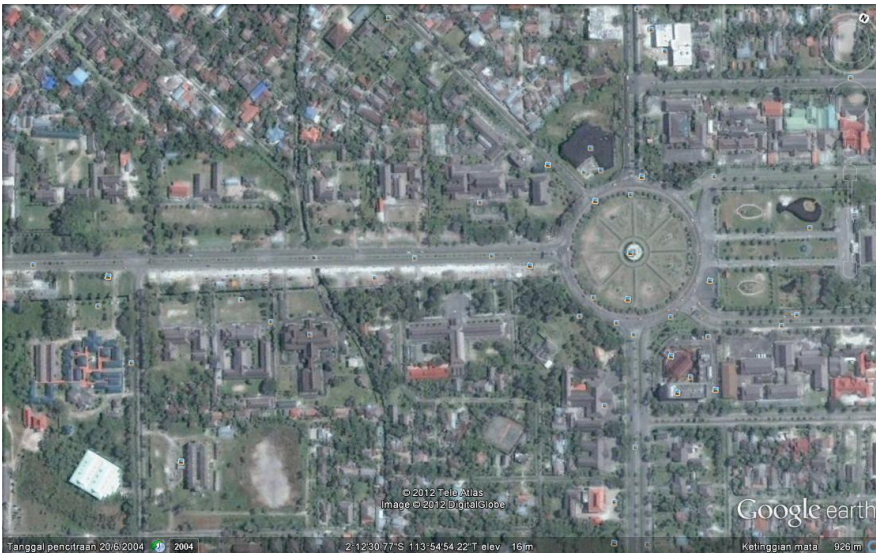
Gambar 3. Pendekatan Konsep Pelabuhan Rambang (Sumber: dokumentasi pribadi, 2022)

kawasan tepian sungai (city revitalization method) seperti tertera pada Gambar 3 (Garib dkk, 2016).

4. Analisa nilai sosial budaya/ religiositas berdasarkan visual bangunan setempat berupa “Rumah Dinas Gubernur Provinsi Kalteng” konsep paduan sistem religi budaya dan alam pada cerminan konsep permukiman masyarakat Suku Dayak Ngaju seperti tertera pada Gambar 4.
5. Analisa nilai etetika/ kekhasan dan keunikan setempat pada Kawasan Bundaran Besar sebagai nilai kekayaan budaya, sosial dan ekonomi lokal yang dimiliki oleh kawasan/ kota. Konsep bundaran sebagai ruang publik (public space) dimiliki/dimanfaatkan masyarakat melalui penataan taman, lingkungan dan plaza. Berdasarkan Peraturan Perencanaan kawasan di kota Palangka Raya penggunaan persil lahan terbangun adalah 60 % dan persil lahan tidak terbangun atau ruang hijau



Gambar 4. Pendekatan Konsep Rumah Dinas Provinsi Kalteng  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 2022)



Gambar 5. Pendekatan Konsep Kawasan Bundara Besar  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 2022)



Gambar 6. Pendekatan Konsep Kawasan Taman Pasuh Kameloh  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 2022)

adalah 40%. Sebagian besar lahan tidak terbangun ini adalah ruang terbuka hijau direncanakan untuk kegiatan masyarakat Palangka Raya Seperti Bundaran Besar, Bundaran Kecil maupun fasilitas umum lainnya seperti tertera pada Gambar 5.

6. Analisa nilai keselarasan / pengaruh lingkungan antara lingkungan buatan dengan potensi alam yang dimilikinya, pada “Taman Pasuh Kameloh”. Konsep tampilan visual (scenic corridor) pada paduan ruang terbuka (Tugu Perletakkan Batu Pertama berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah) dengan tampilan bangunan yang dinamis yaitu Gedung DRPR Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian perkembangan kota. Secara mendasar keberadaan ruang terbuka hijau ini sebagai salah satu elemen arsitektur kota yang berfungsi untuk mewadahi aktifitas sosial masyarakat kota Palangka Raya dan mampu berfungsi sebagai pembentuk tata massa bangunan dan pengarah sirkulasi kawasan. Selain ruang terbuka hijau, ada beberapa bangunan bersejarah lainnya merupakan arsitektur kota

yang memiliki potensi terhadap kepentingan kota yaitu sebagai identitas kota. (Stephen Carr, 1992). Ada beberapa potensi yang dimiliki arsitektur kota diantaranya adalah: (1) Arsitektur kota terletak di dalam kota Palangka Raya. (2) Kemudahan aksesibilitas disekitar kawasan sekitar. (3) Tempat bersejarah kota sebagai cikal bakal perkembangan kota. (4) Memiliki potensi view yang bagus terhadap kawasan seperti tertera pada Gambar 6.

## PENUTUP

Dalam perkembangan pembangunan kota, khususnya kota Palangka Raya lebih diperhatikan pemeliharaan dan pelestarian dari arsitektur kota yang menjadi bagian dari perkembangan kota ditemui pada elemen pembentuk kota yang mencerminkan citra dan jati diri Kota Palangka Raya. Adapun kesimpulan dari kajian arsitektur kota ini antara lain:

1. Keberadaan arsitektur kota adalah untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat sesuai fungsi dan kegunaannya. Kehadirannya menjadi sesuatu yang dikenal dan mudah diingat oleh masyarakat melalui bentuk arsitekturnya.
2. Pengantar awal untuk mengenali arsitektur kota dapat dilihat dari unsur-unsur fisik visual berupa: nilai kesejarahan, nilai arsitektur lokal/arsitektur tradisional, nilai arkeologis, nilai religiusitas, nilai kekhasan/keunikan setempat dan nilai keselarasan antara lingkungan buatan dengan potensi alamnya.
3. Keberadaan arsitektur kota tampil dalam bangunan maupun arsitektur kuno mencerminkan nilai kesejarahan, nilai arsitektur lokal/arsitektur tradisional, nilai arkeologis, nilai religiusitas, nilai kekhasan/keunikan setempat dan nilai keselarasan antara

lingkungan buatan dengan potensi alam yang dimilikinya.

4. Bila dilihat secara makro, masih banyak lagi kajian tolak ukur yang dapat dikembangkan untuk menggali potensi arsitektur kota yang merupakan elemen penting dari rangkaian perkembangan Kota Palangka Raya. Penelitian ini sebagai penggagas awal untuk menggali dan menemukan banyak lagi potensi arsitektur sebagai bagian perkembangan Kota Palangka Raya

Untuk mengkaji penelitian mendalam akan dilakukan penelitian lanjutan tentang aspek-aspek penataan arsitektur kota sebagai pelestarian dari perkembangan kota yang merupakan usulan dari masyarakat dan akan direkomendasikan pada Pemerintah Kotamadya Palangka Raya untuk pengajuan usulan perencanaan kawasan yang diperlukan masyarakat kota Palangka Raya. Keinginan masyarakat akan berperan aktif secara optimis mulai tahap membuat usulan penataan kawasan sampai tahap pelaksanaan nantinya. Hal ini dipandang penting dari segi kacamata peneliti sebagai perencana kota untuk memfasilitasi masyarakat kota, kiranya peran aktif masyarakat dengan pemerintah Kotamadya Palangka Raya untuk menciptakan kembali penataan arsitektur kota yang harmonis sebagai paduan tatanan bangunan dan keserasian lingkungan perlu direspon secara positif. Usulan penataan dan perencanaan arsitektur kota adalah memiliki potensi penting untuk membentuk identitas sebuah kota. Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara arsitektur kota merupakan wujud nyata pelestarian lingkungan kota. Perlu digaris bawahi peran perencanaan kota adalah mediasi atau alat penyampai komunikasi untuk menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat tentang eksistensi sebuah arsitektur kota sebagai bagian penting dari perkembangan kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko. 1984. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Penerbit UNDIP, Semarang.
- Biro Statistik Kalimantan Tengah. 2005. *Data-data Pertumbuhan Penduduk, Luas Tanah, Tata Guna Lahan, Tahun 1997, 2000, 2003 dan 2005*.
- Cohen, U dan Ryzim, LV. 1989. "Penelitian dalam arsitektur dalam Buku Pengantar Arsitektur" (Catanese, A dan Snyder, J, ed) Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Catanese, A dan Snyder, J. 1979. "Introduction to Urban Planning": New York, Mc. Graw Hill Book.
- Canter, David, "Psychology of Place", Architectural Press, 1977.
- Dinas Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. 2019. "Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Kota Palangka Raya.
- "Peraturan Tata Ruang Kota", 1991
- Hendraningsih, dkk. 1982. "Peran, Kesan dan Pesan Bentuk-bentuk Arsitektur", Penerbit Djambatan.
- Garib, T. W. et al. 2016 'Potensi Ruang Hijau Bagi Keberlangsungan Masyarakat Miskin Tepian Sungai Kahayan', XII(2).
- Groat, L. N. and Wang, D. 2013. *Architectural research methods*. John Wiley & Sons.
- Hamidah dan Santoso. 2016. *Potensi Arsitektur Kota sebagai Identitas Perkembangan Kota Palangka Raya*. Jurnal Inersia Volume 11 No. 1 Tahun 2016 hal 211-221.
- Hamidah dan Santoso, 2019. *Arsitektur Kota, Perancangan Kota, dan Ruang Terbuka Hijau*. Penerbit Deepublish Yogyakarta.
- Hamidah, N. et al. 2020 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Di Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya', *Dinamika Journal : Pengabdian Masyarakat*, 2(1). doi: 10.20884/1.dj.2020.2.1.961.
- Hamidah, N., Rijanta, R. and Setiawan, B. 2014. 'A Study Of River Transportation to Support a Kahayan Riverside Area in Palangkaraya City', pp. 1–17.
- Hamidah, N., Rijanta, R. and Setiawan, B. 2017. "Kampung" as a Formal and Informal Integration Model (Case Study : Kampung Pahandut, Central Kalimantan Province, Indonesia)', 31(July), pp. 43–55. doi: 10.23917/forgeo.v31i1.3074.
- Hamidah, N. and Santoso, M. 2021. 'Survival of urban people: lesson learn from kampung pahandut people, palangkaraya city', in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, p. 12122.
- John Ormbee Simonds., 1993 "Landscape Architecture", MC. Graw-Hill Book Company.
- Lynch, Kevin. 1972. "What time is this place", MIT Press.
- Rapoport, A. 1969. 'House Form and Culture, Prentice-Hall', Inc: New Jersey.
- Riwut, T. 1979 'Kalimantan Membangun [Kalimantan Developing]', Jakarta, Indonesia: PT Jayakarta Agung Offset.
- Soehoed, AR., 1997, "Penelitian Ruang Terbuka Publik"
- Sejarah Kebudayaan Kalimantan, 1994., "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional," Jakarta.
- Trancik, R. 1986. *Finding lost space: theories of urban design*. John Wiley & Sons.
- Wijanarka. 2001 "Dasar-dasar Konsep Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Tepi Sungai di Palangka Raya", Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Zaidulfar, Eko Alvarez. 2002. "Morfologi Kota Padang", Disertasi Arsitektur UGM, Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.

## REFLEKSI PEMBANGUNAN PEMUDA: BIAS DEFEKTOLOGI KEPEMUDAAN DALAM GOVERNMENTALITY

Oleh :

**Olav Iban**

Perencana Ahli Muda di Dispora Kalteng  
olaviban@gmail.com

### Abstrak

*Tulisan ini menyajikan tinjauan reflektif tentang pembangunan kepemudaan di Indonesia. Pokok utamanya membahas segregasi peran pemuda dalam pembangunan, bagaimana pemuda memandang pemerintah, dan dialektika pemerintah-pemuda yang produktif sehingga bisa membentuk governmentality (sikap kepemimpinan/kepengaturan) lalu mengimplementasikannya dalam rupa intervensi pembangunan melalui program-program kepemudaan yang terbebas dari bias “defektologi kepemudaan”—sebuah kecenderungan untuk menganggap ada yang salah dalam diri pemuda, sehingga pemerintah merasa perlu membenahinya. Bias ini menyebabkan posisi pemuda, dalam relasinya dengan pemerintah, menjadi ter subordinasi dan dipandang hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, alih-alih sebagai subjek pembangunan. Dengan terhindarnya pemerintah dari bias tersebut, maka pembangunan kepemudaan akan lebih partisipatif sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.*

### Kata kunci:

*pemuda; segregasi; governmentality; defektologi kepemudaan; pembangunan partisipatif.*

### PENDAHULUAN

Defektologi kepemudaan adalah istilah figuratif dalam studi kepemudaan untuk menerangkan cara pandang, atau kecenderungan untuk memandang, bahwa selalu saja ada yang salah dalam diri kaum muda. Secara etimologis, defektologi berasal dari kata defek yang berarti cacat. Berbekal cara pandang ini, pihak eksternal (pemerintah, masyarakat, pasar, dll) merasa punya kewenangan mendiagnosa apa yang cacat atau salah pada kaum muda, dan kemudian juga merasa memiliki hak untuk memberikan “resep” yang dianggap manjur untuk menyembuhkannya.

Anggapan bahwa ada yang salah dalam diri pemuda sehingga pihak eksternal merasa perlu membenahinya, menjadi dasar justifikasi bagi pihak eksternal—dalam relasi kuasa bisa diartikan sebagai pemerintah—untuk membimbing dan mengarahkan pemuda ke jalan yang dianggap benar oleh pemerintah. Cara pandang ini, jika dipahami secara kritis, menunjukkan kuasa untuk mengontrol, menundukkan, dan membisukan suara-suara kaum muda (Sutopo 2022).

Pada konteks pembangunan kepemudaan, cara pandang ini kerap muncul dalam *governmentality* (sikap pemerintahan/kepengaturan) yang menempatkan posisi pemuda lebih rendah. Pemuda diposisikan hanya sebagai objek penerima manfaat pembangunan, bukan sekaligus sebagai subjek atau pelaku pembangunan (partisipatif) yang suaranya juga perlu didengar.

Bias defektologi kepemudaan menjadi rintangan dalam pembangunan yang seharusnya bersifat partisipatif dan dialektis antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), bahwa: "...pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki." Juga sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa: "Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara."

Melaksanakan pembangunan kepemudaan dengan sikap bahwa pemerintah lebih tahu permasalahan pemudanya daripada pemuda tahu permasalahannya sendiri, sudah tidak lagi relevan bahkan kontraproduktif. Perencanaan pembangunan partisipatif, yang melibatkan pemuda tidak hanya sebatas menerima manfaat pembangunan tetapi juga turut merencanakan pembangunan, semestinya sudah mulai diterapkan sejak dua dasawarsa yang lalu ketika UU SPPN dan UU Kepemudaan terbit. Namun, mengapa bias defektologi kepemudaan masih terasa dalam pembangunan Indonesia dewasa ini? Bagaimana sebaiknya pemerintah memandang pemuda sehingga dapat melakukan tata kelola kepemudaan yang ideal?

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka terhadap teori dan kajian kepemudaan, serta dengan tinjauan fenomenologis guna melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam proses panjang pembangunan kepemudaan

di Indonesia, sehingga diharapkan mampu memberi pandangan reflektif *governmentality* tentang bagaimana sebaiknya pemerintah melakukan tata kelola kepemudaan.

Defenisi operasional *governmentality* dalam tulisan ini mengacu pada konsep yang diusung oleh Michel Foucault yang diterjemahkan menjadi "kepengaturan" (dalam Li, 2018) atau "sikap kepemerintahan" (dalam Naafs dan White 2012). Secara sederhana, *governmentality* dapat diartikan sebagai kehendak untuk memperbaiki yang terletak pada gelanggang kekuasaan (Li, 2018:9). Lebih luas, *governmentality* adalah pengarahannya perilaku: yakni upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasi sedemikian rupa (melalui program-program pembangunan). *Governmentality* bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, perbaikan keadaan hidup mereka, peningkatan kemakmuran, dst. (Foucault, 2001:100). Dalam konteks kajian kepemudaan, *governmentality* dapat dimaknai sebagai praktik tata pemerintahan atau pengelolaan pemuda oleh pemerintah (Naafs dan White 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Segregasi Pemuda dari Pembangunan

Terlebih dulu perlu diketahui proses panjang tata kelola kepemudaan di Indonesia. Tidak seperti di awal sejarah perjuangan Indonesia yang didominasi keterlibatan pemuda, pada periode panjang kemerdekaan berangsur-angsur terjadi segregasi (pengucilan) peran pemuda dalam pembangunan.

Melalui telaahan berbagai sumber, Naafs dan White (2012) meringkas secara lugas bagaimana penyusutan peran pemuda dimulai dari keterlibatan paradoksal pemuda Angkatan '66 dalam proses politik sebagai kelompok yang



cukup berani menggugat kekuasaan waktu itu. Seperti Angkatan '45 meruntuhkan kekuasaan kolonialisme, geliat protes Angkatan '66 berhasil meruntuhkan kekuasaan Orde Lama.

Problemnya, kendati pemuda Angkatan '66 dipandang sebagai “pengawal perubahan” dengan menggugat kekuasaan Orde Baru, begitu kekuasaan berhasil ditumbangkan dan rezim baru ditegakkan, otoritas baru mengharapkan pemuda ini mengubah diri menjadi wahana yang tidak lagi menggugat tetapi justru melegitimasi dan membela rezim baru. Aktivisme kritis kaum muda, yang semula menjadi kapak untuk menebang Orde Lama, tidak diinginkan lagi oleh rezim Orde Baru demi menjaga stabilitas sosial dan politik. Kedua sisi mata pedang pemuda—sebagai pelaku perubahan sekaligus ancaman berbahaya stabilitas sosial dan politik—hidup berdampingan dengan canggung selama masa Orde Baru seperti yang terjadi pada gerakan mahasiswa 1974 dan 1978, hingga periode represi sepanjang dekade 1980-an.

Menurut Loren Ryter, peneliti di *University of Washington*, dalam disertasinya berjudul *Youth, Gangs and the State in Indonesia* (dalam Naafs dan White 2012) salah satu upaya Orde Baru untuk menyetir pemuda ke arah minimalisasi ancaman terhadap kekuasaan adalah dengan membuat mode organisasi pemuda seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di tahun 1973, atau Pemuda Pancasila yang pada tahun 1980-an memiliki peran penting di kekuasaan, dengan kantor di semua tingkatan, dari nasional dan provinsi hingga RT, yang masing-masing mengkoordinasi tingkatan di bawahnya—secara tidak langsung mengontrol pergerakan kaum muda agar tidak menjadi ancaman stabilitas sosial dan politik.

Upaya kepengaturan lain yang kontroversial dipakai Orde Baru untuk mengontrol

pemuda adalah dengan terbitnya SK Mendikbud No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) pada tahun 1978 di masa Menteri Daoed Joesoef yang berakibat kampus steril dari aktivitas politik sepanjang tahun 1980-an. Upaya kepengaturan lain adalah dengan menerbitkan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur penyeragaman ideologi, bahwa semua organisasi (termasuk organisasi pemuda) tidak diperbolehkan menggunakan asas lain selain Pancasila sebagai Asas Tunggal. Ada pula upaya yang lebih ekstrim berupa penghilangan paksa banyak aktivis pemuda pada tahun 1997-1998.

Selama masa Orde Baru, Indonesia mengalami “de-demokratisasi”, suatu penurunan kualitas demokrasi secara bertahap menjadi otokrasi bahkan despotisme. Di era itu, gerakan pemuda dikontrol—baik kontrol hegemoni maupun dominasi—sehingga pemuda mengalami segregasi dari proses pembangunan. Segregasi ini terjadi dari kedua sisi: yakni kaum muda terkucilkan akibat eksekusi kebijakan pemerintah; dan kaum muda mengucilkan diri dari proses pembangunan sebab tidak dibukanya ruang partisipasi publik oleh pemerintah. Kedua sisi segregasi ini menandakan tata kelola kepemudaan yang kontraproduktif oleh pemerintah Orde Baru.

Berangsur-angsur pemuda semakin tidak dilibatkan dan suaranya tidak lagi didengar, tidak seperti di masa awal rezim ketika Soeharto dekat dengan kelompok pemuda yang memberikan legitimasi pembawa perubahan atas Orde Lama. “Teror” ketakutan yang ditebar oleh Orde Baru membuat banyak kaum muda menjadi apatis, sebisa mungkin menghindari konflik dengan penguasa, dan menjauhkan diri dari aktivisme sosio-politik terang-terangan.

Orde Baru yang lahir akibat gerakan

pemuda, berakhir ironis lewat gerakan pemuda juga. Dari 78 tahun (1945-2023) masa kemerdekaan Indonesia sampai hari ini, 41%-nya adalah periode Orde Baru (1966-1998) yang ciri pembangunannya sangat sentralistis, sehingga tidaklah mengejutkan jika residunya masih terasa hingga sekarang, terkhusus pada sikap apatis dan ketidaksukaan kaum muda kepada pemerintah.

## **B. Refleksi Pembangunan Pemuda: Memaknai Ulang**

### **B.1. Pemuda Memandang Pemerintah**

Menggugat kekuasaan adalah tema populer bagi kaum muda. Pemerintah kerap dipandang secara aksiomatis sebagai (1) representasi kekuasaan, sekaligus (2) representasi dari generasi tua, dua kelompok yang selalu dijadikan sasaran gugatan kaum muda.

Kaum muda mempersepsikan generasi tua di atasnya sebagai kelompok yang kehilangan relevansi, sudah ketinggalan zaman, dan ide-ide mereka kolot (Madjid, 1973:49). Argumentasi percepatan pensiun generasi tua (Baby Boomers dan generasi X) di birokrasi sebagai solusi memperbaiki kinerja pemerintah yang sering muncul dalam diskusi-diskusi, adalah salah satu bentuk frustrasi kaum muda terhadap generasi tua yang dianggap penghalang kemajuan. Kebanyakan generasi tua di birokrasi juga tidak mampu (atau tidak mau) menaikkan kompetensi di bidang teknologi informasi sehingga memperlebar jurang pemisah dengan generasi muda (generasi Milenial dan generasi Z) yang merupakan generasi digital native.

Persepsi ini berkontribusi atas munculnya ketegangan antar-generasi yang mengganggu komunikasi efektif di antara mereka, dan berakibat kontraproduktif. Ketegangan antar-generasi, semisal di internal pemerintah, bisa berakibat:

terganggunya upaya transformasi digital di pemerintahan; tidak efisiennya penganggaran dan pengerjaan sebuah proyek atau kegiatan pemerintah; hingga masih ada permakluman atau toleransi terhadap budaya koruptif di birokrasi.

Terganggunya komunikasi antara generasi tua dan muda juga berdampak pada efektivitas program-program pemerintah yang menysasar kaum muda. Akibat minimnya hubungan resiprokal antara kaum muda dan pemerintah, program-program kepemudaan yang disusun cenderung defektologis. Minimnya evaluasi yang jujur dan metodologis terhadap program-program kepemudaan ibarat sinar ultraviolet yang masuk ke bumi, namun justru terjebak oleh efek rumah kaca emisi karbon, dan pada akhirnya memperpanas suhu bumi.

Sebagai representasi penguasa sekaligus wajah generasi tua, ditambah masih adanya residu sentralistis Orde Baru, membuat praktik tata kelola kepemudaan oleh pemerintah mendapat resistensi justru dari kaum muda itu sendiri. Di sisi lain, kaum muda merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan—baik dalam penyusunan peraturan, perencanaan pembangunan, hingga monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan. Suara kaum muda yang mereka rasa tidak terwakilkan di DPR/DPRD, memaksa mereka bersuara nyaring di jalan unjuk rasa, atau menyalurkan aspirasinya melalui kanal media sosial (*viral-based policy*) demi mendesak respon pemerintah (Saputra, 2023:2).

Pemuda memandang pemerintah sebagai representasi generasi tua didukung data jumlah ASN berdasarkan generasi. Menurut data BKN tahun 2022 (dikutip dari [www.dataindonesia.id](http://www.dataindonesia.id)), ASN generasi Baby Boomers (kelahiran 1946-1964) adalah sebesar 5,79% dari 4,2 juta lebih ASN seluruh Indonesia. Dengan asumsi usia pensiun ASN di umur 58 tahun, 60 tahun untuk pimpinan



## B.2. Bias Defektologis dalam Memandang Pemuda

Dalam studi-studi kepemudaan (Naafs dan White 2012), setidaknya ada tiga dimensi dalam memaknai pemuda, yaitu:

1. Pemuda sebagai generasi: hubungan pemuda dengan orang dewasa, pemuda dan perubahan sosial politik, pemuda dan negara.
2. Pemuda sebagai transisi: dari sekolah ke kerja, dari keadaan bergantung ke otonomi.
3. Pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya: bahasa, gaya hidup, identitas, praktik agama, dan media baru.

Dalam UU 40/2009 tentang Kepemudaan, pemuda didefinisikan secara normatif sebagai kelompok usia 16-30 tahun (pasal 1). Secara sempit hal ini dapat diartikan bahwa pemuda dipandang sebagai generasi. Tidak seperti gender, kelas, atau etnis yang memiliki sasaran baku atau zakelijk/saklek, generasi adalah sasaran bergerak, sehingga pemuda sebagai generasi adalah kondisi sambung-menyambung memasuki dan keluar dari “petak” usia pemuda (Naafs dan White 2012).

Dalam UU 40/2009 tentang Kepemudaan juga disebutkan bahwa pembangunan kepemudaan adalah “proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan, yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.” Hal tersebut berarti, selain pemuda dimaknai sebagai generasi, pemerintah juga diwajibkan melihat pemuda sebagai transisi dan sebagai pencipta konsumen budaya dengan segala dinamikanya.

tinggi dan fungsional madya, serta 65 tahun untuk fungsional utama (Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017), maka secara kasar dapat disimpulkan bahwa ASN generasi Baby Boomers yang masih aktif di pemerintahan adalah mereka yang memiliki jabatan tinggi dan berperan besar dalam pengambilan keputusan di pemerintahan pusat maupun daerah.

Jika generasi Baby Boomers ditambahkan dengan generasi X (kelahiran 1965-1976 yang jumlahnya 41,29%) maka hampir separuh (atau 47%) dari total ASN di Indonesia adalah “orang-orang tua” menurut sudut pandang para pemuda (usia 16-30 tahun atau kelahiran 1993-2008).

Tentang bagaimana dan mengapa pemerintah dipandang sebagai representasi kekuasaan sejatinya sudah jelas tanpa perlu dijabarkan lebih jauh. Hal tersebut dapat ditemukan dalam kajian-kajian pada teori hegemoni Gramsci, teori kekuasaan Bourdieu, hingga konsep kekuasaan Foucault. Kekuasaan—dengan segala sumber daya yang besar di tangan pemerintah, pada akhirnya akan selalu dianggap sebagai kekuatan yang harus terus-menerus digugat sebagai bentuk kontrol, terutama oleh kaum muda sebagai kelompok kritis di sebuah negara.

Bagaimana pemerintah Indonesia saat ini memandang pemuda tentu tidak lepas dari wacana sentralistis Orde Baru yang masih kuat di dunia birokrasi. Telah disebut di awal bahwa 47% ASN adalah generasi tua yang pernah mengalami hidup di era Orde Baru. Label yang dulu disematkan oleh pemerintah Orde Baru kepada pemuda dan aktivismenya seperti istilah subversif, makar, mengganggu stabilitas nasional, gerakan pengacau keamanan, hingga rehabilitasi, adalah istilah-istilah negatif yang sebenarnya merujuk pada penjahat dan orang sakit.

Di sisi lain, pengertian pemuda kerap dibebani nilai-nilai positif seperti: pemuda harapan bangsa; pemuda agen perubahan; pemuda motor pembaharuan; atau pemuda masa depan bangsa.

Dengan terbitnya UU Kepemudaan, pendefinisian pemuda dan bagaimana sikap pemerintahan terkait pembangunan kepemudaan seharusnya sudah jelas, tertata, dan terukur. Problemanya terletak pada implementasi program-program kepemudaan yang kerap mengalami bias defektologis, yang secara tidak langsung memupuk prasangka buruk terhadap peran pemuda dalam kehidupan sosial politik. Kecenderungan pemerintah yang memandang pemuda harus “dibenahi agar menjadi sesuai dengan harapan bangsa” mengakibatkan kurangnya komunikasi efektif resiprokal antara pemerintah dan pemuda untuk bersama-sama menyusun program pembangunan kepemudaan yang ideal.

Bukti bias defektologis kepemudaan dalam *governmentality* terindikasi dari beberapa hal: Pertama, minimnya partisipasi pemuda dalam perencanaan program kepemudaan. Selama ini Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik pemuda hanya dilaksanakan oleh segelintir Pemerintah Daerah karena tidak ada mandatory di Pemerintah Pusat untuk melaksanakannya. Dalam Musrenbang non-

tematik yang mandatory sekalipun, suara pemuda kerap tidak terwakilkan.

Kedua, semakin maraknya gelombang protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Protes ini secara kritis bisa dimaknai (1) adanya resistensi pembangunan dari pemuda; (2) ketegangan antar-generasi; dan (3) tersumbatnya kanal partisipasi formal pemuda-pemerintah. Tidak sedikit aksi protes mahasiswa di jalanan yang direspon secara represif bahkan opresif dengan menggunakan kekerasan. Penggunaan kekerasan, menurut Tania Murray Li (2018:32), menunjukkan bahwa “rakyat” tidak menginginkan perbaikan yang ditawarkan, bahwa di mata mereka pembangunan tersebut tidak efisien, merusak, atau sama sekali tidak penting.

Ketiga, belum optimalnya manfaat program kepemudaan yang sampai ke akar rumput sehingga tidak terjadi inklusivitas dalam implementasi program pemerintah. Dari kacamata pemerintah, indikator keberhasilan program-programnya adalah angka-angka statistik dan teknokratis. Dari kacamata pemuda di akar rumput, program-program pemerintah (terutama Pemerintah Pusat) hanya dinikmati oleh segelintir pemuda berprestasi, yang dengan privilege prestasinya tersebut malah semakin mendapat compound interest dari pemerintah berupa akses pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Sementara mayoritas kaum muda Indonesia—yang minim prestasi dan jauh dari akses pelatihan dan pendidikan, semestinya lebih perlu mendapatkan intervensi pemerintah untuk melawan obstacles/hambatan kemajuannya.

Kaum muda tidak mengukur keberhasilan program-program pemerintah dari berapa kilometer jalan diaspal, berapa karung pupuk didistribusikan, atau berapa orang peserta pelatihan kepemudaan. Kaum muda menginginkan ukuran kualitatif berupa nilai/value sebagai indikator baik-tidaknya

program-program pemerintah, melalui pertanyaan apa dan bagaimana manfaatnya setelah jalan itu diaspal, setelah pupuk didistribusikan, atau setelah para pemuda mendapatkan pelatihan. Tidak selalu pembangunan itu dibutuhkan oleh masyarakat atau bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bila program-program itu bias defektologis.

### **B.3. Relasi Produktif Pemerintah dan Pemuda**

*Governmentality*, atau praktik tata kelola pemuda oleh pemerintah, yang terbebas dari bias defektologis, dapat menghasilkan program-program kepemudaan yang ideal. Untuk mewujudkan itu harus ada relasi produktif antara pemerintah dan pemuda, dengan cara peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di segala sisi (penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengendalian dan evaluasi pembangunan).

Sebagai permulaan, laku pragmatis yang dapat diperbuat pemerintah adalah: (1) Memaknai ulang pemuda dan menjuktaposisikan pemuda dengan pemerintah; (2) Membuka ruang-ruang dialog seluas-luasnya; dan pada akhirnya (3) Melakukan penguatan partisipasi pemuda (*meaningful participation*).

Juktaposisi atau menempatkan berdampingan antara pemerintah dan pemuda (tidak hanya menjadi objek pembangunan saja, tetapi juga subjek pembangunan) adalah cita-cita demokrasi di mana rakyat adalah pemilik kedaulatan. Suara rakyat (dalam hal ini adalah pemuda) akan semakin mudah didengar dan diperdengarkan dengan adanya perluasan ruang-ruang dialog yang inklusif, mudah diakses, dan responsif.

Pemaknaan ulang dan penempatan pemuda sejajar dengan pemerintah sebagai subjek sekaligus objek pembangunan akan mampu melepas subordinasi pemuda dari belenggu residu

Orde Baru. Suara pemuda akan lebih bernilai di hadapan para birokrat dan teknokrat, sehingga setiap aspirasi maupun kritik dari pemuda yang disampaikan melalui ruang-ruang dialog akan mendapat umpan balik dan bermakna (*meaningful*).

Mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (hal. 393) disebutkan bahwa: “Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).”

Partisipasi rakyat merupakan tolok ukur demokrasi yang paling sederhana, bahwa semakin besar keterlibatan rakyat dalam proses berjalannya negara, maka semakin demokratis negara itu. Partisipasi rakyat bertujuan memberi kesempatan luas agar publik ikut mengendalikan arah kebijakan yang dampaknya akan mereka pikul (Saputra, 2023).

Relasi produktif antara pemerintah dan pemuda akan menciptakan iklim demokrasi yang ideal dan membuahakan pembangunan kepemudaan yang intensional dan resiprokal, sehingga mendorong kemajuan pemuda Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan pemuda yang ideal adalah dengan melibatkan pemuda dalam *governmentality* pembangunan kepemudaan itu sendiri. Bagaimanapun juga,

pemuda adalah penyangga masa depan Indonesia. Kaum mudalah yang di masa depan nanti akan memetik hasil kerja keras pembangunan hari ini. Berdasarkan UU SPPN dan UU Kepemudaan, sudah semestinya pemerintah melakukan tata kelola kepemudaan yang terhindar dari bias defektologis dengan mengoptimalkan dialog yang inklusif untuk menciptakan relasi produktif dengan kaum muda sehingga terwujudlah pembangunan partisipatif bersama-sama dengan pemuda, yang kemudian dapat menghasilkan program-program kepemudaan yang ideal: dari pemuda, oleh pemuda, dan untuk pemuda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Foucault, Michel. 1991. "Governmentality," dalam G. Burchell, C. Gordon, dan P. Miller (eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VIII/2020*. Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Li, Tania Murray. 2018. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Marjin Kiri, Tangerang Selatan.
- Naafs, Suzanne dan White, Ben. 2012. "Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda di Indonesia". *Jurnal Studi Pemuda* 1(2): 89-106. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32063>
- Saputra, Auditya Firza. 2023. "Jangan Tunggu Viral Dulu: Pentingnya Portal E-Participation untuk Gandeng Warga dalam Kebijakan Publik". *Membangun Perdebatan yang Inklusif dan Progresif*. The Conversation Indonesia, Jakarta.
- Sutopo, Oki Rahadiano. 2022. "Perdebatan Perspektif Transisi dalam Kajian Kepemudaan". *Jurnal Studi Pemuda* 11(1):1-13. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.75260>

# ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN PERIKANAN BERKELANJUTAN INOVATIF DI KALIMANTAN TENGAH

Oleh :

**Neny Kristianie**

Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah  
Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112 email : dislutkan@kalteng.go.id

Di Kalimantan Tengah, pengembangan perikanan berkelanjutan merupakan topik penting yang menghadirkan peluang dan masalah strategis. Studi ini bermaksud untuk mengkaji tantangan strategis yang muncul dalam pengembangan perikanan yang kreatif dan berkelanjutan di daerah tersebut.

*In Central Kalimantan, sustainable fisheries development is a crucial subject that presents both strategic opportunities and problems. This study intends to examine strategic challenges that arise in the development of creative, sustainable fisheries in the area.*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar dan beragam, dengan perairan laut yang melimpah di sekitar wilayahnya. Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan adalah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki garis pantai yang panjang, sungai-sungai besar, dan danau-danau yang luas, yang semuanya memberikan peluang besar untuk pengembangan sektor perikanan. Namun, meskipun potensinya besar, sektor perikanan di Kalimantan Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan strategis yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu strategis dalam pembangunan

sektor perikanan yang sedang berkembang di Kalimantan Tengah. Industri perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah, sebuah wilayah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terutama perairan sungai dan danau.

Perikanan berkelanjutan adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi dan ekologi Indonesia. Kalimantan Tengah, dengan potensi perairan yang besar, memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan perikanan berkelanjutan yang inovatif. Namun, ada sejumlah isu strategis yang perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam upaya ini. Dalam artikel ini, kita akan menggali beberapa isu kunci tersebut dan berbicara tentang perlunya berpikir kritis dalam menghadapinya. Salah satu isu kritis dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan industri perikanan yang cepat dapat berpotensi merusak ekosistem perairan dan mengancam kelangsungan hidup spesies ikan. Dalam mengatasi masalah ini, berpikir kritis melibatkan penilaian yang jelas tentang dampak aktivitas perikanan terhadap lingkungan. Solusi yang inovatif, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan yang bijaksana, harus diutamakan.

Pengelolaan sumber daya perikanan adalah komponen kunci dari perikanan

berkelanjutan. Pemikiran kritis diperlukan dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang memastikan stok ikan tetap berkelanjutan. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ekosistem perairan, dan kebijakan yang berdasarkan pada bukti ilmiah. Inovasi juga diperlukan dalam pemantauan dan pengawasan perikanan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya. Pengembangan perikanan berkelanjutan inovatif di Kalimantan Tengah merupakan isu strategis yang memerlukan kritis berpikir. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan perikanan berkelanjutan inovatif di Kalimantan Tengah. Pengembangan perikanan berkelanjutan inovatif harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Sebagai contoh, pengembangan food estate di Kalimantan Tengah harus memperhatikan risiko sosial-ekonomi dan sumber daya alam.

Pengembangan perikanan berkelanjutan inovatif harus memperhatikan pengelolaan perikanan yang baik. Pengelolaan perikanan yang baik dapat dilakukan dengan memperhatikan konservasi sumber daya ikan dan pengelolaan area perlindungan laut. Dalam pengembangan perikanan berkelanjutan inovatif di Kalimantan Tengah, kritis berpikir sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan pengelolaan perikanan yang baik. Pendekatan berkelanjutan juga harus diterapkan untuk memastikan keberhasilan pengembangan perikanan berkelanjutan inovatif di Kalimantan Tengah. Pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah merupakan isu strategis yang memerlukan analisis kritis. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

1. Karakteristik nelayan di Kalimantan Tengah yang bersifat subsisten dan tradisional menjadi

kendala dalam pengembangan perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya perikanan.

2. Pengelolaan perikanan yang baik menjadi kunci dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah
3. Pengelolaan perikanan yang baik dapat dilakukan dengan memperhatikan konservasi sumber daya ikan
  - a. Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Pengembangan perikanan berkelanjutan inovatif harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Pemanfaatan lahan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan dampak perubahan iklim. Selain itu, pengembangan food estate di Kalimantan Tengah harus memperhatikan risiko sosial-ekonomi dan sumber daya alam.

- b. Pendekatan Berkelanjutan

Pengembangan perikanan berkelanjutan inovatif harus dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan. Pendekatan berkelanjutan dapat dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, pengelolaan perikanan yang baik, dan konservasi sumber daya ikan.

Dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, analisis kritis sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan pengelolaan perikanan yang baik. Pendekatan berkelanjutan juga harus diterapkan untuk memastikan keberhasilan pengembangan perikanan berkelanjutan inovatif di Kalimantan Tengah.



## 1.2. Kerangka Teori

Landasan teoritis untuk menyusun strategi pembangunan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah akan dibahas di Bab 2. Bab ini menyoroti ide-ide penting tentang perikanan berkelanjutan serta elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan dalam membuat rencana yang sukses untuk pembangunan perikanan daerah.

### 1.2.1. Perikanan Berkelanjutan

Konsepperikananberkelanjutanmerupakan titik sentral dalam pembangunan perikanan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan alamiah. Hal ini mencakup upaya-upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, memastikan adanya tangkapan ikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam pengelolaan perikanan (FAO, 2018).

### 1.2.2. Faktor-faktor Lokal dalam Pembangunan Perikanan

Dalam konteks Kalimantan Tengah, faktor-faktor lokal memiliki peran penting dalam pengembangan perikanan berkelanjutan. Kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayah ini akan memengaruhi strategi pembangunan perikanan yang dapat diterapkan. Selain itu, faktor-faktor budaya dan kearifan lokal juga perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Smith, 2017).

## BAB II METODE

### 2.1. Pemilihan Masalah Penelitian

- Identifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
- Tinjau literatur yang relevan dan studi

terkait untuk memahami konteks dan latar belakang isu-isu tersebut.

### 2.2. Perancangan Penelitian

- Pilih metode penelitian yang sesuai untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Ini dapat mencakup wawancara dengan pemangku kepentingan, survei, analisis dokumen, dan observasi lapangan.
- Kembangkan kuesioner atau pedoman wawancara yang akan digunakan dalam penelitian.

### 2.3. Pengumpulan Data

- Lakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti nelayan, petani ikan, pemerintah daerah, LSM, dan akademisi.
- Survei lapangan dapat digunakan untuk mengumpulkan data tambahan dari komunitas perikanan.
- Kumpulkan data sekunder seperti data statistik perikanan, kebijakan terkait, dan dokumentasi lainnya.

### 2.4. Analisis Data

- Gunakan pemikiran kritis untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Identifikasi pola, tren, dan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
- Gunakan alat analisis seperti analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengevaluasi isu-isu strategis.

### 2.5. Interpretasi Hasil

- Tafsirkan hasil analisis dan hubungkan dengan pertanyaan penelitian.

- Identifikasi rekomendasi kebijakan atau tindakan strategis yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

## 2.6. Penyusunan Laporan

- Sajikan hasil penelitian dalam sebuah laporan yang jelas dan sistematis. Laporan harus mencakup ringkasan masalah, metode penelitian, temuan, dan rekomendasi.
- Pastikan laporan ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

## 2.7. Diseminasi Hasil

- Bagikan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas perikanan.
- Presentasikan hasil penelitian dalam seminar atau lokakarya untuk mendiskusikan temuan dan rekomendasi lebih lanjut.

## 2.8. Evaluasi

- Evaluasi dampak dari temuan dan rekomendasi penelitian terhadap pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
- Pertimbangkan untuk melakukan penelitian lanjutan jika diperlukan.

## BAB III HASIL DAN KESIMPULAN

### 3.1. Hasil

Bab ini akan mengevaluasi hasil dari penelitian serta mendiskusikan pemikiran kritis terkait dengan isu-isu strategis dalam pengembangan perikanan inovatif berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Tentu saja! Berikut adalah contoh hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah:

Nelayan (Bapak Suryadi, nelayan lokal):

Pewawancara: “Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam mempraktikkan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah?”

Bapak Suryadi: “Tantangan terbesar kami adalah penangkapan ikan yang berlebihan. Banyak nelayan di sini masih menggunakan metode yang merusak. Kami membutuhkan lebih banyak kesadaran dan dukungan untuk praktik berkelanjutan dan akses ke peralatan modern.”

Perwakilan Pemerintah Daerah (Bapak Pratama, Kepala Dinas Perikanan):

Pewawancara: “Kebijakan apa saja yang ada untuk mempromosikan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah?”

Bapak Pratama: “Kami telah menerapkan peraturan zonasi untuk membatasi penangkapan ikan di daerah tertentu, mempromosikan manajemen berbasis masyarakat, dan menawarkan pelatihan teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Tujuan kami adalah untuk menyeimbangkan konservasi dan mata pencaharian.”

Perwakilan LSM (Ibu Rahayu, dari Green Seas Foundation):

Pewawancara: “Bagaimana organisasi Anda mendukung pengembangan perikanan berkelanjutan di wilayah ini?”

Ibu Rahayu: “Kami bekerja sama dengan masyarakat, memberikan pendidikan tentang praktik-praktik berkelanjutan, membantu menetapkan zona larang tangkap, dan mendukung pembentukan koperasi lokal untuk pengelolaan sumber daya yang adil.”

Perwakilan Pemerintah Daerah (Bapak Pratama, Kepala Dinas Perikanan):

Pewawancara: “Kebijakan apa saja yang ada untuk mempromosikan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah?”

Bapak Pratama: “Kami telah menerapkan peraturan zonasi untuk membatasi penangkapan ikan di daerah tertentu, mempromosikan pengelolaan berbasis masyarakat, dan menawarkan pelatihan teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Tujuan kami adalah untuk menyeimbangkan konservasi dan mata pencaharian.”

Perwakilan LSM (Ibu Rahayu, dari Green Seas Foundation):

Pewawancara: “Bagaimana organisasi Anda mendukung pengembangan perikanan berkelanjutan di wilayah ini?”

Ibu Rahayu: “Kami bekerja sama dengan masyarakat, memberikan pendidikan tentang praktik-praktik berkelanjutan, membantu menetapkan zona larang tangkap, dan mendukung pembentukan koperasi lokal untuk pengelolaan sumber daya yang adil.”

Pakar Akademik (Dr. Putra, Ahli Biologi Perikanan):

Pewawancara: “Penelitian apa yang sedang dilakukan untuk memajukan pembangunan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah?”

Dr. Putra: “Kami mempelajari populasi ikan, kebiasaan berkembang biak, dan restorasi habitat. Temuan penelitian menginformasikan kebijakan dan membantu kami memahami bagaimana melindungi ekosistem dengan lebih baik sambil memungkinkan panen yang berkelanjutan.”

Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah:

#### 1. Penurunan Kualitas Air

Permasalahan yang dijumpai di lingkungan perairan sungai rungan antara lain penurunan kualitas air dan adanya kecenderungan penurunan hasil tangkap nelayan. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan ikan dan ketersediaan sumber daya perikanan.

#### 2. Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Pengembangan perikanan berkelanjutan inovatif harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Pemanfaatan lahan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan dampak perubahan iklim. Selain itu, pengembangan food estate di Kalimantan Tengah harus memperhatikan risiko sosial-ekonomi dan sumber daya alam.

#### 3. Pengelolaan Perikanan yang Buruk

Pengelolaan perikanan yang buruk menjadi kendala dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Pengelolaan perikanan yang buruk dapat menyebabkan penurunan stok ikan dan kerusakan ekosistem perairan.

#### 4. Karakteristik nelayan

Karakteristik Nelayan di Kalimantan Tengah yang bersifat subsisten dan tradisional menjadi kendala dalam pengembangan perikanan berkelanjutan

Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, kendala-kendala tersebut harus diatasi dengan kritis berpikir dan pendekatan berkelanjutan. Pengelolaan perikanan yang baik dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi kunci

dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah memiliki tantangan dan peluang yang signifikan. Dalam konteks ini, beberapa hasil utama adalah:

- **Keberlanjutan Sumber Daya:** Terdapat masalah serius terkait dengan penangkapan berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Namun, juga terdapat potensi untuk memulihkan sumber daya perikanan melalui praktik-praktik pengelolaan yang lebih baik.
- **Inovasi Teknologi:** Terdapat potensi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perikanan melalui penerapan teknologi inovatif, seperti pemantauan jaringan nirkabel dan sistem informasi geografis (GIS).
- **Partisipasi Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bersama sumber daya perikanan dapat meningkatkan hasil berkelanjutan.
- **Aspek Ekonomi:** Perikanan berkelanjutan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemikiran kritis terkait dengan isu-isu strategis dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah melibatkan beberapa pertimbangan penting:

- **Keseimbangan Lingkungan dan Ekonomi:** Perlu ditemukan keseimbangan yang tepat antara pengembangan ekonomi melalui perikanan dan perlindungan lingkungan. Pemikiran kritis diperlukan untuk menilai dampak berbagai strategi terhadap lingkungan

dan ekonomi.

- **Pengaruh Teknologi:** Penggunaan teknologi inovatif harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada dampak negatifnya, seperti potensi kerusakan lingkungan.
- **Partisipasi Masyarakat:** Bagaimana masyarakat lokal terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi strategi perikanan berkelanjutan adalah faktor yang kritis. Pertanyaan mengenai pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan dan distribusi manfaat harus dievaluasi dengan cermat.

### 3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran kritis terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

- Pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah memerlukan pendekatan yang holistik yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- Inovasi teknologi dapat berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan perikanan, tetapi perlu diintegrasikan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif.
- Partisipasi aktif masyarakat lokal adalah kunci untuk mencapai perikanan berkelanjutan dan harus diutamakan dalam pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, pengembangan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Tengah adalah tantangan yang kompleks, namun juga peluang besar. Dengan pendekatan yang bijaksana dan pemikiran kritis yang cermat terhadap isu-isu strategis, dapat dicapai hasil yang positif bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, kerja sama antara pemerintah, nelayan, ilmuwan, dan pemangku kepentingan

lainnya adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan perikanan yang diinginkan.

#### **Daftar Pustaka**

- *Food and Agriculture Organization (FAO)*. (2018). Panduan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Rome: FAO.
- Smith, J. (2017). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Studi Kasus Kalimantan Tengah. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 45(2), 112-128.
- Berkes, F. (2007). *Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Konsep dan Praktek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

# **KAJIAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN PERIKANAN SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

Oleh :  
**Dr. Ir. Evi Veronica,  
MS , Suriansyah, S.Pi., M.Si,  
Ir. H. Hermansyah, M.Si**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumberdaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya cukup melimpah. Potensi ini merupakan modal utama untuk lebih maju dalam perkembangannya dimasamasa mendatang baik terhadap potensi sumberdaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang terdapat di Kabupten Sukamara. Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya harus dilakukan secara rasional agar sumberdaya ikan tetap lestari. Kajian tingkat efektivitas pengembangan perikanan secara berkelanjutan di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2023 bertujuan: a. Menganalisis tingkat efektivitas pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya dominan di Kabupaten Sukamara, b. Mengidentifikasi hasil analisis tingkat efektivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya dominan di Kabupaten Sukamara sebagai prioritas yang akan dikembangkan, dan c. Memberikan rekomendasi-rekomendasi prioritas pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya dominan sebagai penyusunan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk pengembangan bidang perikanan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi terhadap pengembangan perikanan tangkap adalah:

1. Tingkat efektivitas pengembangan perikanan tangkap perairan laut yang tertinggi adalah menggunakan alat tangkap jaring insang (jaring tetap dan jaring hanyut), 2. Tingkat efektivitas pengembangan perikanan tangkap perairan tawar yang tertinggi adalah menggunakan alat tangkap perangkap (bubu, lukah dan tempirai), pancing dan rawai dan untuk alat tangkap jaring insang masih cukup efektif untuk dikembangkan, 3. Tingkat efektivitas pengembangan perikanan budidaya perairan payau yang tertinggi adalah sistem tambak udang vaname dan untuk tambak ikan bandeng dan udang sayur/udang laut masih efektif dikembangkan bila tamanan mangrove dihijau kembali, dan 4. Tingkat efektivitas pengembangan perikanan budidaya perairan tawar yang tertinggi adalah sistem budidaya kolam ikan nila, lele, patin dan gurame dan untuk sistem budidaya jaring apung ikan nila dan patin, sistem budidaya karamba ikan mas dan sistem budidaya bioflok budidaya ikan nila masih efektif dikembangkan.

Rekomendasi prioritas perikanan tangkap dan budidaya adalah: 1. Penyediaan pangkalan unit BBM dan penyaluran BBM untuk nelayan perairan laut di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci, serta untuk nelayan perairan tawar di Kecamatan Sukamara, 2. Pengadaan alat tangkap (jaring insang) dan kapal/kelotok untuk nelayan perikanan perairan laut, serta pengadaan alat tangkap

perangkap (bubu, lukah dan tempirai), pancing dan rawai dan kapal/kelotok untuk nelayan perairan tawar Kecamatan Jelai, Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung. 3. Pemberdayaan (pelatihan) kelompok nelayan perikanan tangkap perairan laut Kecamatan Pantai Lunci dan Jelai, serta untuk perikanan tangkap perairan tawar Kecamatan Jelai, Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung, 4. Pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di

Kecamatan Jelai sebagai penyediaan es batu dan tempat pelelangan ikan untuk keperluan nelayan Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci, 5. Perbaikan jalan untuk angkutan produksi perikanan tangkap perairan laut, serta untuk angkutan produksi perikanan budidaya tambak di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci, 6. Penanaman mangrove (bakau) untuk tambak ikan bandeng dan udang sayur/udang laut perairan payau di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci, 7. Penggalan sungai dan kemalir tambak ikan bandeng dan udang sayur/udang laut di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci, 8. Pemberdayaan (pelatihan) kelompok pembudidaya tambak ikan bandeng dan udang sayur/udang laut di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci maupun kelompok pembudidaya ikan sistem kolam, karamba, jaring apung dan bioflok di Kecamatan Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung, 9. Pengadaan pabrik pembuatan pakan ikan budidaya perairan umum (tawar) di Kecamatan Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung, 10. Pengembangan sistem budidaya ikan lokal air tawar (gabus, belida, kelabau dan betok) di Kecamatan Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung, 11. Pengembangan balai benih ikan lokal air tawar (gabus, belida, kelabau dan betok) di Kecamatan Sukamara untuk keperluan benih ikan di Kecamatan Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung dan 12. Pemanfaatan

perairan rawa untuk pengembangan beji ikan yang terdapat di Desa Sukaraja, Desa Pangkalan Muntai dan Desa Patarikan Kecamatan Sukamara.

## ISU MASALAH

Kabupaten Sukamara memiliki potensi perikanan tangkap perairan laut yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai di sepanjang pantai 75 km memiliki potensi produksi  $\pm 1.977,34$  ton/tahun, tingkat produktivitas  $>1,8$  ton/satuan alat tangkap dan tingkat efektivitas  $>12,95\%$ . Potensi produksi perikanan tangkap perairan tawar yang terdapat di Kecamatan Jelai, Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung pada perairan sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya  $\pm 7.654$  Ha memiliki potensi produksi  $\pm 704,67$  ton/tahun, tingkat produktivitas  $>2,85$  ton/satuan alat tangkap dan tingkat efektivitas  $>11,891\%$ . Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana peralatan penangkapan yang dimiliki nelayan, modal/biaya pengembangan usaha cukup tinggi dan pengetahuan dan keterampilan teknis bagi nelayan penangkap ikan sangat terbatas.

Kabupaten Sukamara memiliki potensi lahan perikanan budidaya perairan payau yang terdapat Kecamatan Pantai Lunci dan Jelai  $\pm 2.832$  Ha dan yang sudah dikembangkan hanya mencapai  $\pm 441,60$  Ha ( $15,59\%$ ) memiliki potensi produksi  $\pm 979,27$  ton/tahun, tingkat produktivitas  $>19,25$  ton/luas lahan dan tingkat efektivitas  $>42,78\%$ . Potensi lahan perikanan budidaya perairan tawar yang terdapat di Kecamatan Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung  $\pm 8,10$  Ha memiliki potensi produksi  $>87,55$  ton/tahun, tingkat produktivitas  $>13,35$  ton/luas lahan dan tingkat efektivitas  $>15,04$ . Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana budidaya yang dimiliki pembudidaya ikan, modal/biaya

pengembangan usaha cukup tinggi, pengetahuan dan keterampilan teknis bagi pembudidaya ikan sangat terbatas, terbatasnya ketersediaan benih dan tingginya harga pakan ikan di pasaran.

## LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan yang dihadapi terhadap pengembangan perikanan tangkap perairan laut dan perairan tawar adalah terbatasnya modal/biaya terutama dalam hal: pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang harganya cukup tinggi, maka perlu adanya mitra usaha dan SDM teknis bagi nelayan penangkap masih terbatas terutama pengetahuan dan keterampilan, maka perlu adanya pelatihan, bimbingan teknis dari pihak yang terkait.

Permasalahan yang dihadapi terhadap pengembangan perikanan budidaya ikan perairan payau dan perairan tawar adalah terbatasnya modal/biaya terutama dalam hal: peyediaan benih dan pakan ikan yang berkelanjutan, maka perlu adanya Balai Benih Ikan (BBI) dan pabrik pembuatan pakan ikan dan SDM teknis bagi pembudidaya ikan masih terbatas terutama pengetahuan dan keterampilan, maka perlu adanya pelatihan, bimbingan teknis dari pihak yang terkait.

## PRE-EXISTING POLICIES

Komoditi unggulan perikanan tangkap perairan laut di Kabupaten Sukamara adalah jenis ikan Alu-Alu (*Sphyraena putnamae*), Mayung Besar (*Netuma thalassina*), Barakuda (*Sphyraena* sp), Kembung (*Rastrelliger faughni*), Belanak (*Valamugil seheli*), Kakap (*Liopropoma randalli*), Kuro/Senangin (*Polydactylus microstomus*), Pari (*Rhynchobatus djiddensis*), Telang (*Scomberoides lysan*), Gulamah (*Johnius amblycephalus*), Tenggiri (*Scomberomorus commerson*), Bawal Putih (*Pampus argenteus*),

Udang Windu (*Penaeus* sp), Udang Jerbung (*Penaeus merguensis*), Bulu Ayam (*Thryssa hamiltonii*), Cumi-Cumi (*Loligo chinensis*), Rajungan (*Portunus pelagicus*), Lobster (*Panulirus argus*), Kepiting Bakau (*Scylla* sp), dan Sotong (*Pharaoh cuttlefish*). Jenis alat tangkap yang digunakan adalah Jaring

Insang (Gill net), Lempara Dasar (Basic Lampara), Pukat Dorong (Pushnet), Pancing (Fishing rod), Rawai (Snood) didukung daya dukung lahan yang terdapat di Kecamatan Kuala Jelai dan Pantai Lunci, tersedianya pangsa pasar lokal dan nasional dengan harga ekonomis cukup tinggi, tersedianya tenaga kerja lokal, lokasi usaha yang strategis dan tersedianya pedagang pengumpul untuk penanganan pasca panen. Komoditi unggulan perikanan tangkap perairan tawar di Kabupaten Sukamara adalah ikan: Gabus (*Channa striata*), Betok (*Anabas testudineus*), Toman (*Channa micropeltes*), Belida (*Chitala lopis*), Betutu (*Oxyeleotris marmorata*), Lais (*Kryptopterus micronema*), Baung (*Hemibagrus nemurus*), Tapah (*Ompok bimaculatus*), Paray/Seluang (*Rasbora* sp) Gurame (*Osphronemus goramy*), Hampala (*Hampala macrolepidota*), Lele (*Clarias batrachus*), Nilem (*Osteochilus vittatus*), Sepat Rawa (*Trichogaster trichopterus*), Sepat Siam (*Trichogaster pectoralis*), Sepatung (*Pristolepis fasciata*), Tambakan (*Helostoma temminckii*), Tawes (*Barbodes gonionotus*), Kelabau (*Osteochilus melanopleurus*) dan Udang Galah (*Macrobrachium rosenbergii*). Jenis alat tangkap yang digunakan adalah Jaring Insang (Gill net), Perangkap Ikan (Fish trap), Pancing (Fishing rod), Rawai (Snood) dan Jala Lempar (Cast net) didukung daya dukung lahan yang terdapat di Kecamatan Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung, tersedianya pangsa pasar lokal dengan harga ekonomis cukup tinggi, tersedianya tenaga kerja lokal, lokasi usaha letaknya sangat strategis



dan tersedianya pedagang pengumpul untuk penanganan pasca panen.

Komoditi unggulan perikanan budidaya ikan perairan payau di Kabupaten Sukamara adalah jenis ikan: Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*), Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) dan Udang Sayur/Udang Laut (*Trichiurus lepturus*). Sistem budidaya yang digunakan adalah Tambak (*Shrimp farming*) didukung daya dukung lahan yang terdapat di Kecamatan Kuala Jelai dan Pantai Lunci, tersedianya pangsa pasar lokal dan nasional dengan harga ekonomis cukup tinggi, tersedianya tenaga kerja lokal dan pengembangan lokasi usaha yang strategis. Komoditi unggulan perikanan budidaya ikan perairan tawar di Kabupaten Sukamara adalah jenis ikan: Nila (*Oreochromis niloticus*), Lele (*Clarias gariepinus*), Mas (*Cyprinus carpio*), Gurame (*Osphronemus goramy*) dan Patin (*Pangasius sp.*). Sistem budidaya yang digunakan adalah: Kolam (Pond), Karamba (Cage), Jaring Apung (Floating net) dan Bioflok (Biofloc) didukung daya dukung lahan yang terdapat di Kecamatan Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung, tersedianya pangsa pasar lokal dan nasional dengan harga ekonomis cukup tinggi, tersedianya tenaga kerja lokal dan pengembangan lokasi usaha letaknya sangat strategis.

Berdasarkan hasil analisa tingkat efektivitas perikanan tangkap perairan laut yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan sebagai prioritas utama adalah perikanan tangkap dengan menggunakan alat tangkap jaring insang (jaring tetap dan jaring hanyut). Tingkat efektivitas perikanan tangkap perairan tawar yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan sebagai prioritas utama adalah perikanan tangkap dengan menggunakan alat tangkap perangkap (bubu, lukah dan tempirai), pancing dan rawai. Tingkat efektivitas perikanan budidaya perairan payau yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan

sebagai prioritas utama adalah perikanan budidaya sistem tambak udang vaname, ikan bandeng dan udang sayur/udang laut. Tingkat efektivitas perikanan budidaya perairan tawar yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan sebagai prioritas utama adalah perikanan budidaya dengan menggunakan sistem budidaya kolam ikan nila, lele, patin dan gurame sistem budidaya bioflok ikan nila, sistem budidaya karamba ikan mas dan sistem budidaya jaring apung ikan nila dan patin.

### PEMILIHAN KEBIJAKAN

Pemilihan kebijakan sebagai gambaran tindakan terhadap pengembangan perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan di Kabupaten Sukamara ada 2 (dua) program potensial adalah:

1. Program pengembangan perikanan tangkap perairan laut di Kecamatan Pantai lunci dan Jelai, serta perikanan tangkap perairan umum (tawar) di Kecamatan Jelai, Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung adalah: Program penyediaan pangkalan unit BBM dan penyaluran BBM untuk nelayan, Program pemberdayaan (pelatihan) kelompok nelayan perikanan tangkap perairan laut dan perikanan tangkap perairan tawar, Program pengelolaan PPI di Kecamatan Jelai untuk penyediaan es batu dan tempat pelelangan ikan, Program perbaikan jalan untuk angkutan produksi perikanan tangkap dan Program pengembangan beji ikan di lahan perairan rawa.
2. Program pengembangan perikanan budidaya perairan payau di Kecamatan Pantai Lunci dan Jelai adalah: Program penanaman mangrove (bakau) pada tambak ikan bandeng dan udang sayur/udang laut, Program penggalian sungai dan kemalir tambak ikan bandeng dan udang

sayur/udang laut, Program pemberdayaan (pelatihan) kelompok pembudidaya ikan perairan payau dan perairan tawar. Program pengembangan perikanan budidaya perairan tawar di Kecamatan Jelai, Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung adalah: pemberdayaan (pelatihan) kelompok pembudidaya ikan perairan tawar, Program pengadaan pabrik pembuatan pakan ikan budidaya perairan tawar, Program pengembangan sistem budidaya ikan lokal air tawar (gabus, belida, kelabau dan betok), dan Program pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ikan lokal air tawar (gabus, belida, kelabau dan betok).

#### **KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN**

Keuntungan pengembangan perikanan tangkap perairan laut dengan tingkat efektivitas >12,95% dan perikanan tangkap perairan tawar dengan tingkat efektivitas >11,89%. Keuntungan pengembangan perikanan budidaya perairan payau dengan tingkat efektivitas >42,78% dan perikanan budidaya perairan tawar dengan tingkat efektivitas >15,04%.

Kelemahan terhadap pengembangan perikanan tangkap perairan laut dan perikanan tangkap perairan tawar adalah terbatasnya modal/biaya terutama dalam hal: biaya sarana dan prasarana penangkapan yang cukup tinggi dan SDM teknis bagi nelayan penangkap masih terbatas terutama pengetahuan dan keterampilan yang memiliki. Kelemahan terhadap pengembangan perikanan budidaya ikan perairan payau dan perairan tawar adalah terbatasnya modal/biaya terutama dalam hal: biaya sarana dan prasarana budidaya yang cukup tinggi, mangrove (bakau) pada tambak ikan bandeng dan udang sayur/udang laut dalam keadaan gundul, serta sungai dan kemalir tambak ikan bandeng dan udang sayur/

udang laut terjadi pendangkalan, peyediaan benih dan pakan ikan yang berkelanjutan cukup terbatas, dan SDM teknis bagi pembudidaya ikan masih terbatas terutama pengetahuan dan keterampilan yang memiliki.

#### **REKOMENDASI**

Rekomendasi hasil Kajian Tingkat Efektivitas Pengembangan Perikanan Secara Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2023 adalah:

1. Judul : Kajian Tingkat Efektivitas Pengembangan Perikanan Secara Berkelanjutan Di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
2. Ringkasan : Pengembangan perikanan tangkap perairan laut dengan jenis alat tangkap jaring insang (jaring tetap dan jaring hanyut) secara berkelanjutan merupakan program unggulan Kabupaten Sukamara karena memiliki produksi sebesar >222,59 ton/tahun, tingkat produktivitas sebesar >1,80 ton/satuan alat tangkap dan tingkat efektivitas >12,95% dan pengembangan perikanan tangkap perairan tawar dengan jenis alat tangkap perangkap (bubu, lukah dan tempirai), pancing dan rawai secara berkelanjutan merupakan program unggulan Kabupaten Sukamara karena memiliki produksi sebesar >168,45 ton/tahun, tingkat produktivitas sebesar >2,85 ton/satuan alat tangkap dan tingkat efektivitas >11,89%. Pengembangan perikanan tangkap perairan laut dan perikanan tangkap perairan tawar didukung daya dukung lahan, tersedianya pangsa pasar lokal dan nasional dengan harga ekonomis cukup tinggi, tersedianya tenaga kerja lokal, lokasi usaha letaknya sangat strategis, dan tersedianya pedagang pengumpul untuk penanganan pasca panen. Pengembangan perikanan budidaya perairan

payau sistem budidaya tambak udang vaname secara berkelanjutan merupakan program unggulan Kabupaten Sukamara karena memiliki produksi sebesar >192,45 ton/tahun, tingkat produktivitas sebesar >19,25 ton/luas lahan dan tingkat efektivitas >42,78% dan pengembangan perikanan budidaya perairan tawar sistem budidaya kolam ikan nila, lele, patin dan gurame secara berkelanjutan merupakan program unggulan Kabupaten Sukamara karena memiliki produksi sebesar >13,35 ton/tahun, tingkat produktivitas sebesar >12,84 ton/luas lahan dan tingkat efektivitas >15,04%. Pengembangan perikanan budidaya perairan payau dan perairan tawar didukung daya dukung lahan, tersedianya pangsa pasar lokal dan nasional dengan harga ekonomis cukup tinggi, tersedianya tenaga kerja lokal, lokasi usaha letaknya sangat strategis, dan tersedianya pedagang pengumpul untuk penanganan pasca panen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. 2020. Efektivitas Pemberdayaan Petani Kolam Melalui Kelompok Budidaya Ikan Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1): 78–86.
- Ahmad, D., & Erly, S. 2019. Status dan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi. *Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan VIII*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, pp: 104–110.
- Aprilia, R.M., Mustaruddin, M., Wiyono, E.S., & Zulfainarni, N. (2017). Analisis Efisiensi Unit Penangkapan Pukat Cincin di Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo Banda Aceh. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 4(1), 9–20.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. Kabupaten Sukamara Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara. Sukamara.
- Dafuiddin, S., Yusli, W., & Luky, A. 2014. Efektivitas Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (Studi Kasus Desa Mattiro Labangeng Kabupaten Pangkep). *Jurnal Kelautan*, 7(2): 100–109.
- Dinas Kelautan dan Perikanan [DKP]. 2018. Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya.
- Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara. 2020 dan 2021. Laporan Tahunan. Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kabupaten Sukamara. Sukamara.
- Dwi, M.Z. 2014. Pengembangan Perikanan Budidaya: Efektivitas Program Minapolitan Dalam Pengelolaan Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Kabupaten Gresik. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 10(4): 453–465.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]. 2016. Peta Sentra Produksi Perikanan Budidaya. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]. 2020. Laporan Kinerja Semester I. Kementerian Koordinator Bidang Kemeritiman dan Investasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Jakarta.
- Lestari., Rini, P., & Indah, M. 2015. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Studi Kasus Di

Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01): 195-201.

Pomeroy, R., L, Garces., M, Pido., & G, Silvestre. 2010. Ecosystem-Based Usheries Management in Smallscale Tropical arine Usheries: Emergingmodels of Governance Arrangements in the Philippines. *Marine Policy*, 34: 298–308.

Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW]. 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032. Pememrintah Kabupaten Sukamara. Sukamara.

Suriansyah,. Evi, V., & Hermansyah. 2022. Kajian Analisis SWOT Potensi Unggulan Budidaya Perairan Payau Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, *Jurnal Ilmu Hewani Tropika*, 11(2): 33–40.

Susanto, A., Irnawati, R., & Syabana, M.A. 2017. Fishing efficiency of LED Lamps for Fixed Lift Net Fisheries in Banten Bay Indonesia. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic*

*Sciences*, 17(2): 283–2 91.

Thunberg. E., Walden, J., Agar, J., Felthoven, R., Harley,A., Kasperski, S., Lee, J., Lee, T., Mamula, A., Stephen, J., & Strelcheck,A. (2015). Measuring changes in multi-factor productivity in the U.S. catch share usheries. *Marine Policy*, 62: 294–301.

Trenkel, V.M., N.T, Hintzen., K.D. Farnsworth,. C, Olesen., D, Reid., A, Rindorf., S, Shephard., & M.D, Collas. 2015. Identifying Marine Pelagic Ecosystem Management Objectives and Indicators. *Marine Policy*, 55: 23–32.

Walden, J., Fissel, B., Squires, D., & Vestergaard, N. 2015. Productivity Change in Commercial Usheries: An Introduction to the Special Issue. *Marine Policy*, 62: 289–293. Yonvitner, Mennofatria, B., & Rahmat, K. 2020. Kajian Tingkat Efektivitas Perikanan Untuk Pengembangan Secara Berkelanjutan di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI)*, 12(1): 35–46.



# KAJIAN DETERMINAN, INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF UNTUK PENCEGAHAN STUNTING TERHADAP KEJADIAN STUNTING DI KABUPATEN MURUNG RAYA KALIMANTAN TENGAH

Oleh :

**Dhini<sup>1</sup>, Teguh Supriono<sup>2</sup>, Irene Febriani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Diploma III Gizi Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Indonesia

<sup>2</sup>Diploma III Gizi, Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Indonesia

<sup>3</sup>Diploma III Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Indonesia

## Abstract

*Background: Stunting is a condition of chronic malnutrition that occurs during the critical period of the growth and development process starting from the fetus, where the results of measuring body length/height according to age (TB/U or PB/U) show  $< -2$  SD s.d.  $< -3$  SD from WHO standards. Stunting is caused by various determinant factors (In the Social Determinants of Health (SDoH) theory, the degree of community health is determined by social, structural and individual factors. Social factors such as government policies, political conditions, economic growth while structural factors such as parents' education and employment, living environment, settlement, as well as individual factors include previous health history, parents' height, consumption, infections and others. This research was conducted in March – November 2023. The population in this research was the people of Kab. Murung Raya. The data obtained from the quantitative data will then be processed through editing, coding, data entry and data cleaning. Data obtained qualitatively was carried out by source triangulation, analysis triangulation and data triangulation. The focus of the program to reduce stunting is anemia screening, consumption of blood supplement tablets (TTD), pregnancy checks, consumption of blood supplement tablets (TTD), providing additional food for KEK mothers, monitoring growth and development, exclusive breastfeeding, PMT and villages not defecating at random. Reducing the percentage of stunting in Kab. Murung Raya based on EPPGBM data reached 17%. It is hoped*

*that the priority program can be achieved according to the target in order to achieve a reduction in stunting rates.*

## Kata kunci:

*pemuda; segregasi; governmentality; defektologi kepemudaan; pembangunan partisipatif.*

## Abstrak

*Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada saat periode kritis dari proses tumbuh dan kembang mulai janin, dimana hasil pengukuran panjang/tinggi badan menurut umur (TB/U atau PB/U) menunjukkan  $< -2$  SD s.d.  $< -3$  SD dari standar WHO. Stunting disebabkan oleh berbagai macam determinan faktor. Dalam teori Social determinant of Health (SDoH), derajat kesejahatan masyarakat ditentukan oleh faktor sosial, struktural, dan individu. Faktor sosial seperti kebijakan pemerintah, keadaan politik, pertumbuhan ekonomi sedangkan faktor struktural seperti pendidikan dan pekerjaan orang tua, lingkungan tinggal, pemukiman, serta faktor individu meliputi riwayat kesehatan sebelumnya, tinggi orang tua, konsumsi, infeksi dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – November 2023. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kab. Murung Raya. Data yang diperoleh dari hasil data kuantitatif selanjutnya akan dilakukan proses editing, coding, entry data dan cleaning data. Data yang diperoleh secara kualitatif dilakukan triangulasi sumber, triangulasi*

*analisis dan triangulasi data. Fokus program untuk menurunkan stunting yaitu skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah (TTD), pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambahan darah (TTD), pemberian makanan tambahan bagi ibu KEK, pemantauan tumbuh kembang, ASI eksklusif, PMT dan desa tidak BAB sembarang. Penurunan persentase stunting Kab. Murung Raya berdasarkan data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) mencapai 17%. Diharapkan dapat mencapai program prioritas sesuai dengan target agar dapat mencapai penurunan angka stunting.*

## PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada saat periode kritis dari proses tumbuh dan kembang mulai janin, dimana hasil pengukuran panjang/tinggi badan menurut umur (TB/U atau PB/U) menunjukkan  $< -2$  SD s.d.  $< -3$  SD dari standar WHO 1. Stunting pada anak merupakan masalah yang cukup serius karena berkaitan dengan risiko terjadinya kesakitan di masa yang akan datang serta sulitnya untuk mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Menurut UNICEF masalah stunting disebabkan oleh dua penyebab langsung yaitu asupan makan dan penyakit infeksi 2.

Penyebab langsung tersebut berhubungan dengan faktor pola asuh, ketahanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan. Namun, akar masalah dari faktor-faktor tersebut terdapat pada level individu dan rumah tangga seperti tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, sosial budaya, ekonomi, dan politik 3. Faktor asupan makan yang berhubungan langsung dengan status gizi pada balita dapat dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak baik serta kondisi ketahanan pangan pada rumah tangga, sehingga secara tidak langsung kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi status gizi balita terkait dengan aspek ketersediaan pangan,

kualitas dan kuantitas pangan, serta cara pemberian makan pada balita 4.

“Prevalensi stunting secara global di dunia termasuk di Indonesia masih tinggi. Pola pemberian makan pada balita pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat mempengaruhi asupan gizi yang bisa berdampak secara langsung pada kejadian stunting.” Permasalahan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi sering kali mendapatkan perhatian di sebagian Negara yang berkembang yang meliputi underweight, stunting, wasting dan defisiensi mikronutrien 5. “Hal tersebut disebabkan karena rendahnya akses pada makanan bergizi, kurangnya asupan air mineral dan vitamin, serta beragam pangan dan juga sumber protein hewani yang masih kurang

Adapun risiko jangka panjang yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan reproduksi, produktivitas kerja menurun dan konsentrasi pada saat belajar 6. “Menurut data *Joint Child Malnutrition Estimates* (UNICEF, 2018) pada tahun 2017 sebanyak 22,2% atau kurang lebih ada 150,8 juta balita di Dunia yang mengalami stunting. Negara Indonesia telah menempati urutan tertinggi ke-4 di regional Asia Tenggara/Southeast Asia Regional (SEAR) dengan prevalensi (36%) atau 8,8 juta balita 7. ” Dari batasan WHO  $< 20\%$  balita yang ada di Indonesia mengalami kejadian stunting. Data terbaru pada tahun 2022 menunjukkan angka 24,4% pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 21,6% pada tahun 2022. Prevalensi stunting di Kalimantan Tengah berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yaitu sebesar 26,9 % pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,5% dari tahun 2021 yaitu sebesar 27,4%. Berdasarkan Kabupaten dan Kota, Kabupaten Murung Raya menempati urutan pertama prevalensi stunting sebesar 40,9% 8 .

Stunting disebabkan oleh berbagai macam determinan faktor (WHO, 2015). Dalam teori

*Social determinant of Health* (SDoH), derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh faktor sosial, structural, dan individu (WHO, 2013). Faktor sosial seperti kebijakan pemerintah, keadaan politik, pertumbuhan ekonomi sedangkan faktor struktural seperti pendidikan dan pekerjaan orang tua, lingkungan tinggal, pemukiman, serta faktor individu meliputi riwayat kesehatan sebelumnya, tinggi orang tua, konsumsi, infeksi dan lain-lain. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pada negara-negara maju dengan laju pertumbuhan ekonomi yang baik, persoalan stunting sangat rendah. Demikian pula dengan faktor rumah tangga, seperti pendidikan orang tua yang tinggi dan pekerjaan yang mapan merupakan komponen fundamental untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, termasuk pada kelompok rentan serta dukungan sosial yang memadai. Sementara itu lingkungan yang sehat seperti penggunaan jamban yang memadai, kebutuhan air bersih yang terpenuhi dengan mudah, pengelolaan sampah yang hygiene, lingkungan perumahan/pemukiman yang sehat, lingkungan yang bebas polusi *Ist Prosiding Midwifery Science Session Template Ist Prosiding Midwifery Science Session* rokok dan bahan bakar masak berkaitan dengan stunting balita. Luasnya faktor determinan stunting memerlukan upaya penanganan yang holistic, terintegrasi dan berkualitas. Penanganan stunting terintegrasi dilakukan dengan memberikan intervensi sensitive dan spesifik kepada sasaran, meliputi ibu hamil, bayi, balita, kanak-kanak, remaja dan calon pengantin.

Secara umum, ada dua jenis intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah stunting, yaitu Intervensi Gizi Spesifik (berkontribusi 30 %) dan Intervensi Gizi Sensitif (berkontribusi 70 %). Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak

dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sector kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan<sup>11</sup>.

Berdasarkan faktor di atas maka peneliti bertujuan untuk menganalisis faktor terjadinya stunting dari segi intervensi spesifik maupun sensitif.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dilakukan pengambilan sampel dari populasi berisiko, pemangku jabatan serta, pihak terkait pelaksanaan penanganan stunting di Kab. Murung Raya.

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – November 2023. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kab. Murung Raya yang memiliki balita, Kepala Bappedalitbang, Ketua Tim Penggerak PKK, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Murung Raya, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya, Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Murung Raya, Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, Bidang Kelembagaan Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya, Analisis

Kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya. Informan penelitian sebagaimana diterangkan diatas dipilih berdasarkan kesesuaian (appropriateness) dan kecukupan (adequacy)<sup>12</sup>.

### Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil data kuantitatif selanjutnya akan dilakukan proses editing, coding, entry data dan cleaning data. Data yang diperoleh secara kualitatif dilakukan triangulasi sumber, triangulasi analisis dan triangulasi data<sup>13</sup>.

### Analisis Data

Data kuantitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif, Analisis deskriptif digunakan dalam penyajian data, ukuran data, ukuran sentral dan ukuran penyebaran, menggunakan bantuan perangkat Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 20.

Sedangkan langkah analisis data kuantitatif yaitu deskripsi informan, expanded field notes / transcript, organisasi data, kategorisasi data, meringkas data kedalam matriks serta menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Murung Raya adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak diprovinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Puruk Cahu. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Barito Utara pada tahun 2002 dengan luas wilayah 23.700 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 115.239 jiwa, pada pertengahan tahun 2023. Semboyan kabupaten ini adalah “Tira Tangka Balang”.

Secara geografis, Kabupaten Murung Raya terletak di 0°47” Lintang Utara – 0°51” Lintang Selatan

dan 113°12”–115°08” Bujur Timur<sup>11</sup>.

Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten paling utara di Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini yakni Puruk Cahu berjarak sekira 403 Kilometer dari Kota Palangka raya melalui Kabupaten Barito Utara.

### Analisis data Kuantitatif

Terdapat 3 Desa dengan angka kejadian stunting tertinggi di Kab. Murung Raya Yaitu Desa Makunjung, Desa Tumbang Lahung dan Desa Mangkahui. Penyajian data berikut merupakan data yang diperoleh dari ketiga desa :

Tabel 1. Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Status Gizi Bayi Dan Balita berdasarkan TB/U) kejadian stunting 2023

EPPGBM Status Gizi Bayi Dan Balita berdasarkan TB/U) kejadian stunting 2023	Makunjung	Tumbang Lahung	Mangkahui
Januari	128	77	125
Februari	111	167	116
Maret	142	155	104
April	123	118	98
Mei	128	117	97
Juni	145	105	103
Juli	139	115	110

Berdasarkan tabel 1 didapatkan hasil yaitu fluktuasi angka kejadian stunting , pada puskesmas makunjung bulan Januari sebanyak 128 bayi balita dan bulan desember menjadi 139 bayi balita; pada puskesmas tumbang lahung bulan januari 77 bayi balita dan bulan desember 115 bayi balita; pada puskesmas Mangkahui bulan januari 125 bayi balita dan bulan desember 110 bayi balita stunting berdasarkan TB/U.



Grafik 1. Persentase Kejadian Stunting se-Kabupaten Murung Raya berdasarkan real time data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM)



Berdasarkan Grafik 1 didapatkan hasil yaitu pada bulan Januari 2023 persentase kejadian stunting sebesar 21,2% terdapat penurunan persentase stunting pada real time bulan Juli 2023 yaitu sebesar 17%.

Tabel 2. Gambaran Target dan Capaian Intervensi Spesifik Percepatan Penurunan Stunting Kab. Murung Raya

Kategori	2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian TW III
Skrining anemia		8,27%	70%	9,6%
TTD rematri	54%	78,65%	50%	9,6%
ANC Bumil	60%	61,14%	80%	30,3%
TTD Bumil	82%	53,12%	80%	78,1%
PMT Bumil KEK	80%	100%	87%	37%
Timbang Balita	75%	53,92%	85%	74,7%
ASI eksklusif	50%	2%	75%	13,7%
PMT Gizi Kurang	85%	79,4%	85%	65,3%
Desa bebas BABS	80%	5,65%	80%	5,65%

\*TTD : tablet tambah darah; rematri : remaja putri; ANC : antenatal care; Bumil : ibu hamil; PMT : pemberian makanan tambahan; ASI : air susu ibu; KEK : kekurangan eneri kronis; BABS: buang air besar sembarangan

Berdasarkan tabel 2 didapatkan hasil yaitu terdapat beberapa target yang tidak tercapai antara lain pada tahun 2022 skrining anemia, TTD Ibu hamil, penimbangan balita, ASI eksklusif, PMT gizi kurang, desa bebas BABS. Pada tahun 2023 sedang berjalan terdapat beberapa target yang tidak tercapai yaitu skrining anemia, TTD remaja putri, ANC ibu hamil, TTD Ibu hamil, PMT Ibu hamil KEK, Timbang balita, ASI eksklusif, PMT Gizi kurang dan desa bebas BABS.

### Analisis data Kualitatif

Untuk data kualitatif peneliti menggunakan instrumen dengan .. point pertanyaan :

(1) “Apakah di Kabupaten Murung Raya sudah dibentuk tim percepatan penanggulangan stunting sesuai **Peraturan Presiden Nomor 72** Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi angka stunting di Indonesia?”

Terungkap dalam pernyataan responden sebagai berikut :

*“posisi di dinas kesehatan untuk percepatan penurunan stunting yaitu di intervensi spesifik dan sensitif sebagai koordinator, posisi di Dinas kesehatan”*

*“peran dinas perikanan dalam penanganan stunting secara tidak langsung, intervensi secara sensitif melalui bantuan hibah peternakan, perikanan dan pertanian , pembagian bantuan pada kelompok tani, ada juga melakukan pelatihan pemanfaat pekarangan, sasarannya kelompok wanita tani, dan bapak asuh stunting. Ada 3 org balita keluarga stunting di daerah batu mangkap.*

*Bantuan pakan ikan, bibit ikan, bibit ayam , bibit sapi. Hanya penyampaian bantuan saja. Cakupannya masih umum”*

*“perang bidang cipta karya kita dari dinas cipta karya penanganan stunting fokus ke sarana air bersih dan sanitasi, sudah dilaksanakan tahun ini pada 3 desa lokus stunting, sanitasi sudah membuat prototipe terkait sanitasi layak, berupa pembangun septiktank individual lengkap dengan bilik Wc fungsional, tahun ini ada 5 desa yang dilaksanakan dengan anggaran tahun ini memperoleh 9 unit pembangunan sanitasi layak.*

*“dari dinas PU mendapat SK Lokus Stunting beberapa desa, melihat situasi lapangan, misal di lokus stunting sudah ada sarana air bersih makan yang di intervensi adalah sanitasi nya, air bersih akan lebih dahulu dilakukan, karena sanitasi akan menyusul setelah ada sarana air bersih.”*

*“untuk terkait stunting, kita memang 2023 baru mulai fokus, 2022 itu kita memang belum terlibat secara ini, 2023 baru fokus, sebelumnya ada SK Stunting tapi terkait perencanaan dari dinas PU, dari sekian desa itu hanya beberapa desa yang kebetulan jadi lokus stunting, tapi 2023 sudah terima SK baru dipelajari.”*

*“dinas penanganan fakir miskin , terimakasih ijin sudah melakukan bantuan program stunting ini melalui program pemerintah daerah kartu rakyat sejahtera , 500rb / 3 bulan untuk anak stunting, tidak double karna akan di cek balik. Bantuan uang tunai dilihat dari keadaan ekonominya, banyak di daerah pedalaman Diberikan melalui rekening bank kalteng peruntukkan nya untuk membeli makanan bergizi, base data penyaluran diberikan dari*

*disdaldud dan dinas kesehatan.”*

*“untuk dinas pertanahan, kita masuk di intervensi spesifik dan sensitif, dinas ketahanan pangan tahun 2022 lokus desa stunting itu kita ada program P2L menyoar kelompok wanita tani, thn 2022 itu untuk yang tahun pertama itu berikan dana ke rekening kelompok wanita tani Rp. 60 jt, tahap ke 2 , 15 jt sudah masuk ke rekening , kemudian kasih protein hewani, itik petelur ke 2 desa. Untuk program ini krn badan pangan nasional sudah berdiri sendiri , sehingga program ini di kementerian pertanian. Terus di tahun 2023 ada program diversifikasi ketahanan pangan, memebria natura kornet, sosis dan susu. Masuk program ini baru 1 tahun, nama program nya berubah ubah, nama program 2021 P2L, sasarannya belum ke stunting, tahun ini sudah menyoar ke stunting. Ada program tapi masih belum dilaksanakan , yaitu super food daun kelor”*

“Apakah tim Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Murung Raya yang sudah dibentuk? Kapan?”

*“sk penanggulangan stunting ada yaitu keputusan Bupati Murung Raya nomor 188.45/71/2022 tentang tim aksi percepatan penanggulangan stunting Kabupaten Murung Raya tanggal 12 Januari 2022”*

Apakah tugas yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditindak lanjutkan oleh pimpinan OPD dengan membuat Perencanaan, Pelaksanakan serta Monitoring & Evaluasi program dan kegiatan kerja?

*“PUPR : monev nya untuk air bersih ada musrenbang pihak desa akan mengusulkan air bersih maupun infrastrur lainnya yang menjadi usulan dari desa, terkait pembangunan di lokus stunting maupun*

bukan .kecenderungan masyarakat karena belum teraliri listrik jadi sumber air dari anak sungai,kualitas airnya bersih. Membendung anak sungai kemudian alirkan menggunakan pipa ke pedesaan. Monev diserahkan ke pihak desa, diserahkan ke pihak desa. Tidak ada anggaran operasional untuk monev. Kualitas air kordinasi dengan dinas kesehatan.”

“Dinas kesehatan : kontinyu mengecek fisiknya air, ada khusus pemeriksaan setiap 3 bulan sekali. Air bersih 51% di Murung Raya, jamban sehat 40%.”

Apa saja program kerja intervensi Spesifik dan Sensitif dari OPD?apakah dana desa digunakan untuk penanggulangan stunting (Dana Desa 20 %)? Apa saja kegiatan/upaya yang dilaksanakan untuk penggunaan dana tersebut?

“Dinkes : program unggulan untuk penurunan stunting adalah TTD untuk remaja putri, ibu hamil, 1000 HPK selalu dilakukan intervensi intervensi. Untuk pasca 1000 HPK – PMT dalam bentuk bubuk (bahan lokal), anggaran di puskesmas. Dari pihak swasta (adaro) bantu PMT.

2023 turun lapangan dengan dr spesialis anak dan spesialis kandungan, pemberian PMT apakah ada juknisnya? Ada”

“Intervensi spesifik : ASI Eksklusif (2022 kab mura capaian dibawah target nasional bawah 58% yaitu 50%); TTD remaja putri masing masing puskesmas ada inovasi, PMT dan susu untuk Bumil KEK dan menyusui dan balita (PMT kerja sama dgn desa) PMT diberikan setiap hari 2023 ada PMT lokal 4- 8 mgu lakukan monev.”

“dinas ketahanan pangan(bidang p2l) pendistribusian perda nya belum ada, (urgensinya), “

Bagaimana pengelolaan dana kegiatan penurunan stunting di Kab Murung Raya?/OPD

Bidang cipta karya monev : PUPR : pembangunan sarana air bersih ada tinjau lapangan terkait sumbernya karena akan mempengaruhi sisi penganggaran dana desa ada untuk intervensi sensitif. Jika perlu rehab maka menggunakan data tsb.

Bidang fakir miskin : tergantung anggaran juga, upayanya di dinas sosial hanya KMS saja, ada bantuan dari pusat

Dinas pertanian : hanya ke kelompok wanita tani (tidak ke rumah tangga). -> penyuluh pertanian. (monev kepada penyuluh)

Bidang konsumsi : monev keg P2L sasaran kel wanita tani tahun ke 3 (2024), caranya kasih dana ½ lihat kinerjanya/perkembangannya. Tahun 3 nanti mandiri (tidak ada bantuan).

Sudah terlihat ada peningkatan dana penurunan stunting

Apakah saran tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya agar angka stunting di Kab Murung Raya tahun 2022 sebesar 40,9 % dapat mengalami penurunan?Target Pemda Prov Kalteng tahun 2024, prevalensi stunting di Kalteng 14 %,Target Pemda Murung Raya menurun menjadi ...

Harapannya 20% bisa turun stunting, terakhir data eppgbm 17% (data kegiatan setiap bulan/real time) Harapan Dinkes dibawah 20%

Berdasarkan beberapa kategori yang telah disampaikan peneliti akan membahas sebagai berikut :

**Skrining anemia dan pemberian TTD untuk remaja putri** sebagai pencegahan stunting, perkembangan saat remaja sangat menentukan kualitas seseorang menjadi dewasa. Permasalahan gizi pada masa remaja putri akan meningkatkan

kerentanan penyakit pada usia dewasa bahkan berisiko melahirkan generasi yang bermasalah gizi. Anemia pada masa remaja akan menyebabkan timbulnya masalah kesehatan seperti penyakit tidak menular, produktivitas dan prestasi menurun, termasuk masalah kesuburan.

Remaja putri yang menderita anemia berisiko menjadi wanita usia subur yang anemia selanjutnya menjadi ibu hamil anemia, bahkan juga mengalami kurang energi protein. Ini meningkatkan kemungkinan melahirkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dan stunting, komplikasi saat melahirkan serta beberapa risiko terkait kehamilan lainnya. Oleh karena itu untuk mencegahnya didapat diberikan melalui Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri.

**Pemeriksaan Antenatal Care sebagai pencegahan stunting.** Pemeriksaan ANC sangat perlu dilakukan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesehatan mental, fisik ibu maupun bayi. Manfaat ANC khususnya untuk ibu adalah supaya ibu mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Frekuensi pemeriksaan ANC minimal 4 kali selama periode hamil. Ibu yang tidak melakukan kunjungan ANC tidak standar memiliki risiko bayi yang dilahirkan mengalami stunting sebesar 2,4 x dibandingkan dengan ibu yang melakukan kunjungan ANC. Dengan dilakukannya kunjungan ANC selama kehamilan secara teratur maka dapat dideteksi secara dini risiko kehamilan terutama yang berkaitan dengan masalah nutrisi.

**Pemberian TTD pada ibu hamil** untuk mencegah anak lahir stunting. Pencegahan anemia gizi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan minimal 90 tablet tambah darah selama kehamilan dan dimulai sedini mungkin dengan teknis pemberian 10 butir setiap bulan kunjungan pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil merupakan

kelompok rentan, memiliki risiko tinggi mengalami anemia. Anemia akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit. Penyakit yang ditimbulkan tersebut memiliki efek jangka panjang terhadap kualitas generasi yang dilahirkan seperti stunting<sup>17</sup>.

**Pemberian makanan tambahan pada ibu KEK.** Faktor dari orang tua yang menjadi penyebab stunting dilihat pada kondisi ibu saat hamil yaitu ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) yang menggambarkan Kurang Energi Kronik (KEK). Ibu yang menderita KEK berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah (<2500 gram)<sup>18</sup>. Berat badan lahir rendah (BBLR) mempunyai risiko lebih besar untuk menjadikan anak stunting dibandingkan bayi yang dilahirkan dengan berat badan normal ( $\geq 2500$  gram). Status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bila status gizi ibu normal pada masa sebelum dan selama hamil kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan normal, dengan kata lain kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil<sup>19</sup>. PMT adalah suplementasi gizi berupa biskuit lapis yang dibuat dengan formulasi khusus dan dipertifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada ibu hamil dengan kategori Kurang Energi Kronik (KEK) untuk mencukupi kebutuhan gizi. Pada kehamilan trimester I ibu hamil diberikan 2 keping biskuit lapis per hari dan pada ibu hamil trimester II dan III akan diberikan 3 keping biskuit lapis perhari. Selanjutnya dilakukan pemantauan apakah ada penambahan berat badan dan lila sesuai dengan standar penambahan berat badan atau lila pada ibu hamil.

**Penimbangan balita untuk pencegahan stunting.** Masa balita adalah masa yang sangat penting dalam upaya menciptakan sumber daya

manusia yang berkualitas. Masa balita merupakan golden age (periode keemasan) yaitu periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia, perkembangan dan pertumbuhan dimasa itu menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya. Pemantauan pertumbuhan balita sangat penting dilakukan untuk mengetahui adanya hambatan pertumbuhan (*growth faltering*) secara dini. Penimbangan setiap bulan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui hal tersebut<sup>21</sup>. Pertumbuhan dan perkembangan pada balita dapat dipantau melalui penimbangan berat badan anak setiap bulan, dimana penimbangan balita dapat dilakukan di berbagai tempat seperti posyandu, polindes, puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan yang lain. Kegiatan penimbangan merupakan salah satu kegiatan utama posyandu dan sebagai salah satu program perbaikan gizi masyarakat. Penimbangan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhannya setiap bulan. Penimbangan balita penting dilakukan setiap satu bulan sampai lima tahun di posyandu untuk mengetahui tumbuh kembang balita. Diketahui ada hubungan antara keaktifan kunjungan posyandu dengan penimbangan balita dengan kejadian stunting.

#### **ASI eksklusif dengan kejadian stunting.**

Menurut Unicef Framework faktor penyebab stunting pada balita salah satunya yaitu asupan makanan yang tidak seimbang. Asupan makanan yang tidak seimbang termasuk dalam pemberian ASI eksklusif yang tidak diberikan selama 6 bulan. Manfaat ASI eksklusif bagi bayi antara lain sebagai nutrisi lengkap, meningkatkan daya tubuh, meningkatkan kecerdasan mental dan emosional yang stabil serta spiritual yang matang diikuti perkembangan sosial yang baik, mudah dicerna dan diserap, memiliki komposisi lemak, karbohidrat, kalori, protein dan vitamin, perlindungan penyakit infeksi, perlindungan alergi karena didalam ASI

mengandung antibodi, memberikan rangsang intelegensi dan saraf, meningkatkan kesehatan dan kepandaian secara optimal. Stunting dapat terjadi sebagai akibat kekurangan gizi terutama pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)<sup>23</sup>. Buruknya gizi selama kehamilan, masa pertumbuhan dan masa awal kehidupan anak dapat menyebabkan anak menjadi stunting. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menyebabkan terjadinya masalah kesehatan pada balita.

**Pemberian Makanan Tambahan pada gizi kurang.** Status gizi yang kurang dapat mempengaruhi keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan balita. Apabila balita mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan dapat menurunkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, pemerintah terus menggalangkan dana terkait permasalahan gizi kurang yang ada di Indonesia melalui Pemberian Makanan Makanan Tambahan (PMT) biskuit balita usia 6–59 bulan.

#### **BAB sembarangan dengan stunting.**

Hal ini berkaitan dengan sanitasi lingkungan. BAB sembarangan dapat berpengaruh pada asupan nutrisi yang tidak optimal. Berdasarkan data Kemenkes, pada tahun 2019 akses sanitasi baru 78% dari sekitar 65 juta kepala keluarga di Indonesia. Artinya masih ada 15 juta KK yang masih melakukan perilaku BAB sembarangan di tempat terbuka. jamban dengan septic tank yang tidak disedot secara rutin dengan baik memungkinkan terjadinya kebocoran yang mencemari air tanah. Ketika ibu hamil atau anak pada periode emas pertumbuhannya mengonsumsi atau membersihkan diri dengan air tanah yang tercemar kotoran manusia tersebut, maka risiko terkena stunting sangat besar. Risiko terkena stunting ini didapatkan saat mereka mulai

mengalami gangguan pencernaan berkepanjangan, di antaranya; diare kronis, tifus, cacingan hingga hepatitis. Tinja atau kotoran manusia merupakan media berkembangnya bibit penyakit menular, salah satunya cacing. Infeksi cacing (cacingan) berhubungan erat dengan perilaku buang air besar sembarangan. Kotoran akibat BAB sembarangan yang berada di lingkungan terbuka adalah lahan subur perkembangbiakan cacing. Umumnya telur cacing bertahan di lingkungan yang lembab, kemudian berkembang menjadi telur infeksi.

Telur cacing infeksi yang ada di tanah dapat tertelan masuk ke dalam pencernaan anak. Biasanya anak-anak yang bermain tanah dan tidak langsung mencuci tangan memiliki risiko yang besar terinfeksi cacing. Jika cacing berkembangbiak pada tubuh si kecil pada periode emas pertumbuhan anak akan menempel pada usus dan menyerap zat-zat nutrisi pada tubuhnya. Jika kondisi ini terus menerus dibiarkan, balita akan mengalami kekurangan gizi yang dapat membuat anak terkena stunting.

### KESIMPULAN

1. Fokus program untuk menurunkan stunting yaitu skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah (TTD), pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambahan darah (TTD), pemberian makanan tambahan bagi ibu KEK, pemantauan tumbuh kembang, ASI eksklusif, PMT dan desa tidak BAB sembarang
2. Penurunan persentase stunting Kab. Murung Raya berdasarkan data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) mencapai 17%
3. Desa di Kab. Murung Raya dengan angka stunting tertinggi yaitu Makunjung, Tumbang Lahung dan Mangkahui
4. Di Kabupaten Murung Raya sudah Dibentuk

tim Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan SK penanggulangan stunting ada yaitu keputusan Bupati Murung Raya nomor 188.45/71/2022 tentang tim aksi percepatan penanggulangan stunting Kabupaten Murung Raya tanggal 12 Januari 2022”

5. Program kerja setiap instansi untuk penurunan stunting sudah ada
6. harapan OPD di Murung Raya penurunan stunting bisa sebesar 20%.

### SARAN

1. Mengembangkan inisiatif inovasi program – program lainnya dalam rangka penurunan angka stunting
2. Monev yang terencana untuk mengetahui efektif kinerja OPD dalam tim percepatan penganggulangan stunting.
3. Untuk mengatasi masalah masalah gizi lainnya di wilayah kerja Puskesmas Mangkahui, diperlukan rekomendasi penambahan atau penerapan ahli gizi atau ahli gizi
4. Pemberian Makanan Tambahan sesuai dengan standar gizi
5. Setiap desa mungkin ada permasalahan stunting yang berbeda beda , oleh karena itu penanganannya pun diharapkan tepat
6. Pencegahan masalah gizi bisa dimulai dari posyandu
7. surveilans gizi melalui Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM)
8. kualitas Sumberdaya dalam pelaksanaan intervensi Spesifik, baik tenaga maupun alat
9. Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk intervensi sensitif, terutama dalam penyediaan

sarana dan prasarana kesehatan

### DAFTAR PUSTAKA

1. Permenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Jakarta; 2020.
2. Risnanto. STUDI DESKRIPTIF KEJADIAN STUNTING PADA BALITA. JITK Bhamada. 2023;14(1)file:///C:/Users/USER/Downloads/483-Article%20Text-1116-1-10-20230430.pdf.
3. Vivin Wijiastutik IS. PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA DAN PENYULUHAN MPASI UNTUK CEGAH STUNTING. JURNAL PARADIGMA.4(2) file:///C:/Users/USER/Downloads/704-Article%20Text-1766-1-10-20221031%20(1).pdf.
4. Faiqoh R.B. SS, Kartini A. . Hubungan Ketahanan Pangan Keluarga dan Tingkat Kecukupan zat Gizi dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan di Daerah Pesisir (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Bandarharjo Kota Semarang). Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2018;6(5).
5. R. M. Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu Balita terhadap Stunting di Kecamatan Kuta Baro. Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. 2021;8(1).
6. Rokom. Ini Penyebab Stunting pada Anak Jakarta2018 [
7. Dian Rahmi R, Triyana Harlia Putri. STUDY FENOMENOLOGI PENGALAMAN KELUARGA MENGASUHANAKSTUNTING DI KABUPATEN SIJUNJUNG. Menara Ilmu.17(1).
8. Rokom. Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4% Rokom 2023 [
9. Siswati T. INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK UNTUK MENCAPAI MERDEKA STUNTING DI KAB BANTUL, YOGYAKARTA, INDONESIA. 1st Prosiding Midwifery Science Session. 2020.
10. Ilham Nur Hanifan Maulana QS, Wike. Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) 2022;8(2).
11. BAPPENAS. Cegah Stunting itu Penting Intervensi Spesifik dan Sensitif 2020 [
12. Heryana A. INFORMAN DAN PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF. 1. 2017;1.
13. Rahardjo M. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif Jakarta2010 [
14. Kusniyati Utami HY, Melati Inayati Albayani. SCREENING ANEMIA, STATUS GIZI DAN ASUPAN NUTRISI REMAJA PUTRI. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri). 2022;6(6).
15. Ian Darnton-Hill UCM. Micronutrients in Pregnancy in Low- and Middle-Income Countries. nutrients. 2015;7(7).
16. Gian Septhayudi RJS, Haerawati Idris. PELAYANAN ANTENATAL CARE DALAM KEJADIAN STUNTING. Jurnal Kesehatan. 2022;13(1).
17. Sukmawati, Lilis Mamuroh. pengaruh Edukasi Pencegahan dan Penanganan Anemia Terhadap Pengeahuan dan Sikap Ibu Hamil. Jurnal Keperawatan BSI. 2019;7(1).
18. Nilfar Ruaida OS. HUBUNGAN STATUS KEK IBU HAMIL DAN BBLR DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA

DI PUSKESMAS TAWIRI KOTA AMBON  
Jurnal Poltekkes Maluku. 2018;9(2).

19. Gabrielisa Winowatan NSHM, Maureen I. Punuh. HUBUNGAN ANTARA BERAT BADAN LAHIR ANAK DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BATITADIWILAYAHKERJAPUSKESMAS SONDER KABUPATEN MINAHASA. Jurnal Univeristas Sam Ratulangi. 2023;1(1).
20. Fitri Juliasari EFA. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN IBU HAMIL KEK. Jurnal Maternitas Aisyah (JAMAN AISYAH) Universitas Aisyah Pringsewu. 2023;1(1).
21. Zuhropal Hadi AZA, Asrinawaty. Kejadian Stunting Balita ditinjau dari Aspek Kunjungan Posyandu dan Perilaku Pemberian ASI Eksklusif Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi (JABJ. 2022;11(1).
22. Theresia D. HUBUNGAN JUMLAH KUNJUNGAN IBU KE POSYANDU DENGAN STATUS GIZI BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS AMPLAS Jurnal Keperawatan Priority. 2020;3(2).
23. Sr. Anita Sampe RCT, Monica Anung Madi. Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada. 2018;11(1).
24. Rumlah S. MASALAH SOSIAL DAN SOLUSI DALAM MENGHADAPI FENOMENA STUNTING PADA ANAK. Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi. 2022;1(3).
25. Lely Khulafa'ur Rosidah SH. HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN PERKEMBANGAN BALITA USIA 1-3 TAHUN (Di Posyandu Jaan Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk). Jurnal Kebidanan Dharma Husada Kediri. 2017;6(2).
26. Amrul Hasan HK, Agus Sutopo. Air Minum, Sanitasi, dan Hygiene sebagai Faktor Risiko Stunting di Wilayah Pedesaan. Jurnal Kesehatan. 2022;13(2).
27. Sibuea CV. PENYULUHAN PENYAKIT KECACINGAN ASCARIASIS KEPADA MASYARAKAT DESA NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG. PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat 2022;3(1).





# **KAJIAN PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DI DESA KUBU KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Oleh :

**Prof. Dr. Sulmin Gumiri, M.Sc.**

**Dr. Ir. Hj. Masliani, M.P**

**Hendrik Segah, S.Hut., M.Si., Ph.D., IPU**

## **RINGKASAN**

Hutan mangrove adalah suatu formasi hutan yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut dengan kondisi tanah yang anaerobik. Fungsi dan manfaat dari hutan mangrove antara lain sebagai pelindung garis pantai, habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, penyimpan karbon, sumber makanan dan bahan bakar, penyerap polutan dan juga sebagai sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan mangrove. Di Kalimantan Tengah, mangrove dapat ditemukan di hampir semua kabupaten yang memiliki wilayah pesisir, mulai dari Kabupaten Sukamara di wilayah paling barat sampai ke Kabupaten Kapuas di wilayah paling timur. Secara umum, kondisi hutan mangrove di Kalimantan Tengah saat ini adalah sekitar 67% dalam kondisi baik, 25% kondisi sedang, dan 7% dalam kondisi rusak. Meskipun secara keseluruhan masih dalam kondisi yang relatif baik, di beberapa Desa Pesisir Kalimantan Tengah seperti Desa Kubu di Kecamatan Kumai Kotawaringin Barat, hutan mangrove mengalami tekanan degradasi yang cukup tinggi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk: (1) Mengetahui kondisi existing hutan mangrove di Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, dan (2) Menganalisis strategi pengelolaan hutan mangrove di Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Desa Kubu terletak di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dan merupakan desa pertama yang dapat diakses untuk menuju desa-desa peisir lain yang ada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena infrasturuktur jalannya yang sudah beraspal mulus, Desa Kubu dapat diakses dengan mudah dari Kota Pangkalan Bun sebagai Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Barat dengan waktu tempuh kurang dari 1 jam, dan hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit saja jika diakses dari Kota Kumai yang merupakan pelabuhan samudera terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah.

Akibat perkembangan pemukiman penduduk dan kegiatan usaha perikanan pantai di Desa Kubu, hutan mangrove di desa ini mengalami tekanan degradasi yang cukup tinggi. Secara spasial, citra satelit menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tutupan hutan mangrove di Desa ini terus mengalami pengurangan dan hanya tersisa sekitar 50% saat ini. Meskipun demikian, ekosistem hutan mangrove yang tersisa masih relatif alami sehingga fungsi dan manfaat serta potensi pengembangannya menjadi tantangan untuk merumuskan strategi bagaimana menjaga kelestarian hutan mangrove di Desa Kubu di masa yang akan datang.

Strategi pengelolaan untuk melestarikan

hutan mangrove di Desa Kubu dirumuskan dengan pertimbangan utama berupa mempertahankan fungsi dan manfaat hutan mangrove serta merancang business plan untuk menjadikan hutan mangrove yang tersisa sebagai penggerak utama untuk memajukan perekonomian masyarakat di Desa Kubu. Strategi pelestarian ini meliputi: (1) Lakukan FGD penyusunan zonasi pemanfaatan ruang di pesisir pantai Desa Kubu; (2) Pertahankan tegakan mangrove yang ada, lakukan konservasi untuk menambah tegakan dengan berdasarkan kepada zonasi yang telah disusun; (3) Identifikasi stakeholder, laksanakan FGD untuk membangun komitmen dan menyusun business plan pemanfaatan hutan mangrove di Desa Kubu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat; (4) Bangun dan berdayakan BUMDES untuk mengimplementasikan business plan pemanfaatan mangrove di Desa Kubu; dan (5) Bangun kerjasama antara BUMDES dengan multipihak untuk membangkitkan perekonomian desa berbasis wisata hutan mangrove di Pantai Desa Kubu.

## PENDAHULUAN

Keberadaan hutan mangrove ternyata tidak kecil fungsi dan manfaatnya. Ia merupakan habitat berbagai jenis satwa. Lebih dari seratus spesies burung bergantung padanya. Daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan mangrove merupakan tempat bermigrasi ribuan burung termasuk blekok asia (*Limno-drumus semipalmatus*) yang langka itu (Bosstua.wordpress.com, 2016).

Hutan mangrove juga perlu ada karena ia merupakan pelindung dari serbuan bencana alam. Vegetasi yang terdapat di dalam hutan mangrove dapat memproteksi bangunan dan tanaman pertanian dari kerusakan akibat terjangan badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi. Selain itu, sifat fisik tanaman hutan mangrove membantu proses pengendapan lumpur

yang dapat menghilangkan racun dan unsur hara air. Kualitas air laut pun terjaga dari endapan lumpur erosi.

Hutan mangrove merupakan sumber plasma nutfah dari kehidupan liar yang bermanfaat besar terhadap perbaikan jenis-jenis satwa komersial ataupun untuk memelihara populasi kehidupan liar itu sendiri. Hutan mangrove juga memiliki nilai estetika alam dan kehidupan yang ada di dalamnya untuk menjadi objek wisata. Karakteristik hutannya yang merupakan peralihan antara darat dan laut memiliki keunikan dalam beberapa hal.

Hutan mangrove berperan sangat penting dalam mendukung proses ekologis, geomorfologis, atau geologis. Ia mengandung sejumlah besar bahan organik yang tidak membusuk, lebih berfungsi sebagai penyerap karbon. Di samping itu, hutan mangrove dapat menjaga kelembapan dan curah hujan di kawasanannya. Dengan demikian, keseimbangan iklim makro dapat relatif terjaga. Serta, keberadaannya dapat mencegah oksidasi lapisan pirit dan perkembangan tanah sulfat masam.

Di Kalimantan Tengah, mangrove dapat ditemukan di hampir semua kabupaten yang memiliki wilayah pesisir, mulai dari Kabupaten Sukamara di wilayah paling barat sampai ke Kabupaten Kapuas di wilayah paling timur. Di Kabupaten Sukamara mangrove terdapat mulai pantai di sebelah barat Sungai Jelai sampai Desa Sungai Pasir. Sebelah timur sungai Jelai juga didominasi hutan mangrove sampai Desa Sungai Pundung. Secara umum jenis mangrove yang dominan adalah jenis Api-api, Bakau, Nipah, Cemara laut dan Rambai. Secara umum dari hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa hutan mangrove di wilayah pesisir Kalimantan Tengah termasuk hutan mangrove yang memiliki zonasi sederhana (zonasi campuran). Hal ini

disebabkan komunitas tumbuhan yang dijumpai tidak membentuk tegakan murni dan zonasi yang jelas. Kondisi mangrove yang tersebar dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu sangat padat, sedang (baik) dan jarang (rusak).

Hutan mangrove di pesisir Kotawaringin Barat memiliki sebaran yang terbatas hanya pada dua kecamatan yaitu Kumai dan Arut Selatan dengan luas masing-masing 6068,4 ha dan 725,4 ha. Di Kecamatan Kumai, hutan mangrove ditemukan di sepanjang Sungai Kumai, Sungai Sekonyer, Teluk Pulai, Muara Sungai Arut, Sungai Baru, Sungai Cabang Timur, Tanjung Puting, Desa Kubu, Tanjung Keluang, Tanjung Pandan, Sungai Bakau, Teluk Bogam, Tanjung Penghujan, Desa Keraya dan Desa Sebuai. Sedangkan di Kecamatan Arut Selatan meliputi Tanjung Krasak, Pulau Samudra dan Tanjung Putri. Sementara itu, luas mangrove di Desa Teluk Bogam sepanjang  $\pm 1,5$  km dari luas daerah 82 km<sup>2</sup>, sedangkan di Desa Sungai Bakau sepanjang 3,5 km dari luas daerah yang mencapai 111 km<sup>2</sup>. Hutan mangrove di pesisir Seruyan memiliki penyebaran yang terbatas hanya pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Seruyan Hilir. Sebagai gambaran di Kabupaten Kotawaringin Barat kondisi mangrove yang memiliki kerapatan jarang terdapat pada daerah Teluk Pulai, Muara Sungai

Arut, Sungai Cabang Timur, Tanjung Puting, Desa Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam, Tanjung Penghujan, Desa Keraya dan Desa Sebuai. Kondisi kerapatan sedang meliputi daerah Sungai Baru, sebagian daerah Sungai Bakau, Tanjung Krasak, Pulau Samudra dan Tanjung Putri sedangkan kondisi sangat rapat ditemui pada daerah sepanjang Sungai Kumai, Sungai Sekonyer, Tanjung Keluang dan Tanjung Pandan. Kondisi hutan yang berada di sepanjang muara Sungai Kumai dalam keadaan yang relatif baik, hal ini dilihat secara fisiognomis seperti

keragaman tumbuhan penyusun hutan dengan life form/habitus yang beragam, selain itu struktur tegakan yang masih baik dengan penyebaran individu yang cukup merata. Kondisi yang relatif baik juga digambarkan dari parameter kuantitatif seperti kerapatan yang tinggi untuk tumbuhan tingkat permudaan (tingkat semai dan pancang).

Hutan mangrove yang ada di daerah pesisir di wilayah Desa Kubu, Sungai Bakau dan Teluk Bogam relatif kurang baik dibandingkan dengan hutan di muara Sungai Kumai. Hal ini disebabkan secara fisiognomi struktur tegakan yang kurang baik dan parameter kuantitatif (kerapatan) yang jarang. Kondisi mangrove ini juga dipengaruhi oleh adanya pembukaan tambak, tempat wisata dan penebangan mangrove itu sendiri yang kayunya dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembukaan tambak terjadi di sekitar dekat Sungai Sekonyer, Sungai Cabang Timur/Tanjung Puting, Sungai Bakau dan Tanjung Putri. Adanya dan berkembangnya tempat disepanjang pantai desa Kubu, sementara untuk penebangan pohon mangrove lebih banyak dilakukan pada daerah Sungai Cabang Timur/Tanjung Puting dan Sungai Bakau.

Berdasarkan deretan sebagai nilai fungsi dan manfaat keberadaan hutan mangrove di atas dan dalam upaya perbaikan dan pelestarian hutan mangrove khususnya di Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat maka diperlukan kajian pelestarian hutan mangrove yang melibatkan masyarakat, terutama yang berdomisili di sekitar wilayah pesisir.

## **METODOLOGI**

Kajian dilaksanakan antara bulan Agustus sampai dengan Nopember 2023. Metode yang diterapkan selama kajian yang paling utama adalah observasi langsung di lapangan. Dari metode ini didapatkan hasil berupa jenis-jenis hutan mangrove, kondisi fisik hutan mangrove,

jenis kerusakan dan pemanfaatan hutan mangrove. Metode kedua adalah wawancara dan pengumpulan data sekunder. Melalui metode ini didapatkan data tentang kebijakan pengelolaan hutan mangrove, tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam melestarikan hutan mangrove di Desa Kubu. Terakhir, saat kajian dilakukan juga pemindaian dengan menerbangkan drone dan analisis data satelit untuk mengetahui kondisi eksisting dan dinamika perubahan tutupan hutan mangrove di Desa Kubu.

### HASIL TEMUAN

Hutan mangrove di Desa Kubu selama 10 tahun terakhir mengalami laju pengurangan dan degradasi yang sangat cepat. Saat ini tutupan hutan mangrove hanya tersisa sekitar 50% saja dari seluruh garis pantai Desa Kubu. Penyebab dari pengurangan dan degradasi ini adalah adanya konversi lahan untuk pemukiman, perusakan mangrove untuk penambatan perahu nelayan dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas usaha di daerah pantai Desa Kubu.

Pengelolaan hutan mangrove di Desa Kubu belum dilaksanakan secara terencana dan berorientasi kepada pelestarian dan peningkatan nilai tambah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari sisi pemerintahan, dinas/instansi yang bertanggung jawab dan memiliki tupoksi untuk melaksanakan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Kotawaringin Barat juga tidak teridentifikasi dengan jelas. Pengelolaan hutan mangrove yang selama ini menjadi tupoksi Dinas Kehutanan, sekarang menjadi tidak jelas lagi karena Dinas Kehutanan di tingkat Kabupaten sudah dihapuskan dan berupa menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan tetapi tidak mencantumkan hutan mangrove di bawah yurisdiksi mereka. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas kelautan dan Perikanan juga tidak melaksanakan pengelolaan

hutan mangrove tetapi lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan pesisir secara umum saja. Di lain pihak, pengelolaan hutan mangrove yang saat ini masuk dalam tupoksi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, jangkauannya belum mencapai Kabupaten Kotawaringin Barat apalagi sampai ke tingkatan Desa seperti Desa Kubu.

Di lapangan, pengelolaan hutan mangrove yang tersisa di Desa Kubu praktis hanya dilakukan secara perorangan oleh para pemilik lahan saja. Pengelolaan secara perorangan ini cenderung tidak sinergis sehingga belum mampu untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang sangat besar dari keberadaan hutan mangrove di Desa Kubu. Karena itu diperlukan sinergisitas dan komitmen bersama yang sangat besar antar semua stakeholders untuk melestarikan hutan mangrove dan sekaligus membangkitkan potensi ekonomi hutan mangrove di Desa Kubu. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi terbesar dari keberadaan hutan mangrove di Desa Kubu adalah untuk pengembangan sektor wisata dan edukasi. Selain itu, pengikutsertaan hutan mangrove di Desa Kubu ke dalam skema perdagangan karbon juga perlu dijajaki dan diupayakan sebagai sumber income masyarakat dengan menjaga kelestarian hutan mangrove di Desa Kubu.

### IMPLEMENTASI / REKOMENDASI

Berikut adalah rekomendasi untuk pelestarian hutan mangrove di Desa Kubu:

1. Lakukan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan zonasi pemanfaatan ruang di pesisir pantai Desa Kubu
2. Pertahankan tegakan mangrove yang ada, lakukan konservasi untuk menambah tegakan

dengan berdasarkan kepada zonasi yang telah disusun

3. Identifikasi stakeholder, laksanakan FGD untuk membangun komitmen dan menyusun business plan pemanfaatan hutan mangrove di Desa Kubu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat
4. Bangun dan berdayakan BUMDES untuk mengimplementasikan business plan pemanfaatan mangrove di Desa Kubu
5. Bangun kerjasama antara BUMDES dengan multipihak untuk membangkitkan perekonomian desa berbasis wisata hutan mangrove di Pantai Desa Kubu

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2004). Teknologi Rehabilitasi Lahan Terdegrasi. Ekspos Penerapan Hasil Litbang Hutan dan Konservasi Alam (pp. 53-64). Palembang: Badan Litbang Kehutanan.
- Suparno (2008). Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai salah satu dokumen penting untuk disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. *Jurnal Mangrove*

dan Pesisir, IX (1), hal 1-8

- Huda Nurul. 2008. strategi kebijakan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung JOM FISIP Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021 Page 9 Timur Jambi. Universitas Diponogoro, Semarang.
- Kusmana C. dan Samsuri. (2009). Rehabilitasi Mangrove pada Tapak Tapak Khusus.
- Anwar, C. (2010). RPI Pengelolaan Hutan Mangrove. Jakarta: Badan Litbang Kehutanan.
- Muis. 2011. Manfaat Hutan Mangrove.From : <http://id.shvoong.com/exact-sciences/earth-sciences/2230540-manfaat-hutan-mangrove/>. Diakses pada tanggal 2 maret 2012.
- Aflaha E. 2013. Manfaat mangrove sebagai pelestarian lingkungan hidup di Desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Motu. *Jurnal GeoTadulako UNTAD* 1(2): 1-16.
- Setiawan, Wawan; Harianto, Sugeng P.; Qurniati, Rommy, 2017. Ecotourism Dvelopment to Peserve Mngrove Conservation Efort: Case Study in Margasari Village, District of East Lampung, Indonesia. *Journal Ocean Life: Vol. 1, No. 1, June 2017. Page:14-19*

## ANTISIPASI DAN KESIAPAN BUDIDAYA PADI DI KAWASAN FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH DALAM MENGHADAPI EL NINO

O l e h :

**Susilawati<sup>1</sup>, Twenty Liana<sup>1</sup> dan Retna Qomariah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Bogor KM 46, Cibinong 16911, Indonesia

<sup>2</sup> Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkular, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710, Indonesia

\* Koresponden penulis : susi\_basith@yahoo.com

### Abstrak

Melalui program Food Estate pemerintah Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan memanfaatkan lahan rawa ek PLG sejuta hektar di Kalimantan Tengah, khususnya di kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Adanya perubahan iklim berdampak pada kejadian alam diantaranya El Nino, yaitu fenomena yang mengakibatkan berkurangnya curah hujan, sehingga memicu kekeringan atau kemarau panjang yang berdampak terhadap sektor pertanian. Penelitian yang dilakukan di kawasan Food Estate desa Belanti Siam, Gadabung dan Tahai Jaya kecamatan Pandih Batu dan Maluku kabupaten Pulang Pisau dari bulan April – November 2023, bertujuan mendapatkan informasi kesiapan dan antisipasi petani di areal Food Estate terhadap El Nino, mengidentifikasi fasilitas penyediaan dan pengelolaan air untuk usahatani padi, dan mengetahui tingkat pemanfaatan teknologi dan dukungan dalam mengatasi dampak el nino di tingkat petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum petani siap dan telah mengantisipasi kejadian El Nino, yaitu dengan memajukan waktu tanam padi MT I April – September 2023. Jika tahun sebelumnya puncak tanam dilakukan bulan April – Mei, dimajukan ke Januari - Pebruari 2023. Hampir 90% petani tidak memahami istilah El Nino, namun mereka sangat mengerti dengan istilah kemarau panjang dan kekeringan, sehingga segala tindakan yang dilakukan merupakan

wujud antisipasi terhadap dampak dari El Nino. Dalam persiapan pertanaman hampir semua fasilitas yang dimiliki dimanfaatkan, seperti hand tractor, yang dapat mendorong percepatan pengolahan tanah untuk tanam, pompa air yang mendukung ketersediaan air, dll. Sebanyak 78% petani tergolong sangat produktif, sehingga keputusan menggarap lahan dan mengaplikasikan teknologi dalam menghadapi el nino, dapat dilakukan sesuai ketersediaan tenaga kerja.

### Kata kunci :

Antisipasi, lahan rawa, inovasi, perubahan iklim, petani, usahatani padi.

Adanya peringatan dini dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) kepada seluruh pemimpin negara mengenai kemungkinan buruk dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan, berupa terjadinya krisis pangan, direspon cepat oleh pemerintah Indonesia. Respon cepat tersebut antara lain dilakukan dengan upaya memperkuat cadangan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan-lahan yang luas di luar pulau Jawa, yang berpotensi dikembangkan sekaligus didorong menjadi sebuah Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk menjamin cadangan pangan nasional (Bappenas, 2023).

Lahan rawa adalah pilihan yang tepat,

mengingat jumlahnya yang sangat luas dan belum dimanfaatkan. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan rawa yang sangat luas, sehingga menjadi salah satu lokasi terpilih untuk pembangunan Food Estate. Dirancang dengan memanfaatkan lahan rawa eks Pengembangan Lahan Gambut Sejuta hektar, maka Food Estate yang merupakan kegiatan budidaya tanaman skala luas, dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern. Luas lahan yang dicanangkan untuk program ini sekitar 165.000 ha, yang terdiri 85.500 ha lahan produktif dan 79.500 ha merupakan lahan yang tidak produktif yang sudah ditinggalkan oleh petani (Kemtan 2020; 2022; Dinas TPHP Kalteng 2022).

Pada tahap awal pelaksanaan program (2020), lahan yang digarap seluas 30.000 ha, yaitu 20.000 ha di kabupaten Kapuas dan 10.000 ha di kab. Pulang Pisau, dengan komoditas utama padi (Kemtan 2022). Dukungan program berupa sarana dan prasarana produksi, seperti benih varietas unggul, pupuk, bahan organik, alsintan, dari mesin mengolah tanah, panen dan pasca panen, hingga pendukung industri hilirnya, telah dikucurkan di kawasan ini. Demikian juga dengan dukungan infrastruktur yang sangat masif perkembangannya. Jalan yang sebelumnya hanya dilalui kendaraan tertentu, kini sudah dapat dilewati berbagai transportasi, khususnya angkutan hasil panen. Semua dukungan ini diharapkan berdampak pada upaya penyediaan dan pemenuhan pangan nasional dan global, terjadinya perbaikan perekonomian daerah dan meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, mengingat kedua kabupaten tersebut merupakan daerah sentral produksi padi Kalimantan Tengah.

Dalam hal penyumbang pangan utama Kalimantan Tengah, kabupaten Kapuas dan

Pulang Pisau merupakan kabupaten teratas dalam memberikan kontribusi, dengan produksi padi pada tahun 2021 mencapai 179.660 ton dari kab. Kapuas dan sebanyak 73.179 ton dari kab. Pulang Pisau; dengan luas panen masing-masing 56.447 ha dan 24.702 ha untuk kab. Kapuas dan Pulang Pisau. Adapun pada tahun 2022 produksi padi dari kab. Kapuas sebanyak 166.510,77 ton dan 80.829,15 ton dari kab. Pulang Pisau (BPS Kalteng, 2023). Kondisi ini tentu harus dapat ditingkatkan, mengingat kedua kabupaten ini merupakan daerah sentral yang telah banyak mendapat dukungan sarana dan prasarana pertanian, khususnya yang didistribusi sebelum dan selama program Food Estate berlangsung.

Adanya perubahan iklim berdampak pada berbagai kejadian alam antara lain terjadinya El Nino, yaitu fenomena di mana Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah, mengalami pemanasan hingga di atas kondisi normal, akibatnya potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik bagian tengah meningkatkan dan curah hujan di wilayah Indonesia berkurang, sehingga memicu terjadinya kekeringan (BMKG, 2023). Kemarau yang panjang, akan berdampak pada sektor pertanian, dan berpengaruh terhadap pola tanam, waktu tanam, produksi dan kualitas hasil, bahkan jika berkepanjangan akan mengalami gagal panen (IPCC, 2001; Nurdin 2011). Menurut Angles et al (2011), dampak jangka pendek dari berkurangnya intensitas hujan atau kemarau adalah terjadinya penurunan hasil panen sekaligus mengurangi stok bahan pangan, dan penurunan pendapatan petani. Adapun dampak jangka panjangnya adalah berakhirnya profesi petani, khususnya di lahan kering.

Kemarau panjang dan kejadian El Nino bagi Kalimantan Tengah tidak hanya berdampak kepada kegiatan pertanian, namun yang lebih parah adalah terbakarnya kawasan lahan gambut

yang cukup luas. Pelaksanaan budidaya tanaman dalam rangka menekan resiko dan dampak El Nino diharapkan tidak saja untuk menjaga kestabilan produksi dan produktivitas tanaman, tetapi sekaligus mengurangi lahan-lahan gambut yang terbuka dan memicu kebakaran lahan. Untuk itu perlu dilakukan serangkaian kajian yang bertujuan untuk : a. menggali dan mendapatkan informasi kesiapan sekaligus antisipasi petani di kawasan Food Estate, dalam menghadapi El Nino yang diprediksi terjadi pada tahun 2023, b. Mengidentifikasi beberapa sarana dan fasilitas penyediaan dan pengelolaan air untuk usahatani padi, dan c. Mengetahui tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi serta dukungan dalam mengatasi dampak el nino di tingkat petani.

## METODOLOGI

### Waktu dan Tempat

Kajian antisipasi dan kesiapan budidaya padi di kawasan Food Estate dalam menghadapi El Nino, dilakukan selama 8 (delapan) bulan, yaitu dari bulan April – November 2023. Tempat penelitian di kawasan Food Estate desa Belanti Siam dan Gadabung kecamatan Pandih Batu, dan desa Tahai Jaya kecamatan Maliku, kabupaten Pulang Pisau, yang ditentukan secara purposive dengan pertimbangan: (a) daerah kajian mempunyai struktur sosial ekonomi yang relatif kompleks, (b) merupakan daerah sentral produksi padi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kalimantan Tengah, dan (c) merupakan daerah pelaksana program Food Estate Kalimantan Tengah yang sudah memperoleh bantuan inovasi dan teknologi selama program Food Estate berlangsung.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari 100 responden dari lokasi

penelitian yang melaksanakan usahatani padi, terdiri dari anggota dan ketua kelompok tani. Selain itu dilakukan juga focus group discussion (FGD) dengan melibatkan 10 peserta yang terdiri dari petugas lapangan, yaitu penyuluh lapangan, pengamat hama, pengawas benih. Tokoh masyarakat, termasuk aparat desa dan dari dinas terkait di tingkat kabupaten. Pada FGD diharapkan semua peserta dapat memberikan informasi yang mendukung penelitian ini. Data sekunder bersumber dari berbagai instansi terkait seperti pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pulang Pisau termasuk dari kecamatan dan desa.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : a. Desk study, meliputi studi literatur, telaah hasil penelitian atau tulisan ilmiah yang sudah dipublikasikan. b. Observasi, berupa pengamatan langsung di lapangan seperti kondisi fisik saluran air (primer, sekunder dan tersier) dan pintu air, serta ketersediaan sumber airnya atau tinggi muka air saat pasang (teknologi) di lokasi terpilih, dan pemanfaatan teknologi di lapangan yang berkaitan dengan kesiapan dan sikap petani terhadap kejadian El Nino. c. Wawancara, dilakukan secara langsung dan terstruktur terhadap 100 responden yang dipilih secara sengaja yaitu petani dan ketua kelompok tani dari tiga desa terpilih. d. FGD (Focus Group Discussion), diskusi secara kelompok dan sistematis dilakukan bersama penyuluh lapangan, pengamat hama, pengawas benih, tokoh masyarakat, termasuk aparat desa dan dari dinas terkait di tingkat kabupaten pengurus P3A sebanyak sekitar 10 orang di masing-masing lokasi penelitian (Desa Belanti Siam dan Desa Gadabung dan Tahai).

### Analisis Data

Data yang dihimpun dikelompokkan ke



dalam masing-masing indikator, selanjutnya ditabulasi dalam kerangka tabel untuk dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif menurut (Sugiyono 2008) merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pada kajian ini analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui kesiapan petani untuk mengantisipasi El Nino dalam rangka melakukan budidaya padi di kawasan Food Estate.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam grand desain pengembangan Food Estate Kalimantan Tengah, terdapat sekitar 165.000 Ha lahan potensial di kawasan eks PLG Kalimantan Tengah disiapkan sebagai kawasan pengembangan lumbung pangan nasional yang disebut Food Estate yang dirancang dari tahun 2020 - 2024. Pada tahap awal pelaksanaan program Food Estate (tahun 2020) telah digarap lahan seluas 30.000 Ha, yang tersebar di Kab. Kapuas 20.000 Ha dan Kab. Pulang Pisau 10.000 Ha. Kedua kabupaten ini merupakan daerah sentral produksi padi di Kalimantan Tengah yang memiliki keunggulan komparatif, seperti potensi sumberdaya lahan yang sesuai untuk tanaman pangan dengan jumlah yang cukup luas, sumberdaya air dan iklim yang sesuai, serta modal sosial budaya yang mendukung. Komoditas utama yang diusahakan yaitu padi dan jagung, sedangkan komoditas pendukung lainnya adalah sayuran dan buah-buahan (hortikultura), itik (peternakan) dan kelapa (perkebunan) (Kemtan 2020).

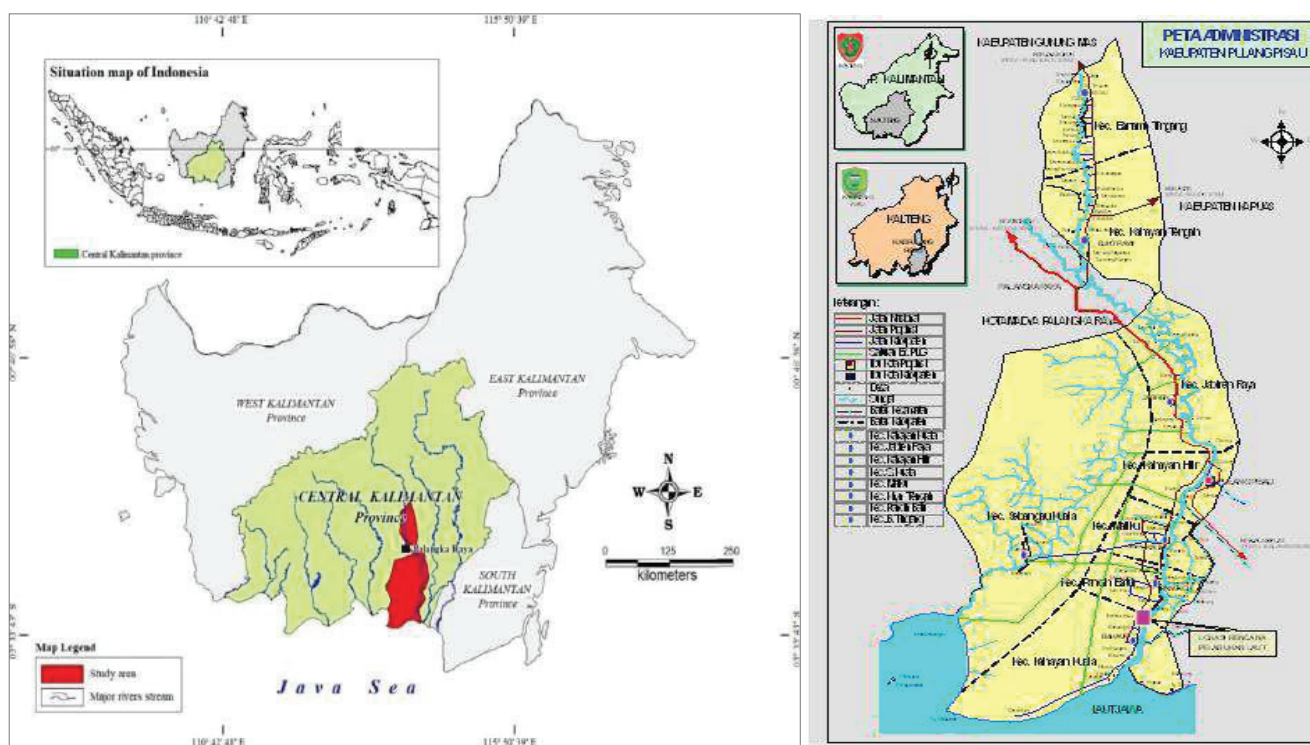
Desa Belanti Siam dan Gadabung di Kecamatan Pandih Batu dan Desa Tahai Jaya di Kecamatan Maluku, merupakan desa utama yang pada tahun 2020 ditempatkan kegiatan Food Estate untuk kawasan intensifikasi, di Kabupaten

Pulang Pisau, yang termasuk dalam kawasan utama 10.000 ha. Selain memiliki potensi lahan yang sangat luas, ketiga desa tersebut merupakan sentral produksi padi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Luas hamparan pertanaman padi di desa Belanti Siam sekitar 2.084 ha, yang terdiri dari 1.050 ha di blok A dan 1.034 ha blok B. Luas pertanaman padi di desa Gadabung sekitar 1.234 ha, dan sekitar 577 ha di desa Tahai Jaya kecamatan Maluku. Ketiga desa ini merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak terpisah, dengan agroekosistem lahan rawa pasang surut, dengan tipe luapan A dan B. Lahan pasang surut tipe luapan A yaitu lahan yang tergenang baik pada saat pasang besar maupun kecil, dan tipe luapan B adalah lahan yang hanya terluapi ketika terjadi pasang besar (Gambar 1).

Adanya iklim ekstrem berupa El Nino harus disikapi dengan cepat. Fenomena di mana Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah, mengalami pemanasan hingga di atas kondisi normal, akibatnya potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik bagian tengah meningkat dan curah hujan di wilayah Indonesia berkurang, sehingga memicu terjadinya kekeringan (BMKG, 2023). Sebagai lumbung pangan di kabupaten Pulang Pisau yang sekaligus untuk provinsi Kalimantan Tengah, maka antisipasi adanya El Nino harus dapat dilakukan sedini mungkin, mengingat sektor pertanian khususnya tanaman pangan paling sensitif dalam menghadapi iklim ekstrem.

### Petani dan Kesiapan Usahatani Musim Kemarau 2023

Dari hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa kesiapan petani dalam menghadapi kejadian El Nino sangat dipengaruhi oleh pengalaman petani dalam berusahatani padi, umur dan tingkat pendidikan petani. Berbagai informasi tentang adanya El Nino pada musim



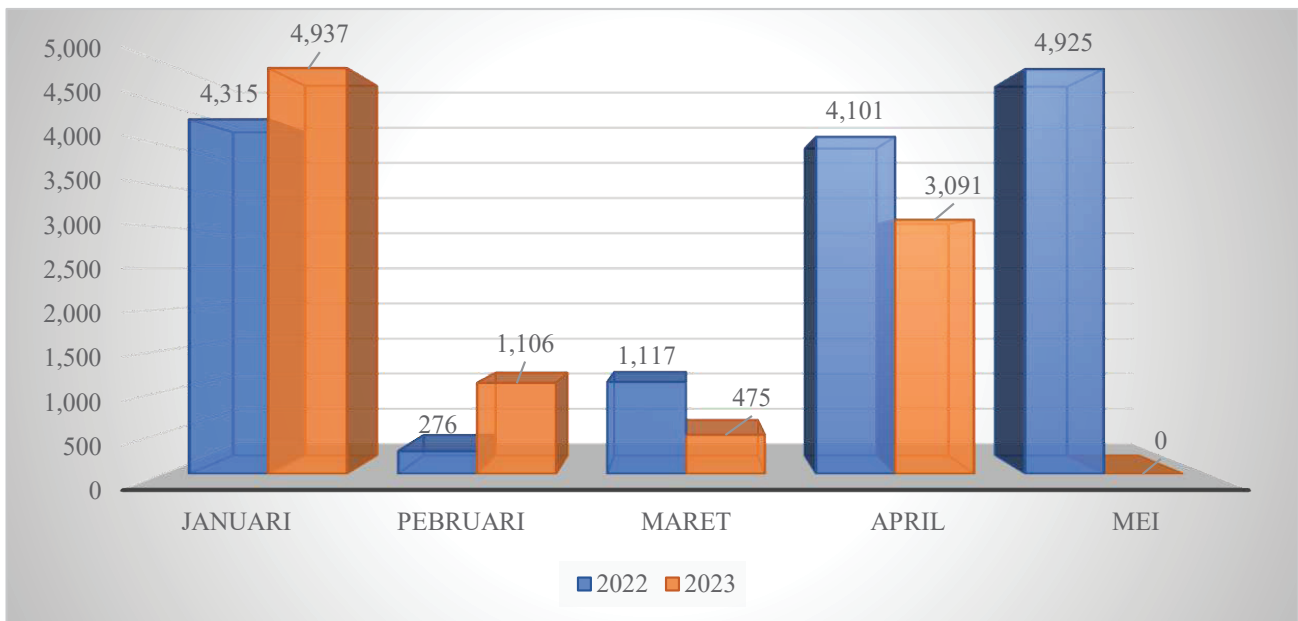
Gambar 1. Peta Lokasi Desa Belanti Siam, Gadabung, dan Tahai Jaya Kab. Pulang Pisau

tanam 2023 hampir tidak diperoleh petani dari petugas di lapangan, dan terbukti banyak petani tidak memahami istilah El Nino. Dalam hal melakukan usahatani, petani sangat memahami tentang lingkungan mereka, sehingga dapat disebutkan bahwa petani sangat arif melihat kondisi alam yang terjadi. Petani dapat menyebutkan dan memahami tanda-tanda kondisi lahan mereka yang akan kekeringan, tidak ada hujan dan kemarau panjang, yang tidak lain adalah bagian dari kejadian dan istilah El Nino itu sendiri. Pengalaman petani

demikianlah yang menggiring mereka untuk bertindak dalam mempersiapkan usahatani padi periode musim tanam I April - September 2023, sekaligus sebagai antisipasi dalam menghadapi El Nino. Dari sekitar 54% petani yang memiliki pengalaman berusahatani padi > 10 tahun dan 46% berpengalaman selama 1-10 tahun (Tabel 1) telah terjadi tindakan usahatani dalam menyikapi kejadian El Nino di tingkat lapangan, yaitu dengan mempercepat waktu tanam (Gambar 2).

Tabel 1. Pengalaman petani dalam berusahatani padi di desa Belanti Siam, Gadabung dan Tahai Jaya, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

No	Pengalaman berusahatani padi (tahun)	Jumlah petani (orang)	Persentase (%)
1	1 – 10	23	46
2	11 – 20	19	38
3	21 – 30	8	16
	Jumlah	<b>50</b>	<b>100</b>



Gambar 2. Perbandingan aktivitas tanam periode Januari – Mei 2022 terhadap Januari – Mei 2023

Dari (Gambar 2) terlihat bahwa terjadi percepatan tanam pada musim tanam April – September di kabupaten Pulang Pisau. Tahun 2022 luas tanam padi tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebanyak 4.925 ha, tetapi pada Mei tahun 2023 tidak ada pertanaman, atau petani telah selesai tanam. Pertanaman yang sebelumnya dilakukan bulan Mei dimajukan ke bulan Januari dan Pebruari 2023 (Dinas TPHP, 2023). Aktivitas ini menguntungkan petani dalam menghindari puncak El Nino 2023, yang sesuai prediksi (BMKG, 2023) terjadi Mei – September 2023, bersamaan dengan musim tanam periode April – September 2023. Tindakan ini membuktikan bahwa petani mampu menghindari resiko kejadian El Nino, sehingga panen raya pada bulan Oktober dapat dilakukan.

Faktor usia dan tingkat pendidikan turut mempengaruhi petani dalam menyiapkan berbagai tindakan budidaya atau inovasi dalam mengantisipasi dampak kejadian El Nino. Hasil survei menunjukkan bahwa 72% responden tergolong usia sangat produktif (26-45 tahun), dan lebih dari 50% merupakan petani milenial (Tabel 2)

Dari data yang dihimpun diketahui

bahwa luas kepemilikan lahan pertanian di lokasi penelitian berkisar antara 2-9 ha, namun kemampuan menggarap semua lahan sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja yang siap bekerja, khususnya yang berasal dari dalam keluarga. Jika jumlah tenaga kerja dalam rumah tangga banyak maka lahan yang digarap juga lebih luas. Adanya usia produktif dan tergolong millennial menjadikan aktivitas budidaya yang dilakukan semakin banyak, dan terbukti dari hasil survei bahwa luas garapan petani pada musim kemarau lebih luas dibandingkan pada musim hujan. Kondisi ini sejalan dengan Kiswanto et al. (2004), makin tinggi umur petani, sampai batas tertentu, maka kemampuan untuk bekerja semakin meningkat sehingga produktivitasnya meningkat. Adapun kelompok usia millennial atau yang berusia 19-39 tahun sangat berperan dalam mengaplikasikan teknologi (Purwanto, 2021), khususnya dalam mengantisipasi kejadian El Nino. Kehadiran petani millennial yang mengikuti perkembangan zaman memberikan peluang dalam perkembangan teknologi dan komunikasi di tingkat lapangan.

Tabel 2. Klasifikasi petani responden berdasarkan umur

No	Kelompok umur (tahun)	Jumlah petani (orang)	Persentase (%)
1	26 - 30	4	8
2	31 - 35	5	10
3	36 - 40	13	26
4	41 - 45	14	28
5	46 - 50	7	14
6	51 - 55	4	8
7	56 - 60	2	4
8	61 - 65	1	2
		<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer (2023)

Pemanfaatan Inovasi dan Dukungan Lain Dalam Mengantisipasi El Nino Berbagai inovasi teknologi telah ada dan sebagian telah diaplikasikan petani di tingkat lapangan. Beberapa inovasi dalam rangka menekan dampak negative dari kejadian El Nino di tingkat lapang antara lain menggunakan varietas unggul padi terpilih dan berumur genjah atau sedang, teknologi penggunaan pupuk berimbang, teknologi pemanfaatan alat dan mesin pertanian seperti alat pengolah lahan baik hand tractor maupun Jhon Deree, ketersediaan fasilitas air seperti pompa air, sistem irigasi yang tersedia di lapangan, dll. Mengingat lokasi kajian merupakan kawasan program Food Estate yang telah mendapatkan berbagai dukungan sarana dan prasarana, maka beberapa fasilitas fisik seperti saluran primer, sekunder dan tersier terpelihara cukup baik. Adapun berbagai fasilitas lain berupa sarana dan prasarana usahatani sebagian besar diperoleh dan dimiliki petani secara perorangan atau kelompok (Tabel 3).

Terkait dengan percepatan tanam dan aplikasi inovasi yang berhubungan dengan antisipasi

El Nino di tingkat lapangan, pada tahap awal yang dilakukan petani adalah memastikan ketersediaan benih padi yang akan ditanam. Varietas-varietas padi yang dipilih merupakan varietas unggul, baik hibrida maupun inbrida, dan tidak seluruhnya bantuan pemerintah, tetapi sebagian besar dibeli petani secara online atau di kios tertentu, atau dari mitra petani yang menyediakan jasa panen dengan Combine Harvester. Bagi petani yang membeli benih dari penjual jasa panen umumnya melakukan pembayaran setelah panen. Beberapa varietas yang dipilih petani di lokasi penelitian adalah yang berumur genjah atau sedang dan diyakini toleran terhadap kekeringan, seperti Inpari 32, IR-42, MR, dan Mapan.

Pemanfaatan inovasi lainnya adalah dalam mempersiapkan lahan usahatani. Beberapa fasilitas sebagian besar menggunakan milik sendiri atau kelompok. Petani dan kelompok tani yang umumnya tergolong millennial memilih mengopeasikan sendiri berbagai alsintan yang digunakan (Ayunwuy et al, 2010; Rosa Delima et al., 2016). Mereka umumnya memulai mengolah

Tabel 3. Kepemilikan terhadap peralatan usaha tani padi (milik pribadi)

No	Uraian sarana prasarana	Jumlah kepemilikan		Kondisi (%)	
		Petani (orang)	(%)	Baik	Rusak
1	Pompa air + gabang *	30	60	29 (96,67)	1 (3,33)
2	Gabang/selang besar	21	42	19 (90,48)	2 (9,52)
3	Paralon	26	52	25 (96,15)	1 (3,85)
4	Genset	1	2	1 (100)	-
5	Sprayer	50	100	44 (88)	6 (12)
6	Light trap	3	6	2 (66,67)	1 (33,33)
7	Bom tikus	4	8	3 (75)	1 (25)
8	Jaring	6	12	4 (66,67)	1 (3,33)
9	Hand traktor	47	94	44 (93,62)	3 (6,38)
10	Rotary/landak	15	30	15 (100)	-
11	Bajak/singkal	36	72	36 (100)	-
12	Dapok	6	12	4 (66,67)	1 (3,33)
13	Garu	42	84	42 (100)	-
14	Gerobak	37	74	36 (97,30)	1 (2,70)
15	Sepeda motor	50	100	50 (100)	-
16	Tosa	1	2	1 (100)	-
17	Mobil	3	6	3 (100)	-
18	Combine	1	2	1 (100)	-

Sumber: data primer (2023) N= 50 orang \*) milik kelompok tani

tanah, hanya dengan melihat air pada lahan, apakah air tersedia dan cukup untuk memulai persiapan lahan. Petani yang memiliki TR-2 secara individu lebih memilih menyegerakan pengolahan lahan. Jika lahan yang akan ditanamani dapat dolah dengan menggunakan tractor roda 4 atau Jhon Deree maka mereka harus mendaftar ke ketua kelompok tani, karena tractor roda 4 dikelola oleh kelompok tani.

Pada pelaksanaan tanam, petani dapat memilih apakah tanam benih langsung atau tabela atau tanam pindah. Pada sistem tanam tabela tidak ada kendala bagi petani, karena hanya dengan merendam benih dan menggunakan alat tanam trans seeder petani dapat menyelesaikan pertanaman seluas dua hektar dalam sehari dengan jumlah tenaga kerja dua orang. Tetapi apabila tanam pindah, maka petani perlu tenaga kerja

yang akan menanam dan harus mendaftar kepada perkumpulan tenaga tanam di dalam desa.

## KESIMPULAN

Hasil kajian ini membuktikan bahwa perubahan iklim yang berdampak pada kejadian El Nino khususnya yang terjadi di sentral produksi padi, kawasan Food Estate kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah, dapat diantisipasi dengan adanya:

- a. Kesiapan petani yang memiliki pengalaman berusahatani >10 tahun, yang terbukti mampu memahami kondisi alam secara arif dan mengambil tindakan dengan mempercepat waktu tanam, sehingga pada puncak El Nino sudah tidak ada lagi pertanaman.
- b. Kesiapan sarana dan prasana pendukung usahatani pada kondisi kemarau seperti pompanisasi, pemeliharaan sumber air, mekanisasi lain dan kesiapan sarana produksi, terbukti mendorong terlaksananya usahatani padi yang aman dari dampak perubahan iklim
- c. Penerapan inovasi yang dilakukan ditingkat lapang seperti pemilihan varietas unggul yang bernilai ekonomi dan toleran kekeringan seperti IR-42, Inpari 32, MR, dan berumur genjah seperti Inpari 48, sesuai ditanam pada kondisi El Nino, demikian juga dengan teknologi mekanisasi selain mampu mempercepat tanam dan panen, juga dapat menekan kehilangan hasil yang tinggi di musim kemarau.

## DAFTAR PUSTAKA

Angles, Chinnadurai, and Sundar. 2011. *Awareness on impact of climate change on dryland agriculture and coping mechanisms of dryland farmers*. Indian Journal of Agricultural Economics. Vol.66, hlm. 365- 372.

Ayunwuy, Kuponiyi, Ogunlade, and Oyetero. (2010). *Farmers perception of impact of climate changes on food crop production in Ogbomoso Agricultural Zone of Oyo State, Nigeria*. Continental Journal Agricultural Economics. Vol.4, hlm.19-25

Bappenas. 2023. Salinan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 18/M.Ppn/Hk/03/2023 Tentang

Rencana Induk Pengembangan Food Estate/ Kawasan Sentra Produksi Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah

BMKG. 2023. <https://www.merdeka.com/peristiwa/bmkg-prediksi-el-nino-terjadi-juli-2023-warga-bali-diimbau-waspadai-kekeringan.html>

BPS. 2023. *Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2023*. BPS Kalimantan Tengah Palangka Raya.

Dinas TPHP Kalimantan Tengah. 2022. *Pengembangan Food Estate Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional*. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas TPHP Kalimantan Tengah. 2023. *Upaya Pemda Kalteng Mendorong Peningkatan Produksi Pangan Menyokong IKN*. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2001. *Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Cambridge, UK: Cambridge University Press

Kementrian Pertanian. 2020. *Rencana strategis Kementerian Pertanian 2019-2024*. Jakarta

Kementerian Pertanian. 2022. *Pedoman Umum Pengembangan Food Estate Berbasis*

*Korporasi Petani*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Kementerian Pertanian. 2022. *Grand Design Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Kiswanto., A. Prabowo dan Widyantoro. 2004. *Transformasi struktur Usaha Penggemukan Sapi Potong di Lampung Tengah*. Sistem dan Kelembagaan Usahatani Tanaman-Ternak.

Prosiding Seminar. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. p:111- 121.

Nurdin. 2011. *Antisipasi perubahan iklim untuk keberlanjutan ketahanan pangan*. Sulawesi Utara: Universitas Negeri Gorontalo.

Purwanto, A. (2021). *Effect of Management Innovation, Transformational Leadership, and Knowledge Sharing on Market Performance of Indonesian Consumer Goods Company*. Journal of Applied Management (JAM) Volume, 19

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Rosa Delima, Halim Budi Santoso, Joko Purwadi, 2016. *Kajian Aplikasi Pertanian yang Dikembangkan di Beberapa Negara Asia dan Afrika*. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATi) 2016. Yogyakarta, 6 Agustus 2016. ISSN: 1907 – 5022.

### FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



# KAJIAN PENENTUAN POTENSI LOKASI RUMAH SAKIT KELAS A DI KOTA PALANGKA RAYA MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)

*Study Determination of Potential Locations for Class A Hospital in Palangka Raya City Using Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Geographic Information System (GIS) Method*

Oleh :

**Govinda Arundhati**

(email: govinda.arundhati@gmail.com)

## Abstrak :

Rumah sakit memiliki fungsi penting bagi masyarakat, sehingga lokasinya harus memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi yang berpotensi sebagai lokasi Rumah Sakit Kelas A di Kota Palangka Raya. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan kriteria lokasi rumah sakit, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menentukan potensi lokasi yang optimal dan menggambarkan lokasi secara spasial. Hasil analisis menggunakan AHP menunjukkan bahwa kriteria terpenting dalam menentukan lokasi rumah sakit adalah fungsi jalan (28,50%), kepadatan penduduk (21,96%), tata guna lahan (14,78%), jarak ke TPA (9,29%), kerawanan kebakaran hutan dan hutan (8,71%), kerawanan banjir (7,68%), tingkat kebisingan (4,73%), dan tingkat pencemaran (4,35%). Hasil analisis spasial menggunakan SIG menunjukkan besarnya potensi lokasi pembangunan RS Kelas A di setiap kecamatan Kota Palangka Raya, yaitu Bukit Batu (2.842,06 ha), Jekan Raya (1.528,47 ha), Pahandut (960,75 ha), Sabangau (819,54 ha), dan Rakumpit (2.774,70 ha). Kecamatan Pahandut memiliki tingkat kesesuaian yang paling tinggi (8,03%) untuk lokasi rumah sakit Kelas A dibandingkan kecamatan lainnya.

## Kata Kunci:

Potensi, lokasi rumah sakit, *Analytical Hierarchy Process*, *Geographic Information System*.

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh peningkatan angka kelahiran, penurunan tingkat kematian, dan terjadinya proses migrasi (Barclay, 1984). Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah tingkat kelahiran, dan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi merupakan beban dalam pembangunan nasional (Rochaida, 2016).

Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau dengan rata-rata terdapat penambahan 3,26 juta jiwa setiap tahunnya.

Pertumbuhan penduduk ini menyebabkan peningkatan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas dan kebutuhan penduduk. Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi setiap individu dan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas penduduk. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu upaya yang penting dilakukan untuk menjaga,



memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan penduduk.

Layanan kesehatan menjadi hak setiap individu agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk mencapai hal tersebut maka dilakukan peningkatan layanan kesehatan melalui ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan memadai, salah satunya dengan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yaitu rumah sakit.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Provinsi Kalimantan Tengah sampai sekarang ini memiliki tingkat ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang masih rendah. Total keseluruhan terdapat 26 rumah sakit antara lain 1 Rumah Sakit Provinsi, 3 Rumah Sakit Rujukan Regional, 12 RSUD, 1 RSJ, 1 RS Polri, 1 RS TNI, 5 RS Swasta dan 1 RS Pratama. Dari seluruh rumah sakit hanya 3 rumah sakit kelas B, dan belum ada rumah sakit Kelas A. Hal ini berakibat tingginya kasus rujukan ke luar provinsi, seperti penyakit dalam 322 kasus, mata 264 kasus, jantung 176 kasus, onkologi 133 kasus, ortopedi 121 kasus pada tahun 2018 (Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2019).

*World Health Organization (WHO)* atau Badan Kesehatan Dunia mensyaratkan bahwa

rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk adalah 1:1.000. Artinya 1 tempat tidur digunakan untuk melayani 1.000 penduduk. Saat ini jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 adalah 2.741.075 jiwa dengan tingkat kepadatan 18 jiwa/km<sup>2</sup>. Dan khusus untuk Kota Palangka Raya jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 305.907 jiwa dengan tingkat kepadatan 107 jiwa/km<sup>2</sup>, memiliki luas wilayah ± 285.312,40 Ha yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan.

Berdasarkan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Sakit yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah tempat tidur yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota adalah 2.425. Sehingga rasio tempat tidur rumah sakit di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 0,91 per 1.000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa jumlah tempat tidur yang ada belum mencukupi dan masih terdapat kekurangan 236 tempat tidur.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana melakukan pembangunan rumah sakit kelas A. Pembangunan rumah sakit kelas A merupakan salah satu arah kebijakan pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rumah sakit harus dibangun di lokasi yang ideal, strategis, terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya analisis dan rekomendasi lokasi rumah sakit kelas A di Kota Palangka Raya, dengan memperhatikan beberapa faktor diantaranya yaitu lokasi harus mudah dijangkau oleh masyarakat atau dekat ke jalan raya dan transportasi umum, berada pada lingkungan dengan udara bersih, tenang dan bebas dari bising, tidak di daerah rawan longsor atau banjir, dan juga

lebih baik jika rumah sakit tersebar merata dan tidak saling berdekatan.

Penentuan potensi lokasi rumah sakit dapat dilakukan dengan memanfaatkan *teknologi Sistem Informasi Geografis* (SIG) dengan menggunakan informasi spasial yang dibuat melalui teknik pembobotan dari berbagai kriteria, sehingga akan menghasilkan suatu informasi yang baru (Somantri, 2016). Kriteria yang digunakan dalam pemilihan lokasi rumah sakit mengacu pada kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pembobotan kriteria dilakukan dengan model perhitungan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) untuk mendapatkan alternatif terbaik sesuai masing-masing nilai kriteria. Sehingga dari hasil penelitian ini diperoleh lokasi yang strategis dan optimal serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengambilan keputusan untuk penentuan lokasi rumah sakit yang sesuai dengan tingkat kesesuaian lahannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan, pertama, mengidentifikasi kriteria yang digunakan sebagai persyaratan teknis dalam analisis penentuan potensi lokasi rumah sakit kelas A di Kota Palangka Raya. Kedua, menentukan potensi lokasi yang sesuai untuk pembangunan rumah sakit kelas A tersebut.

## 2. METODE

### 2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mencakup wilayah administrasi Kota Palangka Raya, yang secara geografis terletak pada 113°30'-114° 07' Bujur Timur dan 1°35'-2°24' Lintang Selatan. Luas wilayah dari Kota Palangka Raya adalah 2.853,12 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 5 (lima) wilayah administrasi

kecamatan yaitu Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit.

### 2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pakar/ahli dalam bidang kesehatan dan tata ruang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang responden dan dipilih secara purposive. Pengambilan sampel mengacu pada pendapat Roscoe dalam Sugiyono (2017) yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500 sampel.

### 2.3. Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dikumpulkan melalui observasi, kuesioner/angket, dan literatur. Observasi dan diskusi langsung dilakukan kepada para pemangku kepentingan dari berbagai unsur yang ada.

Selanjutnya dilakukan pengisian kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui persepsi responden terhadap kriteria yang digunakan sebagai faktor pembatas dalam penentuan lokasi rumah sakit. Dalam penilaiannya menggunakan skala penilaian perbandingan berpasangan, setiap nilai menunjukkan tingkat kepentingan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 3 (tiga) metode yaitu metode skoring dan pembobotan, metode AHP, dan analisis spasial dengan menggunakan *Sistem Informasi Geografis* (SIG). Skoring adalah metode pemberian skor atau nilai terhadap masing-masing kelas untuk menentukan tingkat kesesuaiannya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan pembobotan atau weighting digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat kesesuaian (Sholikhah, 2019).

Pemberian nilai skor dilakukan berdasarkan

tingkat kesesuaian lahan; semakin tinggi nilai skor maka lokasi mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi. Artinya lokasi tersebut layak dijadikan sebagai lokasi rumah sakit kelas A. Pemberian bobot dilakukan berdasarkan pertimbangan seberapa besar pengaruhnya terhadap lokasi rumah sakit. Tabel 1 menyajikan klasifikasi kriteria yang digunakan sebagai faktor penentu lokasi rumah sakit.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Penentu Lokasi Rumah Sakit Kelas A

No.	Kriteria	Sub Kriteria	Klasifikasi
1.	Kepadatan penduduk	Sangat Jarang (< 5 jiwa/ha)	Tidak Sesuai
		Jarang (5-10 jiwa/ha)	Cukup Sesuai
		Sedang (10-50 jiwa/ha)	Sesuai
		Padat (50-100 jiwa/ha)	Sangat Sesuai
2.	Penggunaan lahan	Perairan	Sangat Tidak Sesuai
		Lahan Terbangun	Tidak Sesuai
		Hutan	Cukup Sesuai
		Pertanian	Sesuai
3.	Fungsi jalan	Lahan Terbuka	Sangat Sesuai
		Kolektor Sekunder	Tidak Sesuai
		Kolektor Primer	Cukup Sesuai
		Arteri Sekunder	Sesuai
4.	Daerah rawan banjir	Arteri Primer	Sangat Sesuai
		Tinggi	Tidak Sesuai
		Sedang	Sesuai
		Rendah	Sangat Sesuai
5.	Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan	Tinggi	Tidak Sesuai
		Sedang	Sesuai
		Rendah	Sangat Sesuai
		Berbahaya ( $\geq 301$ )	Sangat Tidak Sesuai
6.	Tingkat polusi	Sangat Tidak Sehat (201-300)	Tidak Sesuai
		Tidak Sehat (101-200)	Cukup Sesuai
		Sedang (51-100)	Sesuai
		Baik (1-50)	Sangat Sesuai
7.	Tingkat kebisingan	> 55 dB	Tidak Sesuai
		46 – 55 dB	Sesuai
		35 – 45 dB	Sangat Sesuai
8.	Jarak dari TPA sampah	0 – 750 m	Tidak Sesuai
		750 – 1.500 m	Sesuai
		> 1.500 m	Sangat Sesuai

Selanjutnya analisis dilakukan dengan metode AHP dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah dan menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Kriteria yang digunakan pada

penelitian ini dibagi menjadi level pertama

(tujuan/goal), level kedua (kriteria), dan level ketiga (sub kriteria).

2. Membuat matriks berpasangan dengan membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh kriteria untuk setiap sub kriteria tujuannya agar dapat dilakukan penilaian tentang kepentingan relatif dua unsur pada

satu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan level atas yang ada di atasnya. Agar lebih terstruktur, hasil dan penilaian disajikan dalam bentuk perbandingan berpasangan atau pairwise comparison.

3. Melakukan perhitungan bobot prioritas, bobot ini menggambarkan besarnya solusi dalam penyelesaian masalah. Nilai bobot prioritas dapat dilakukan dengan perhitungan *eigen vector*.

4. Menghitung konsistensi hierarki, dilakukan dengan menentukan uji konsistensi. Untuk mengetahui apakah perhitungan yang dilakukan konsisten, maka perlu dihitung *Consistency Index (CI)* dan *Consistency Ratio (CR)*. Nilai *Consistency Ratio* menunjukkan hasil perhitungan yang dibuat apakah konsisten atau tidak. Nilai CR mempunyai 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

- Jika  $CR < 0,10$  maka menunjukkan tingkat konsistensi yang cukup rasional dalam perbandingan berpasangan.
- Jika  $CR \geq 0,10$  maka menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penilaian, maka perlu dilakukan survei kuisioner ulang. Selanjutnya untuk menentukan nilai

Random Index (RI) berdasarkan pada ordo matriks yang dibuat. Nilai RI berdasarkan

Tabel 2. Nilai *Random Index* (RI)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Tatap ketiga adalah melakukan analisis spasial terhadap kriteria penentu lokasi dengan mempertimbangkan hasil perhitungan pada metode AHP. Terhadap beberapa kriteria dan sub kriteria yang ada tersebut dilakukan pengharkatan atau skoring sehingga diperoleh nilai bobot untuk masing-masing kriteria dan sub kriteria. Nilai bobot yang telah valid dan konsisten digunakan sebagai pembobot numerik dalam analisis spasial dengan menggunakan analisis overlay melalui perangkat lunak SIG. Proses dalam overlay merupakan suatu proses matematis

yang dilakukan untuk memperoleh informasi baru dengan cara menggabungkan skoring dan pembobotan yang telah dilakukan sebelumnya. Total nilai akhir dari bobot tersebut yang menjadi dasar dalam menentukan tingkat kesesuaian suatu lokasi. Persamaan yang digunakan dalam overlay adalah sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n (W_i \times X_i)$$

Keterangan:

- N = jumlah parameter
- W<sub>i</sub> = bobot untuk parameter ke-i
- X<sub>i</sub> = skor pada parameter ke-i

Total nilai akhir dari bobot yang semakin besar menunjukkan bahwa suatu lokasi mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi untuk lokasi pembangunan rumah sakit kelas A, dan demikian sebaliknya untuk nilai bobot yang rendah. Berdasarkan hasil total nilai bobot yang diperoleh, selanjutnya dilakukan klasifikasi tingkat kesesuaian menjadi 3 (tiga) kelas yaitu sangat sesuai, sesuai dan tidak sesuai. Klasifikasi tersebut dilakukan menggunakan *equal interval*

pada ArcGIS 10.4 atau menggunakan persamaan berikut ini.

$$c = \frac{X_n - X_1}{k}$$

Keterangan:

- c = besar interval kelas
- X<sub>n</sub> = total nilai bobot tertinggi
- X<sub>1</sub> = total nilai bobot terendah
- k = jumlah kelas yang diinginkan

Proses overlay antar kriteria akan menghasilkan informasi spasial yang baru dan menunjukkan lokasi yang sangat sesuai, sesuai dan tidak sesuai untuk lokasi pembangunan rumah sakit kelas A. Lokasi-lokasi yang telah teridentifikasi tersebut kemudian dilakukan validasi lapangan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketelitian yang dihasilkan dalam pengolahan dan analisis data serta dan mengetahui kondisi eksisting di lapangan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Spasial dan Klasifikasi Kriteria Potensi Lokasi Rumah Sakit

##### 1. Kriteria Kepadatan Penduduk

Kriteria kepadatan penduduk diklasifikasikan menjadi 4 (empat) sub kriteria yaitu kepadatan penduduk sangat jarang apabila < 5 jiwa/ha, jarang apabila 5-10 jiwa/ha, sedang apabila 10-50 jiwa/ha, dan padat apabila 50-100 jiwa/ha.

Kepadatan penduduk di Kota Palangka Raya termasuk pada kategori sangat jarang, jarang dan sedang. Distribusi penduduk antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidak merata, dan kawasan perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk, migrasi, dorongan ekonomi dan perkembangan wilayah.

Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan

Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya mempunyai tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Secara faktanya, kawasan di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan tempat aktivitas ekonomi. Dengan tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk penyediaan fasilitas kesehatan oleh pemerintah serta kemudahan akses layanan disekitar kawasan tersebut maka mendorong masyarakat untuk tinggal dan menetap pada wilayah tersebut.

## 2. Kriteria Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah penelitian diklasifikasikan menjadi 5 (lima) sub kriteria yaitu perairan, lahan terbangun, hutan, pertanian dan lahan terbuka. Dalam penentuan potensi lokasi rumah sakit, penggunaan lahan yang mempunyai tingkat kesesuaian paling tinggi adalah lahan terbuka. Lahan terbuka sesuai dengan SNI 7645-1:2014 tentang Klasifikasi Penutup Lahan merupakan suatu kawasan yang tidak digarap atau tidak digunakan untuk bangunan. Umumnya di Kota Palangka Raya lahan terbuka ini dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dalam menguasai suatu lahan dan selanjutnya dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan lebih lanjut sehingga menjadi kawasan dengan penutup lahan berupa semak belukar.

Lahan terbuka mempunyai nilai penting dalam penggunaan lahan untuk pembangunan rumah sakit karena apabila lahan terbuka digunakan untuk lokasi pembangunan rumah sakit maka tingkat kebutuhan finansial terutama dalam hal biaya ganti rugi lahan dapat diminimalisir.

Selain itu juga penggunaan lahan terbuka untuk pembangunan rumah sakit dapat mengurangi efek negatif terutama pencemaran lingkungan terhadap masyarakat yang berada disekitar lokasi pembangunan rumah sakit.

Penggunaan lahan di Kota Palangka Raya didominasi oleh hutan dengan luas kawasan mencapai 205.958,77 hektar (72,19%), pertanian dengan luas 40.186,42 hektar (40,19%), lahan terbuka dengan luas 18.705,82 hektar (6,56%), perairan dengan luas 14.052,65 hektar (4,92%), dan lahan terbangun dengan luas 6.408,76 hektar (2,24%).

## 3. Kriteria Fungsi Lahan

Data yang digunakan sebagai kriteria fungsi jalan adalah data jaringan jalan yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan yang ada dalam wilayah Kota Palangka Raya. Fungsi jalan dibedakan menjadi 4 (empat) sub kriteria yaitu jalan kolektor sekunder, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, dan jalan arteri primer dengan total panjang  $\pm 353,99$  km.

Analisa spasial untuk kriteria fungsi jalan dilakukan dengan menggunakan buffer tool dengan interval 1 (satu) km dari badan jalan. Penggunaan buffer dalam analisa spasial bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap jangkauan pelayanan atau luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu. Pertimbangan yang digunakan dalam kriteria fungsi jalan adalah jalan yang lebar dan tingkat kecepatan rata-rata 60 km/jam merupakan jalan yang sesuai sebagai lokasi rumah sakit, karena berkaitan dengan kemudahan aksesibilitas. Fungsi jalan berupa jalan arteri primer dengan panjang jalan 85,02 km mempunyai tingkat kesesuaian yang paling tinggi untuk pertimbangan dalam pembangunan rumah sakit.

#### 4. Kriteria Daerah Rawan Banjir

Data yang digunakan untuk kriteria daerah rawan banjir adalah Peta Indeks Risiko Bencana Banjir yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Indeks bahaya banjir diestimasi berdasarkan kemiringan lereng dan jarak dari sungai pada suatu wilayah. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa wilayah Kota Palangka Raya memiliki indeks bahaya banjir rendah, sedang, dan tinggi.

Dalam penentuan potensi lokasi rumah sakit, daerah yang sesuai adalah daerah dengan indeks risiko bahaya banjir yang rendah. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi yang tingkat bahaya banjir rendah akan semakin baik, sehingga aktivitas dan aksesibilitas tidak mengalami hambatan. Hasil pengolahan data spasial untuk kriteria daerah rawan banjir dengan indeks risiko rendah mempunyai luasan  $\pm 47.546,70$  hektar, indeks risiko sedang dengan luasan  $\pm 157.675, 50$  hektar, dan indeks risiko tinggi dengan luasan  $\pm 80.100,22$  hektar.

Kota Palangka Raya didominasi oleh daerah yang memiliki tingkat bahaya rawan banjir dengan kategori sedang. Luasannya mencapai 55,26% yang artinya Kota Palangka Raya sebagian besar akan mengalami risiko bahaya banjir. Hal ini dipengaruhi oleh faktor curah hujan yang intensitasnya tinggi terutama pada puncak musim hujan, pendangkalan sungai yang diakibatkan oleh adanya aktivitas pertambangan di perairan Sungai Kahayan dan Sungai Rungan, kerusakan dan kebakaran hutan, dan sistem drainase yang kurang baik.

#### 5. Kriteria Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Indeks risiko kebakaran hutan dan lahan

diestimasi berdasarkan jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa wilayah Kota Palangka Raya memiliki indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan sub kriteria rendah, sedang, dan tinggi.

Dalam penentuan potensi lokasi rumah sakit, daerah yang sesuai adalah daerah dengan indeks risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan yang rendah. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi yang tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan yang rendah akan semakin baik, karena untuk menjaga keselamatan dari para pengguna rumah sakit termasuk pasien dan tenaga medis.

Hasil pengolahan data spasial untuk kriteria daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dengan indeks risiko rendah mempunyai luasan  $\pm 105.998,24$  hektar, indeks risiko sedang dengan luasan  $\pm 127.169,62$  hektar, dan indeks risiko tinggi dengan luasan  $\pm 52.144,55$  hektar. Kota Palangka Raya didominasi oleh daerah yang memiliki tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan kategori sedang. Luasannya mencapai 44,57% dari luas wilayah Kota Palangka Raya, artinya Kota Palangka Raya sebagian besar wilayahnya mengalami risiko bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal ini terjadi terutama di daerah lahan gambut yang tersebar di wilayah Kota Palangka Raya.

#### 6. Kriteria Tingkat Polusi

Data yang digunakan untuk mengetahui tingkat polusi menggunakan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dengan parameter partikulat (PM10), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), ozon (O<sub>3</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Penentuan tingkat polusi diklasifikasikan menjadi 5 (lima) sub kriteria yaitu baik, sedang, tidak sehat, sangat

tidak sehat, dan berbahaya. Kondisi mutu udara di Kota Palangka Raya tergolong dalam kategori baik (1-50) yang artinya tingkat mutu udara sangat baik, sehingga tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan.

#### 7. Kriteria Tingkat Kebisingan

Dampak dari kebisingan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, sehingga rumah sakit yang digunakan sebagai tempat perawatan dan proses penyembuhan harus bebas dari gangguan kebisingan.

Sebagai input penentuan kriteria tingkat kebisingan adalah data hasil pengukuran kebisingan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan tersebar pada beberapa lokasi yang mempunyai tingkat aktivitas tinggi terutama di kawasan perkotaan dan selanjutnya dilakukan interpolasi untuk menggambarkan tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) sub kriteria yaitu tingkat kebisingan 35-45 dB, tingkat kebisingan 46-55 dB, dan > 55 dB.

Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan pada titik-titik tertentu di kawasan perkotaan dengan aktivitas yang tinggi dan diasumsikan bahwa pada kawasan tersebut memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Sehingga kawasan lainnya mempunyai tingkat kebisingan yang relatif rendah dibandingkan kawasan perkotaan.

#### 8. Kriteria Jarak dari TPA Sampah

Kota Palangka Raya memiliki TPA yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 14,5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya. Metode pembuangan sampah di Kota Palangka Raya menggunakan metode open dumping yang

merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah dihamparkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh.

Keberadaan suatu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dalam suatu wilayah akan menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, terutama untuk masyarakat yang menetap pada jarak kurang dari 1 km. Apabila tempat pembuangan akhir sampah tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan pencemaran kualitas air, pencemaran udara, pencemaran tanah dari tumpukan sampah yang ditimbun. Semakin jauh jarak dari lokasi TPA akan semakin ideal digunakan sebagai lokasi rumah sakit, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari sampah. Kriteria jarak dari TPA diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) sub kriteria yaitu 0-750 m, 750-1.500 m, dan > 1.500 m.

### 3.2 Analisis dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

Tujuan utama dalam menggunakan AHP pada penelitian adalah untuk menentukan tingkat kepentingan dan menghitung bobot setiap kriteria dan sub kriteria dengan cara melakukan perhitungan matriks perbandingan berpasangan. Metode AHP dilakukan dengan memperoleh persepsi, pendapat, dan pandangan dari pemangku kepentingan dan praktisi yang terlibat dalam perencanaan teknis rumah sakit. Sehingga diharapkan dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan rumah sakit, tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja melainkan multifaktor dan mencakup berbagai aspek dan kepentingan.

Prinsip kerja dalam AHP adalah memberikan bobot pada tiap kriteria dan sub kriteria dengan perbandingan antar kriteria dan sub kriteria satu sama lainnya. Kriteria yang digunakan dalam

penelitian yaitu kepadatan penduduk (KP), penggunaan lahan (PL), fungsi jalan (FJ), daerah rawan banjir (DRB), daerah rawan karhutla (DRK), tingkat polusi (TP), tingkat kebisingan (TK), dan jarak dari TPA (TPA). Bobot yang lebih besar dari suatu kriteria menunjukkan bahwa kriteria tersebut lebih penting dibandingkan kriteria lainnya dalam penentuan potensi lokasi rumah sakit.

Metode AHP didasarkan pada matriks perbandingan berpasangan, dimana elemen-elemen yang ada pada matriks tersebut merupakan pendapat dari para responden. Responden akan memberikan penilaian, persepsi, atau memperkirakan kemungkinan dari adanya suatu hal/peristiwa yang dihadapi. Pengolahan data dari responden selanjutnya dilakukan dengan mentabulasikan hasil kuesioner penelitian dalam bentuk tabel yang kemudian dihitung nilai geomean (geometric mean), yang merupakan nilai tengah/sentral yang diasumsikan mewakili nilai seluruh data yang

diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan yang lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden. Proses perhitungan matriks perbandingan berpasangan dalam metode AHP dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu:

1. Tahapan penyusunan matriks dan perhitungan bobot

Nilai geomean setiap kriteria hasil penilaian responden kemudian dimasukkan dalam matriks perbandingan berpasangan. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan matriks dari seluruh kriteria seperti pada Tabel 3.

Matriks perbandingan kriteria digunakan sebagai acuan dalam perhitungan nilai eigen vektor untuk masing-masing kriteria. Hasil perhitungan nilai eigen vektor untuk setiap kriteria ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 3. Matriks Perbandingan Kriteria

Matriks Perbandingan								
Kriteria	KP	PL	FJ	DRB	DRK	TK	TP	TPA
<b>KP</b>	1,00	2,62	0,51	3,21	3,07	3,41	3,72	2,75
<b>PL</b>	0,38	1,00	0,38	2,81	2,92	2,93	3,12	1,76
<b>FJ</b>	1,97	2,62	1,00	3,57	3,50	4,16	4,46	3,07
<b>DRB</b>	0,31	0,36	0,28	1,00	0,84	2,27	2,48	0,69
<b>DRK</b>	0,33	0,34	0,29	1,18	1,00	2,30	2,46	1,31
<b>TK</b>	0,29	0,34	0,24	0,44	0,44	1,00	1,05	0,44
<b>TP</b>	0,27	0,32	0,22	0,40	0,41	0,95	1,00	0,36
<b>TPA</b>	0,36	0,57	0,33	1,44	0,76	2,28	2,79	1,00
<b>Total</b>	<b>4,91</b>	<b>8,17</b>	<b>3,25</b>	<b>14,05</b>	<b>12,94</b>	<b>19,31</b>	<b>21,08</b>	<b>11,39</b>

Tabel 4. Nilai *Eigen Vector* Kriteria Potensi Lokasi

No.	Kriteria	<i>Eigen Vector</i>	<i>Priority Vector</i>
1.	Kepadatan Penduduk	2,1509	0,2196
2.	Penggunaan Lahan	1,4470	0,1478
3.	Fungsi Jalan	2,7910	0,2850
4.	Daerah Rawan Banjir	0,7525	0,0768
5.	Daerah Rawan Karhutla	0,8527	0,0871
6.	Tingkat Kebisingan	0,4630	0,0473
7.	Tingkat Polusi	0,4259	0,0435
8.	Jarak dari TPA	0,9098	0,0929



## 2. Tahapan perhitungan konsistensi

Konsistensi diartikan sebagai intensitas hubungan antar elemen yang didasarkan pada kriteria tertentu dan saling membenarkan secara logis. Perhitungan konsistensi bertujuan untuk melihat nilai hasil AHP memenuhi persyaratan  $CR < 0,1$  atau tidak. Apabila nilai konsistensi tidak terpenuhi, maka responden dianggap tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan dan dilakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan. Berikut pada Tabel 5 menunjukkan hasil perhitungan konsistensi masing-masing kriteria.

Dengan menggunakan hasil perhitungan priority vector, selanjutnya diketahui nilai  $\lambda$  max, yaitu 8,275. Sehingga nilai *consistency ratio index* (CI) dan *consistency ratio* (CR) dengan menggunakan nilai random

consistency (RI) = 1,41 untuk  $n = 8$ , yaitu  $CI = 0,039$  dan  $CR = 0,028$ . Nilai CR adalah 0,028 artinya telah memenuhi persyaratan  $CR < 0,10$ , sehingga yang rasional atau konsisten dalam perbandingan berpasangan. Berikut pada Tabel 6, merupakan hasil perhitungan nilai AHP untuk kriteria potensi lokasi rumah sakit.

Hasil pengolahan data dari nilai AHP diketahui bahwa nilai bobot yang paling besar terdapat pada kriteria fungsi jalan yaitu 28,50% dan bobot terkecil ada pada kriteria tingkat polusi yaitu 4,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria fungsi jalan menjadi faktor paling penting dalam penentuan potensi lokasi rumah sakit kelas A. Selanjutnya diikuti oleh kriteria kepadatan penduduk dan penggunaan lahan sebagai faktor penting yang kedua dan ketiga.

Tabel 5. Perhitungan Konsistensi Kriteria Potensi Lokasi

No.	Kriteria	Priority Vector	Normalisasi	Konsistensi
1.	Kepadatan Penduduk	0,2196	1,844	8,397
2.	Penggunaan Lahan	0,1478	1,248	8,450
3.	Fungsi Jalan	0,2850	2,360	8,281
4.	Daerah Rawan Banjir	0,0768	0,631	8,214
5.	Daerah Rawan Karhutla	0,0871	0,719	8,258
6.	Tingkat Kebisingan	0,0473	0,389	8,218
7.	Tingkat Polusi	0,0435	0,359	8,245
8.	Jarak dari TPA	0,0929	0,756	8,134

Tabel 6. Hasil Perhitungan Nilai AHP Kriteria Potensi Lokasi Rumah Sakit

No.	Kriteria	Priority Vector	Bobot (%)
1.	Kepadatan Penduduk (KP)	0,2196	21,96
2.	Penggunaan Lahan (PL)	0,1478	14,78
3.	Fungsi Jalan (FJ)	0,2850	28,50
4.	Daerah Rawan Banjir (DRB)	0,0768	7,68
5.	Daerah Rawan Karhutla (DRK)	0,0871	8,71
6.	Tingkat Kebisingan (TK)	0,0473	4,73
7.	Tingkat Polusi (TP)	0,0435	4,35
8.	Jarak dari TPA (TPA)	0,0929	9,29



Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa potensi lahan untuk peruntukan lokasi pembangunan rumah sakit kelas A di Kota Palangka Raya didominasi oleh klasifikasi tidak sesuai (78,35%), kemudian klasifikasi sesuai (18,52%) dan klasifikasi sangat sesuai dengan luasan yang paling sedikit (3,13%). Persebaran klasifikasi kelas kesesuaian dengan 3 (tiga) kategori tersebar pada 5 (lima) kecamatan di Kota Palangka Raya dengan distribusi nilai yang berbeda-beda. Luasan potensi lahan untuk lokasi rumah sakit kelas di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Luas Potensi Lahan Untuk Lokasi Rumah Sakit Kelas A

No.	Klasifikasi	Luas (ha)
1.	Tidak Sesuai	223.540,95
2.	Sesuai	52.844,85
3.	Sangat Sesuai	8.926,52
<b>Total</b>		<b>285.312,32</b>

Luas kawasan untuk potensi lokasi rumah sakit pada Tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa luasan potensi lokasi rumah sakit untuk setiap kecamatan mempunyai potensi peruntukan dengan luas yang bervariasi. Untuk kelas kesesuaian dengan potensi tidak sesuai, memiliki luasan yang bernilai paling besar dengan persentase luasan sebesar 78,35% dari total luas Kota Palangka Raya. Sedangkan untuk kelas kesesuaian dengan potensi sesuai memiliki persentase luasan sebesar 18,52% dan potensi sangat sesuai sebesar 3,13% dari luas

Tabel 9. Luas Potensi Lahan Untuk Lokasi Rumah Sakit Kelas A Berdasarkan Batas Administrasi Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (ha)			Jumlah
		Tidak Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	
1.	Pahandut	5.280,33	5.727,54	960,75	11.968,62
2.	Sabangau	55.764,51	7.493,55	819,54	64.077,60
3.	Jekan Raya	25.904,66	11.318,39	1.529,47	38.752,52
4.	Bukit Batu	45.821,68	11.650,75	2.842,06	60.314,48
5.	Rakumpit	90.769,77	16.654,62	2.774,70	110.199,10
<b>Total</b>		<b>223.540,95</b>	<b>52.844,85</b>	<b>8.926,52</b>	<b>285.312,32</b>

total wilayah Kota Palangka Raya. Wilayah Kota Palangka Raya untuk potensi kesesuaian lokasi RS Kelas A dengan kelas kesesuaian sangat sesuai

dalam jumlah luasan yang sangat sedikit dan tersebar pada 5 (lima) kecamatan.

Kecamatan Pahandut memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya (kelas sangat sesuai 8%). Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan lingkungan yang memenuhi kriteria atau persyaratan terutama tersedianya jalan arteri primer, kepadatan penduduk sedang dan tersedianya lahan dengan penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Kecamatan Pahandut juga merupakan wilayah kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan tempat aktivitas ekonomi. Dengan jumlah penduduk kategori sedang dan tingkat aksesibilitas yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, bobot kriteria penentuan lokasi rumah sakit dari yang tertinggi hingga terendah adalah fungsi jalan (28,50%), kepadatan penduduk (21,96%), penggunaan lahan (14,78%), jarak dari

TPA (9,29%), rawan kebakaran hutan dan lahan (8,71%), daerah rawan banjir (7,68%), tingkat kebisingan (4,73%), dan tingkat polusi (4,35%).

Kedua, terdapat tiga klasifikasi potensi

lokasi pembangunan Rumah Sakit Kelas A di Kota Palangka Raya yaitu sangat sesuai (8.926,52 ha), sesuai (52.844,85 ha), dan tidak sesuai (223.540,95

ha). Kecamatan dengan lokasi potensi sangat sesuai paling tinggi adalah Luas potensi dengan kelas kesesuaian sangat sesuai untuk masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Bukit Batu (2.842,06 ha), disusul dengan Kecamatan Rakumpit (2.774,70 ha), Kecamatan Jekan Raya (1.528,47 ha), Kecamatan Pahandut (960,75 ha), dan Kecamatan Sabangau (819,54 ha). Kecamatan Pahandut memiliki potensi kesesuaian lahan yang lebih tinggi sebagai lokasi rumah sakit kelas A dibandingkan dengan kecamatan lainnya (kelas kesesuaian sangat sesuai 8%).

Dari hasil penelitian tersebut disampaikan saran-saran sebagai berikut. Pertama, dapat menambahkan kriteria yang lebih detail seperti variabel demografi, sosial, ekonomi, dan budaya (misalnya proyeksi jumlah penduduk berdasarkan usia, kondisi perekonomian penduduk dan perekonomian wilayah setempat, kajian terhadap kebiasaan atau budaya wilayah setempat). Kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap lokasi yang memiliki potensi sangat sesuai untuk menghasilkan informasi potensi lokasi yang lebih detail dalam penentuan lokasi rumah sakit, antara lain dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dan TOPSIS (Technique for Others Refence by Similarity to Ideal Solution) dengan mempertimbangkan serta memperhatikan isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini dan masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. (1996). *Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Bermutu*. Jakarta: Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia
- Barclay, G. (1984). *Teknik Analisa Kependudukan*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Retrieved 20 Mei 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2021). *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021*. Palangka Raya: CV. APP Digital Printing.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. (2021). *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2021*. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya.
- Bernhardsen. (2002). *Pengertian SIG Menurut Para Ahli*. Retrieved 20 Mei 2021, from seputar pengetahuan: <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/09/19-pengertian-sig-menurut-para-ahli.html>
- Chapin, Jr, F. Stuart dan Edward Kaiser. (1995). *Urban Land Use and Planning*. Fourth Edition. Illinois: University of Illinois Press.
- Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. (2019). *Profil Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2019*. Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Gistut. (1994). *Pengertian SIG Menurut Para Ahli*. Retrieved 20 Mei 2021, from seputar pengetahuan: <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/09/19-pengertian-sig-menurut-para-ahli.html>
- Hoover, E.M dan Giarratani. (2007). *Economics of Location*. Terjemahan oleh Nugroho dan Dahuri. Jakarta: Lembaga Penerbit.
- Lin, C. T., Wu, C. R., dan Chen, H. C. (2006). *Selecting the Location of Hospitals in Taiwan to Ensure a Competitive Advantage via GRA*. Journal of Grey System, 18(3).

# **PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INOVATIF, KREATIF, AKTIF (PIKA) YANG EFEKTIF DALAM MENINGKATKAN PRESTASI DAN MOTIVASI SISWA**

Oleh :

**Dr. Meitiana, MM; Dr. Roby Sambung, MM; Dr. Vivy Kristinae, M.Si**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya

## **LATAR BELAKANG**

Belajar merupakan proses aktif yang dilakukan oleh peserta didik dalam rangka membangun pengetahuannya. Belajar bukanlah proses pasif yang hanya menerima pengetahuan dari guru atau sumber-sumber lain. Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran sangat diperlukan karena ia merupakan subyek utama dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran berhubungan dengan bagaimana membelajarkan peserta didik atau bagaimana membuat peserta didik dapat belajar dengan mudah dan munculnya motivasi para peserta didik untuk mempelajari pelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam pembelajaran, bagi para praktisi pendidikan dituntut mengembangkan berbagai metode dan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat tercapai secara efektif, efisien dan menyenangkan. Dalam rangka mencapai hasil belajar yang maksimal maka diperlukan suatu konsep pembelajaran yang memadai dan relevan.

PIKA (Pembelajaran Inovatif, Kreatif, Aktif) dapat dijadikan metode alternatif dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif, efisien, menyenangkan dan jauh dari pembelajaran yang membosankan

peserta didik. Guru yang mampu berinovasi berarti menandakan guru tersebut bisa mengembangkan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Kemampuan utama yang harus dimiliki oleh para pendidik adalah dalam strategi pembelajaran. Artinya seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran yang akan diajarkannya, tetapi juga harus menguasai dan mampu mengajarkan pengetahuan tersebut pada peserta didik. Metode lebih penting dari pada materi, dan guru lebih penting dari pada metode dan materi.

Mengingat kondisi para pendidik dan calon pendidik, maka usaha untuk mendalami serta mengaplikasikan pembelajaran inovatif menjadi salah satu alternatif. Pembelajaran inovatif berimplikasi dapat meningkatkan strategi mengajar bagi guru itu sendiri dan strategi belajar bagi peserta didik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Merdeka Belajar memiliki 4 (empat) pokok gagasan sebagai upaya untuk menciptakan sistem & budaya pembelajaran serta pengajaran yang lebih efektif, pro-aktif, kreatif, inovatif, mandiri, kontekstual dan emansipatoris, serta senafas dan sebangun dengan perubahan global di dunia pendidikan saat ini. Sehingga untuk mencapai orientasi tersebut, Kemendikbudristek merasa perlu untuk memangkas hal-hal yang bersifat prosedural dan administratif yang dinilai

menghambat efektivitas dan esensi pembelajaran.

Gagasan ini memang sangat krusial dalam rangka melakukan transformasi pembelajaran menuju output dan outcome pendidikan Indonesia yang lebih baik dan maju. Gagasan serupa pernah masuk pada konsep dan metode pembelajaran seperti *Student Centered Learning* (SCL), *Contextual Teaching and Learning* (CTL), *Independent Learning*, *Emancipatory Learning*, *Innovative Teaching*, dan lain-lain. Sementara, gagasan tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered*) mengikuti prakarsa John Dewey sejak satu abad yang lalu.

Berbicara tentang pembelajaran yang “Merdeka”, seyogyanya kita juga tidak boleh melupakan model pembelajaran yang selama ini dijadikan sebagai pedoman para guru. Hanya saja, setiap guru harus mulai berani untuk melakukan inovasi serta perubahan dalam kultur pembelajaran. Dalam hal ini ada beberapa komponen penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- Pendekatan pembelajaran, yakni titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Secara teori ada dua jenis pendekatan, yaitu *student centered approach* dan *teacher centered approach*. Dalam “Merdeka Belajar” ini seharusnya lebih menekankan pendekatan yang berpusat pada siswa (*student-centered*).
- Strategi pembelajaran, yakni kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini ada dua jenis strategi pula, yakni *exposition-discovery learning* dan *group-individual learning*.
- Metode pembelajaran, yakni cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai

tujuan pembelajaran. Dalam “Merdeka Belajar”, mengutamakan metode diskusi, brainstorming, debat, simposium dan sejenisnya dibandingkan metode ceramah.

- Teknik dan Taktik Pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sementara taktik pembelajaran adalah gaya guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual.

### GAGASAN MERDEKA BELAJAR

Sejatinya merdeka belajar merupakan pembelajaran yang memberikan ruang kebebasan terhadap independensi dalam belajar, bersifat kontekstual dan dijalankan secara inovatif. Pembelajaran yang “Merdeka” juga diharapkan harus bersifat kontekstual. Dalam literatur pembelajaran dikenal konsep yang disebut dengan pengajaran dan pembelajaran kontekstual atau *contextual teaching and learning* (CTL). CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri.

Dalam perkembangannya, CTL memberi titik tekan pada cara berpikir tingkat tinggi (*high order thinking* – HOT), transfer pengetahuan lintas disiplin, serta pengumpulan, penganalisisan, pensintesisan informasi dan data dari berbagai sumber dan perspektif. Menurut Blanchard (2001), strategi CTL dapat membantu memenuhi kebutuhan masing-masing siswa yang berbeda, meliputi:

1. Menekankan pada pemecahan masalah

2. Menyadari perlunya pembelajaran dalam berbagai konteks
3. Mengajarkan siswa untuk memonitor dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri sehingga mereka menjadi pembelajar yang mandiri
4. Mengajar sesuai dengan keragaman konteks kehidupan siswa
5. Mendorong siswa untuk belajar dari satu sama lain dan bersama-sama menggunakan penilaian otentik.

Merdeka Belajar dapat juga menjadi indikator inovasi pembelajaran di era perkembangan teknologi saat ini melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dapat melibatkan siswa dengan berbagai jenis rangsangan pembelajaran berbasis aktivitas. Pemanfaatan Teknologi dapat menambah daya tarik penyajian materi, sehingga memacu para siswa dan guru untuk lebih banyak meleak media. Menurut (Subramani & Iyappan, 2018) ada beberapa jenis teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran inovatif antara lain:

1. **Voice Threads**; adalah layanan web yang memungkinkan pengguna mengunggah slide PowerPoint, video, foto dll dan menambahkan narasi suara untuk membuat presentasi multimedia.
2. **Bloggng**; adalah postingan publik. Disini siswa dapat diminta untuk mengirim catatan di blog kelas.
3. **Social Bookmarking**; adalah proses sederhana menyimpan alamat situs web di folder favorit di browser web kita untuk lebih mudah dicari/ ditemukan kembali.
4. **Siniar atau Podcast**; adalah serial rekaman yang diposting secara reguler secara daring.

Siniar adalah berbasis teknologi yang mirip dengan kuliah lisan. Keuntungan menggunakan siniar salah satunya adalah fleksibilitasnya untuk pengajaran.

5. **Screencast**; adalah cara yang efektif untuk berbagi ide dan konten untuk memperoleh umpan balik dari siswa. Screencasts dapat digunakan untuk menggambarkan proses, menjelaskan konsep tertentu, atau menyajikan presentasi PowerPoint dengan narasi dan unsur.

### PENERAPAN PIKA PADA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

Dari penjelasan di atas dapat menarik kesimpulan bahwa kehadiran Merdeka Belajar akan menumbuh kembangkan kembali kebebasan guru dan peserta didik yang selama ini terkesan hilang dan terbelenggu oleh kurikulum dan kebijakan yang sentralistik. Merdeka Belajar perlu adanya sinergi system praktik dilakukan guru dengan inovatif, kreatif dan aktif juga akan memberikan peluang bagi guru dan peserta didik untuk menggali segala potensi sumber daya manusia (SDM), potensi budaya dan potensi lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga menjadi kekuatan pendidikan yang bermuatan lokal.

Merdeka Belajar adalah sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk mengembalikan kebebasan guru dan peserta didik dalam proses belajar-mengajar. Selama ini, banyak guru dan siswa merasa terkekang oleh kurikulum yang terlalu kaku dan kebijakan sentralistik yang membatasi kreativitas dalam pembelajaran. Merdeka Belajar menawarkan kesempatan untuk mengubah paradigma pendidikan, memungkinkan guru dan peserta didik untuk lebih inovatif, kreatif, dan aktif dalam proses pembelajaran. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai konsep ini:

1. Membuka Ruang untuk Inovasi: Merdeka Belajar memberi guru kebebasan untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Mereka dapat menggunakan metode-metode yang lebih cocok dengan karakteristik dan kebutuhan siswa mereka. Hal ini memungkinkan eksperimen dan penemuan metode yang paling efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.
2. Kreativitas dalam Pembelajaran: Konsep Merdeka Belajar juga menggalakkan kreativitas dalam pembelajaran. Guru dapat menciptakan lingkungan di mana siswa dapat mengeksplorasi pemikiran kreatif mereka, mengembangkan proyek-proyek yang unik, dan mengejar minat mereka dengan lebih mendalam. Hal ini membantu siswa merasa lebih terlibat dan antusias dalam belajar.
3. Aktivitas yang Meningkatkan Partisipasi: Dengan pendekatan Merdeka Belajar, peserta didik diberikan lebih banyak tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Mereka diundang untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran mereka, merumuskan pertanyaan, mencari jawaban, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana mereka ingin belajar.
4. Pemahaman yang Mendalam: Dalam Merdeka Belajar, guru dan peserta didik memiliki fleksibilitas untuk mengejar pemahaman yang mendalam tentang topik yang diminati. Mereka tidak hanya harus mematuhi kurikulum yang baku, tetapi juga dapat menjelajahi topik dengan lebih mendalam sesuai minat dan motivasi mereka.
5. Sinergi Sumber Daya Manusia (SDM): Konsep Merdeka Belajar juga mengejar sinergi antara guru dan peserta didik sebagai sumber daya manusia. Guru dapat memotivasi

dan membimbing siswa untuk menggali potensi mereka secara maksimal, menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendalam.

6. Kemandirian Belajar: Dalam Merdeka Belajar, kemandirian belajar ditekankan. Peserta didik diajak untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, memahami gaya belajar mereka, dan mengelola waktu dan sumber daya secara efektif.

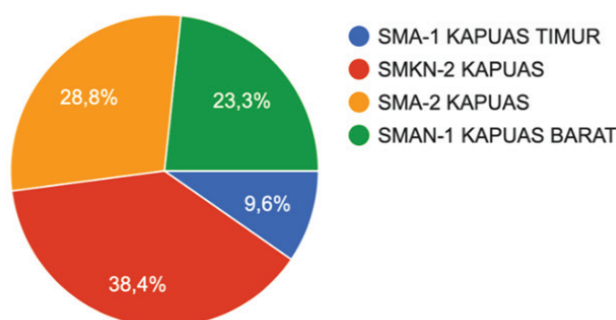
Konsep Merdeka Belajar mendorong pendekatan pendidikan yang lebih humanis, di mana peserta didik dan guru sama-sama dihormati dan dihargai sebagai individu yang memiliki potensi unik. Ini memberikan peluang bagi pembelajaran yang lebih dinamis, bermakna, dan relevan dengan dunia nyata, sambil memungkinkan pengembangan karakteristik positif dalam siswa, seperti kreativitas, inovasi, dan kemandirian belajar. Sinergi antara sistem praktik guru dengan pendekatan inovatif, kreatif, dan aktif akan membuka pintu menuju transformasi pendidikan yang lebih baik.

### HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan wawancara, kuesioner dari SMAN-2 KAPUAS, SMAN-1 KAPUAS BARAT, SMKN-2 KAPUAS dan SMAN-1 KAPUAS TIMUR. Hasil data langsung dan kuesioner yang dibagikan secara langsung:

Sekolah tempat bekerja:

73 jawaban

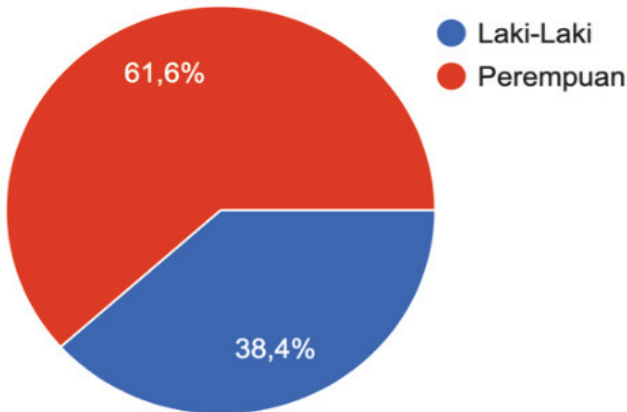




SMA-2 KAPUAS = 21 (28,8%)  
 SMAN-1 KAPUAS BARAT = 17 (23,3%)  
 SMKN-2 KAPUAS = 28 (38,4%)  
 SMA-1 KAPUAS TIMUR = 7 (9,6%)

### Jenis Kelamin

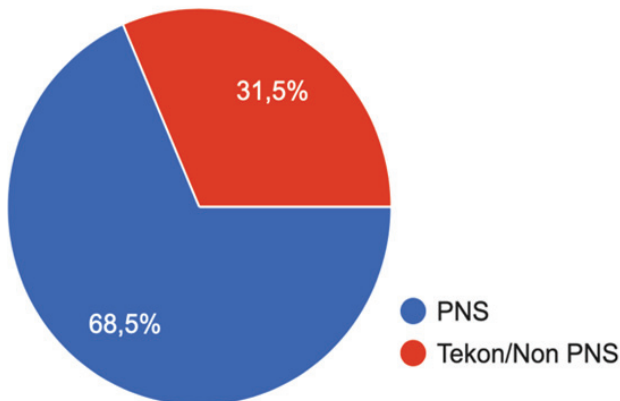
73 jawaban



Laki-Laki = 28 orang (38,4%)  
 Perempuan = 45 Orang (61,6%)

### Status Pegawai

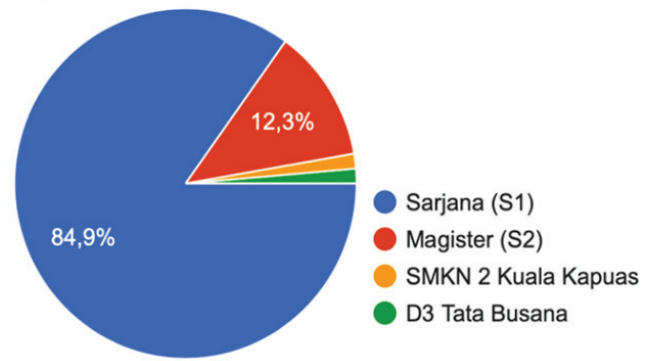
73 jawaban



Guru PNS = 50 orang (68,5%)  
 Guru Tekon/Non PNS = 23 (31,5%)

### Pendidikan Terakhir

73 jawaban



Sarjana = 62 (84,9%)  
 Magister = 9 (12,3%)  
 Dipoloma = 1 (1,4%)  
 SMKN 2 = 1 (1,4%)

### Pengertian Pembelajaran Inovatif, Kreatif, Inovatif

Perkembangan psikis peserta didik harus lebih baik dan disesuaikan dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan zaman yang sudah harus tersistem dengan apik. karena mindset saai itu seorang peserta didik dianggap telah belajar apabila dia dapat melakukan perbautan yang telah diajarkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah di set. Oleh karena itu memerlukan sebuah penilaian dan evaluasi yang terintegrasi akurat, tepat sasaran, dan efektif.

Pembelajaran inovatif juga mengandung arti pembelajaran yang dikem as oleh guru atau instruktur lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar. Pembelajaran Inovatif, Kreatif, Aktif (PIKA) bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. “Learning is fun” merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal ini di pikirannya tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas, perasaan tertekan, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan,

dan tentu saja rasa bosan. Membangun metode pembelajaran inovatif sendiri bisa dilakukan dengan cara diantaranya mengukur daya kemampuan serap ilmu masing-masing orang. Siswa dengan karakteristik semacam ini dapat menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam tim yang beraneka ragam, untuk memainkan fleksibilitas dan kemampuan berdiskusi dalam mencapai tujuan bersama.

### **Ciri – ciri dalam Pembelajaran Inovatif, Kreatif, Aktif (PIKA)**

Menurut hasil analisis menyebutkan suatu model mengajar dianggap baik apabila memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Memiliki prosedur yang sistematis untuk memodifikasi perilaku siswa
- b. Hasil belajar yang ditetapkan secara khusus yaitu: perubahan perilaku positif siswa
- c. Penetapan lingkungan belajar secara khusus dan kondusif
- d. Ukuran keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran sehingga bisa menetapkan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar.
- e. Interaksi dengan lingkungan agar mendorong siswa lebih aktif dalam lingkungannya.

### **Konsep Dasar Pembelajaran Inovatif, Kreatif, Aktif (PIKA)**

Perubahan pada tahap awal para guru memiliki motivasi dan sikap ingin berubah untuk mendapatkan sesuatu yang baru, karena inti dari pengertian inovasi itu sendiri adalah guru harus memiliki sikap kreatif. Kreatif dalam artian merespon berbagai perubahan yang ada, karena setiap adanya perubahan akan selalu diiringi oleh berbagai cara untuk melaksanakannya

proses belajar mengajar.

Menanggapi perubahan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesadaran seseorang terhadap kekurangan cara yang dimilikinya seperti dalam kegiatan belajar mengajar, mulai dari penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan pendekatan, media, metode, dan sistem penilaian. bahwa inovasi yang dilakukan oleh seorang guru lebih ditekankan pada kegiatan mengajar, karena ia diserahi tugas dan wewenang mengelola kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini kegiatan guru lebih dari pekerjaan seorang profesional umumnya, karena ia dituntut bukan hanya ahli pada bidangnya tetapi juga harus mampu mengelola pembelajaran dalam lingkungan proses belajar mengajar.

### **Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Inovatif, Kreatif, Aktif (PIKA)**

Adapun keunggulan dan kekurangan pembelajaran inovatif sebagai berikut:

Kelebihan pembelajaran Pembelajaran Inovatif, Kreatif, Aktif (PIKA), sebagai berikut:

1. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan.

Pembelajaran inovatif melatih siswa untuk berpikir kreatif sehingga siswa mampu memunculkan ide-ide baru yang positif. Di dalam pembelajaran ini siswa dapat mengembangkan kreatifitasnya, sehingga bisa menemukan hal-hal baru di era globalisasi ini.

2. Menuntut kreatifitas guru dalam mengajar.

Dalam hal ini guru dituntut untuk tidak monoton, maksudnya guru harus memunculkan inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran. Kreatifitas guru sangat diperlukan agar proses

pembelajaran tidak membosankan.

3. Hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Guru dan siswa bersama-sama membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran bisa terwujud.
4. Merangsang perkembangan kemajuan berfikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Pembelajaran inovatif akan membuat siswa berfikir kritis dalam menghadapi masalah.
5. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Dunia pendidikan akan lebih berwarna, tidak monoton dan akan terus berkembang menjadi semakin baik. Hal ini akan mempengaruhi dunia kerja yang nantinya akan dijalani setiap orang.
6. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar dapat efektif dan efisien.

Siswa harus bisa menempatkan diri dengan baik, siswa tidak boleh hanya diam tapi harus berusaha memotivasi dirinya sendiri agar berkembang. Pembelajaran inovatif kreatif aktif, akan membangkitkan semangat siswa untuk menjadi yang terbaik.

Kelemahan pembelajaran inovatif kreatif aktif sebagai berikut:

1. Siswa yang kurang aktif dalam proses belajar akan semakin tertinggal
2. Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain
3. Kurangnya kreatifitas guru

Masih banyaknya rasio guru yang mengajar dengan cara lama atau monoton sehingga menimbulkan suasana kelas yang membosankan. Hal ini akan membuat siswa jenuh dan tidak tertarik dengan materi yang disampaikan. Padahal dalam proses pembelajaran kreatifitas guru sangat dibutuhkan. Hal ini akan mendorong siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar.

### **Kekuatan dan Peluang Penerapan Pembelajaran Inovatif, Kreatif, Aktif (PIKA)**

Sejalan dengan reformasi sistem pendidikan di Indonesia, perlu dibicarakan tentang berbagai isu yang terkait dengan proses dan dinamika di ranah pendidikan itu sendiri. Salah satu tindak lanjut dari reformasi Pendidikan tersebut adalah melalui sebuah inovasi di bidang pendidikan yang dinamakan dengan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar adalah memberikan kemerdekaan kepada setiap satuan pendidikan untuk melakukan inovasi. Pada hakekatnya, Merdeka Belajar hadir untuk menggali potensi yang ada pada guru, sekolah dan peserta didik untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan yang sudah ada, tetapi yang sangat diperlukan adalah kegiatan untuk berinovasi. Guru dan peserta didik diberi kebebasan untuk mengakses ilmu pengetahuan, serta metode pembelajaran yang berdiferensiasi.

Penerapan Pembelajaran Inovatif, Kreatif, Aktif (PIKA) memiliki berbagai kelebihan, kekuatan, dan peluang yang dapat memberikan manfaat signifikan dalam konteks pendidikan. Berikut adalah penjabaran tentang kelebihan, kekuatan, dan peluang penerapan PIKA:

## **Kelebihan Pembelajaran Inovatif Kreatif dan Aktif**

1. Meningkatkan Keterlibatan Siswa: PIKA mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas seperti proyek-proyek, permainan, diskusi, dan demonstrasi, yang membantu meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka.
2. Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis: Metode PIKA mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis. Mereka diajak untuk memecahkan masalah, membuat hubungan, dan mengaitkan konsep-konsep yang mereka pelajari, yang membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka.
3. Pemberian Konteks dan Relevansi: PIKA seringkali memadukan pembelajaran dengan konteks dunia nyata, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan aplikabilitas pengetahuan mereka. Ini membantu mereka memahami mengapa mereka mempelajari materi tertentu dan bagaimana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kreativitas dan Inovasi: Metode PIKA mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka. Mereka diberi kebebasan untuk merancang proyek, eksperimen, atau solusi yang unik, yang dapat menghasilkan inovasi dalam pemecahan masalah dan pemahaman konsep.
5. Pembelajaran Kolaboratif: PIKA sering melibatkan kerja sama antara siswa. Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan belajar dari satu sama lain. Siswa dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman, yang memperkaya pembelajaran mereka.

## **Kekuatan Pembelajaran Inovatif Kreatif Aktif.**

1. Fleksibilitas: PIKA dapat diadaptasi untuk berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Metodenya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kelas atau siswa tertentu.
2. Meningkatkan Retensi Pengetahuan: Aktivitas PIKA yang interaktif dan berorientasi pada siswa dapat membantu meningkatkan retensi pengetahuan. Siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran lebih cenderung mengingat informasi dengan baik.
3. Menyediakan Umpan Balik: PIKA memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang lebih terfokus dan langsung kepada siswa. Hal ini membantu siswa untuk memahami kelemahan mereka dan meningkatkan kinerja mereka.

## **Peluang Sekolah perlu dalam Penerapan Pembelajaran Inovatif Kreatif Aktif.**

1. Teknologi Pendidikan: Kemajuan dalam teknologi pendidikan telah membuka peluang baru untuk penerapan PIKA, seperti pembelajaran berbasis daring, aplikasi pembelajaran interaktif, dan platform kolaboratif.
2. Kebutuhan Pendidikan Holistik: PIKA mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Penerapannya relevan untuk pendidikan holistik yang melibatkan aspek kognitif, sosial, dan emosional siswa.
3. Peningkatan Partisipasi Siswa: Dengan metode PIKA, sekolah dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan

dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

4. Memenuhi Tantangan Pendidikan Masa Depan: Masa depan pendidikan mungkin menghadapi tantangan baru, seperti perubahan teknologi, tantangan lingkungan, dan kebutuhan untuk pembelajaran sepanjang hayat. PIKA dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini.

Penerapan PIKA dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk masa depan, dan mendorong pengembangan keterampilan yang relevan. Kelebihan, kekuatan, dan peluang yang terkait dengan PIKA memungkinkan pendidikan yang lebih dinamis, berorientasi pada siswa, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

## OUTLINE HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pembelajaran Inovatif, Kreatif dan Aktif (PIKA), sebagai tujuan dan dasar pada pembelajaran inovatif adalah strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran inovatif melibatkan penggunaan media pembelajaran yang inovatif seperti teknologi dan alat bantu visual untuk membantu siswa memahami konsep pembelajaran dengan lebih baik. Dalam hal ini, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif. Begitu juga dengan pembelajaran kreatif dapat meningkatkan prestasi siswa, dari hasil penelitian beberapa unsur yang penting pada guru sebagai berikut:

1. Komitmen Pekerjaan: Komitmen pekerjaan adalah faktor kunci yang memengaruhi

produktivitas dan kinerja pegawai. Dalam konteks penelitian pembelajaran inovatif, kreatif, dan aktif, komitmen pekerjaan dapat mengindikasikan sejauh mana pegawai terlibat secara emosional dan motivasional dalam melaksanakan tugas-tugas inovatif. Pegawai yang memiliki komitmen pekerjaan yang tinggi lebih cenderung berkontribusi secara aktif dalam proses pembelajaran inovatif.

2. Creative Self Efficacy (Keyakinan Diri pada Kreativitas): Keyakinan diri individu dalam kemampuan mereka untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif adalah aspek penting dalam konteks pembelajaran inovatif. Jika pegawai memiliki keyakinan diri yang tinggi terkait dengan kemampuan kreatif mereka, mereka lebih mungkin untuk mencoba hal-hal baru, berpikir out-of-the-box, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang inovatif.
3. Perilaku Kerja Inovatif: Perilaku kerja inovatif adalah tingkah laku yang ditunjukkan oleh pegawai dalam menciptakan dan menerapkan ide-ide baru atau solusi yang inovatif dalam pekerjaan mereka. Ini adalah hasil dari kombinasi dari komitmen pekerjaan dan keyakinan diri pada kreativitas. Pegawai yang berkomitmen dan memiliki keyakinan diri pada kreativitas mereka cenderung lebih aktif dalam melakukan perilaku kerja inovatif, seperti berkolaborasi untuk menciptakan solusi baru.
4. Kreativitas Pegawai: Kreativitas adalah sumber daya utama dalam pembelajaran inovatif. Kreativitas pegawai menciptakan landasan untuk ide-ide baru, inovasi, dan pemecahan masalah yang efektif. Dalam penelitian pembelajaran inovatif, kreativitas pegawai dapat menjadi pendorong utama untuk menghasilkan metode, kurikulum, atau

pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik.

5. Peran Penting Teknologi dalam Mendukung Pekerjaan: Peran teknologi dan keahlian dalam menggunakan teknologi sangat penting dalam mendukung pekerjaan guru di SMAN 2 Kapuas, SMKN 2 Kapuas, SMAN 1 Kapuas Barat dan SMAN 1 Kapuas Timur, dalam mengimplementasikan pembelajaran inovatif, kreatif, dan aktif (PIKA). Teknologi memberikan alat yang kuat dan sumber daya tambahan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan relevan.

### PENUTUP

Dalam rangka mencapai pembelajaran inovatif, kreatif, dan aktif, teknologi adalah alat

yang sangat berharga. Guru yang mahir dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dapat menciptakan pengalaman yang lebih menarik, berpusat pada siswa, dan relevan dengan zaman. Keahlian dalam menggunakan teknologi juga memungkinkan guru untuk lebih efisien dalam pekerjaan mereka dan mendukung pengembangan keterampilan 21st century pada siswa. Jadi, kesemuanya adalah komponen yang saling terkait dan berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran inovatif, kreatif, dan aktif (PIKA) di SMAN-1 Kapuas Timur, SMKN-2, SMAN-2 Kapuas, SMAN-1 Kapuas Barat. Kombinasi dari komitmen pekerjaan, keyakinan diri pada kreativitas, perilaku kerja inovatif, dan kreativitas pegawai dapat menghasilkan proses pembelajaran yang lebih dinamis dan hasil yang lebih baik dalam konteks pembelajaran inovatif.

### FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



# POTENSI DAN PRIORITAS INDUSTRI KREATIF SKALA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

## (THE POTENTIAL AND PRIORITIES FOR CREATIVE INDUSTRIES OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY)

Oleh :

**Maria Christina Yuli Pratiwi**

Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Email: mcy.pratiwi@yahoo.co.id

Jl. Jenderal Sudirman Km. 5,5, Sampit

### Abstrak

Kegiatan ekonomi kreatif merupakan upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas, bakat dan kemampuan individu. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku industri kreatif yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Melalui ide dan gagasan yang kreatif dan inovatif, produk-produk UMKM berpotensi besar untuk dikembangkan sehingga mampu bersaing di pasar domestik dan internasional. Studi ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan prioritas industri kreatif serta mengidentifikasi sub sektor unggulan industri kreatif; juga memuat strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, pengisian kuisisioner, dan dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan Analisis Kuadran (IPA), Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Analisis SWOT, hasil studi menunjukkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi ekonomi kreatif khususnya dalam sub sektor kuliner; kerajinan, fesyen, seni pertunjukan, fotografi, desain produk, dan penerbitan. Hasil analisis kuadran (IPA) dan AHP menunjukkan bahwa sub sektor kuliner dan kriya (kerajinan) tergolong dalam kategori unggul dan sub sektor prioritas, sementara sub sektor fesyen, fotografi, desain produk, seni pertunjukan, dan penerbitan tergolong dalam

*kategori tertinggal. Kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memperkuat dimensi ekonomi kreatif adalah: (i) Memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam ekonomi kreatif; (ii) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan masing-masing sub sektor ekonomi kreatif; (iii) Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal dalam upaya memperkuat karakter budaya lokal pada produk-produk ekonomi kreatif; (iv) Mendorong diversifikasi produk yang dihasilkan unit usaha pada masing-masing sub sektor; (v) Menjamin kejelasan dan kemudahan dalam proses pengurusan ijin usaha ekonomi kreatif; (vi) Memberikan akses terhadap sumber-sumber pendanaan sub sektor ekonomi kreatif; (vii) Memfasilitasi promosi produk-produk sub sektor ekonomi kreatif; (viii) Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait penggunaan teknologi informatika bagi pelaku sub sektor ekonomi kreatif; (ix) Menginisiasi penyusunan regulasi dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi kreatif; dan (x) Memfasilitasi pemberian apresiasi kepada pelaku sub sektor ekonomi kreatif.*

Kata kunci :

*Prioritas, Potensi, Komoditas Unggulan, Industri Kreatif, UMKM, Kabupaten Kotawaringin Timur*

**Abstract**

*Creative economic activity is an effort to develop a sustainable economy through creativity, talent and individual ability. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are creative industry actors who play a major role in supporting the national economy. Through creative and innovative ideas, MSME products have a great potential to be developed so that can compete in the domestic and international markets. The purpose of this study was to determine the potential and priorities of the MSME creative industry and identify the leading sub-sectors of the creative industry in Kotawaringin Timur Regency; also includes a strategy for developing the creative economy in the Kotawaringin Timur Regency. Using a quantitative descriptive approach with data collection methods in the form of In-Depth Interviews, Questionnaires, and documentation, also using Quadrant Analysis (IPA), Analytical Hierarchy Process (AHP) and SWOT Analysis, the results of the study show that Kotawaringin Timur Regency has creative economic potential, especially sub-sectors in the culinary, craft, fashion, performing arts, photography, product design, and publishing. The results of the IPA and AHP analysis show that sub-sectors of culinary and craft are superior and priority, meanwhile sub-sectors of fashion, photography, product design, Performing Arts, and publishing is categorized into the lagging sub-sectors. To strengthen dimensions of the creative economy, Kotawaringin Timur Regency Government can take a couple policies are: (i) Strengthening and improving the quality of human resources involved in the creative economy; (ii) Creating a conducive business climate for the development of each sub-sector of the creative economy; (iii) Increasing the use of local raw materials in an effort to strengthen the character of local culture in creative economy products; (iv) Encouraging product diversification which produced by business units in each sub-sector; (v) Ensuring clarity and convenience in the process of obtaining business permits for the creative economy actors; (vi) Providing access to sources of funding sub-sector of the creative economy; (vii) Facilitating the promotion of*

*products the creative economy sub-sector; (viii) Providing assistance and guidance related to the use of information technology for the creative economic sub-sector actors; (ix) Initiating the preparation of regulations that can support the development of the creative economy; and (x) Facilitating the appreciation of the creative economy sub-sector.*

*Keywords:*

*Priorities, Potentials, Leading Commodities, Creative Industries, MSMEs, Kotawaringin Timur Regency*

**PENDAHULUAN**

Perekonomian dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mana akan terjadi banyak perubahan fundamental di berbagai bidang dan tatanan kehidupan global. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan produksi di industri, yang mana seluruh proses produksi menggunakan internet sebagai penopang utama ([www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan\\_media](http://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media), akses 05 Juli 2023). Gelombang revolusi industri 4.0 menyebabkan pergeseran ekonomi dari era pertanian ke era informasi yang ditandai dengan berkembangnya kreativitas dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Perubahan ekonomi atau revolusi ekonomi menghasilkan dunia tanpa batas (borderless) dengan salah satu dampaknya adalah munculnya pasar bebas. Pasar bebas adalah perdagangan antar individu atau perusahaan di Negara berbeda tanpa adanya hambatan (Hoddemah & Rolianah, 2018: 255). Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau AEC (*Asean Economic Community*) merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan mengatasi



masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dengan diberlakukannya MEA, negara-negara anggota ASEAN akan mengalami Free Trade Area (FTA) atau area perdagangan bebas, penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja terampil dan pasar modal yang bebas.

Dalam rangka menghadapi era pasar bebas dengan tingkat persaingan yang ketat dan kompetitif, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya dituntut untuk memiliki suatu kegiatan usaha, namun harus mempunyai ciri khas serta mampu untuk menemukan inovasi dan kreativitas baru dalam usahanya. Ekonomi kreatif adalah solusi kreatif terhadap masalah dan peluang dalam menghadapi era pasar bebas global MEA. Ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh Howkins (2002) dalam bukunya yang berjudul *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Menurut Howkins, ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang mengandalkan gagasan, ide, atau kreativitas dari sumberdaya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Di Indonesia, ekonomi kreatif (ekraf) mulai dikembangkan pada Tahun 2006. Menurut Departemen UMKM Bank Indonesia (2015:1), ekonomi kreatif merupakan hasil transformasi struktur perekonomian dunia yang mana terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi dari berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sumber daya manusia dan dari era pertanian menjadi era industri serta informasi. Salah satu penerapan dan perkembangan konsep ekonomi kreatif di Indonesia adalah didirikannya Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada Tahun 2015 yang saat

ini menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Ekonomi kreatif juga berperan sebagai sumber kekuatan baru dan tulang punggung (backbone) perekonomian Indonesia di era digital karena mampu menciptakan nilai tambah (value added) dan menguatkan citra dan budaya Indonesia (Sukarno et.al., 2020: 157). Nilai tambah yang dihasilkan dari sektor ekonomi kreatif mengalami peningkatan setiap tahun dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata sumbangan sektor ekonomi kreatif terhadap PDB nasional sebesar 7,1 persen dan nilai tambah yang dihasilkan tidak kurang dari Rp 716,7 triliun (Wiradharma et.al., 2021: 48). Berdasarkan data publikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Tahun 2010-2020, angka PDB sektor ekonomi kreatif terus meningkat seiring dengan tren kontribusinya terhadap perekonomian nasional yang juga positif. Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB nasional Tahun 2010 sebesar Rp 525,26 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp 1.155,4 triliun rupiah pada Tahun 2020 atau 7,48 persen terhadap PDB nasional. Sektor ekonomi kreatif juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 19,01 juta orang dan kontribusi ekspor bruto sebesar 19,68 miliar dollar AS dengan dominasi terbesar berasal dari subsektor fashion, kuliner, dan kriya. Ketiga subsektor tersebut mampu menyumbang US\$ 19,65 miliar dari US\$ 19,68 miliar total ekspor ekonomi kreatif.

Berbagai capaian sektor ekonomi kreatif di Indonesia merupakan momentum untuk terus meningkatkan size ekonomi kreatif Indonesia sekaligus menambah optimisme bahwa ekonomi kreatif dapat menjadi mesin ekonomi terbaru di masa mendatang. Justifikasi tersebut bukanlah berlebihan mengingat kekuatan ekonomi kreatif nasional telah menorehkan beberapa prestasi di

tingkat internasional. Hal ini terbukti dengan munculnya novel karya Andrea Hirata yang sangat laris dan dibuat sekuel film sehingga menghidupkan perekonomian di Belitung. Sementara itu, ekspansi-ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Nadiem Makarim dengan Gojek telah merambah Vietnam dan Singapura. Terdapat juga Kota Bandung dengan distro atau factory outlet-nya, Kota Jember dengan Jember Fashion Festival dan Kota Yogyakarta memiliki jalan Malioboro yang terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan dan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja.

Pasca terpuruk akibat pandemi COVID-19, ekonomi kreatif di Indonesia terus berjuang menjadi garda terdepan mengambil bagian dalam momentum bangkitnya perekonomian nasional. Menurut data BPS, terdapat 11,53 juta orang (5,53 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari 0,96 juta orang pengangguran, 0,55 juta orang Bukan Angkatan Kerja (BAK), 0,58 juta orang tidak bekerja, dan 9,44 juta orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Keadaan tersebut sejalan dengan jumlah pengangguran yang meningkat 37,49 persen pada periode Agustus 2020 sebanyak 9.767,75 orang dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama. Sementara itu, berdasarkan survei *Asian Development Bank* (ADB) terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, 88 persen usaha mikro kehabisan kas atau tabungan dan lebih dari 60 persen usaha mikro kecil telah mengurangi jumlah tenaga kerja (Arianto, 2020: 234). Hal ini membuat para pelaku UMKM berbasis ekonomi kreatif dituntut melakukan perubahan terkait pemasaran produk secara daring dengan memanfaatkan fasilitas online. Namun tidak semua para pelaku UMKM memahami teknologi metode daring

sehingga tidak sedikit usaha kreatif pada awal-awal pandemi berlangsung terpaksa gulung tikar karena minimnya permintaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM melalui sumber daya digital seperti memanfaatkan berbagai platform komunikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan Skype (Caballero-Morales, 2021: 8).

Ekonomi kreatif mampu mendorong para pelaku usaha untuk memasarkan produk lokal secara global dan meningkatkan daya saing di pasar internasional (Bappeda Kota Semarang, 2021: 2). Salah satu pilar utama ekonomi kreatif dalam menghadapi tingkat persaingan yang ketat dan kompetitif di era digital adalah industri kreatif (Irawan, 2015:1). Menurut Sumartik. & Larassaty (2016:337), industri kreatif merupakan industri yang dalam operasionalnya sangat dominan dalam mensinergikan pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya inovasi. Klasifikasi industri kreatif yang ditetapkan oleh setiap Negara berbeda-beda, tergantung pada tujuan analitik dan potensi Negara tersebut. Berdasarkan konsep ekonomi kreatif yang dipublikasikan oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), secara makro perekonomian kreatif diklasifikasikan menjadi 17 subsektor, yaitu: (1) kuliner; (2) arsitektur; (3) desain produk; (4) desain interior; (5) desain komunikasi visual; (6) pengembang permainan; (7) film, animasi dan video; (8) musik; (9) fashion; (10) seni pertunjukan; (11) aplikasi dan game; (12) kriya; (13) televisi dan radio; (14) seni rupa; (15) periklanan; (16) fotografi; dan (17) penerbitan. Industri kreatif memiliki potensi besar untuk dikembangkan, karena: (i) memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan seperti peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekspor; (ii) menciptakan iklim bisnis positif yang berdampak pada sektor lain; (iii) membangun citra dan identitas bangsa seperti turisme, ikon Nasional,

membangun budaya, warisan budaya, nilai lokal; (iv) berbasis kepada sumber daya yang terbarukan seperti ilmu pengetahuan dan peningkatan kreatifitas; (v) menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa; dan (vi) dapat memberikan dampak sosial yang positif seperti peningkatan kualitas hidup dan toleransi sosial.

Studi yang berkaitan dengan industri kreatif telah banyak dilakukan baik di tataran dalam maupun diluar negeri. Akhmad & Hidayat (2015) melakukan studi pemetaan potensi dan penentuan industri kreatif unggulan di Madura berdasarkan variabel-variabel Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan diperoleh hasil, bahwa: (1) subsektor Kerajinan; (2) subsektor Desain Fashion; dan (3) subsektor Video, Film dan Fotografi merupakan tiga subsektor industri kreatif unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Madura. Studi serupa dilakukan oleh Nugraha et.al., (2017) dengan menggunakan metode analisis SWOT dan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui observasi secara langsung dan hasil *indepth interview*. Hasil studi menyimpulkan bahwa potensi, kelemahan, dan ancaman yang terdapat pada UMKM kreatif di Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai acuan dalam strategi pengembangan dan pembangunan UMKM kreatif dan wisata lokal dalam jangka panjang. Tidak berbeda dengan studi sebelumnya, Kustanto (2018) melakukan identifikasi sub sektor ekonomi kreatif unggulan di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan Analisis Kuadaran atau *Importance Performance Analysis* (IPA). Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa ekonomi kreatif Kabupaten Sidoarjo terbagi ke dalam empat kategori yaitu: (1) kategori unggul:

kuliner, fashion, desain produk, dan seni rupa; (2) kategori potensial: arsitektur dan kerajinan kriya.; (3) kategori prospektif: desain interior, film animasi dan video, aplikasi dan games, musik, serta televisi dan radio; serta (4) kategori tertinggal: fotografi, periklanan, penerbitan, desain grafis, dan seni pertunjukkan.

Studi terkait industri kreatif di Provinsi Banten juga dilakukan oleh Setyadi & Budiarto (2020) menggunakan metode diskriptif kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam terhadap pelaku industri kreatif. Dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) diperoleh hasil bahwa subsektor Kriya, Fashion, dan Kuliner merupakan subsektor industri kreatif prioritas di Provinsi Banten. Abisuga Oyekunle & Sirayi (2018) juga melakukan studi serupa terhadap peran industri kreatif sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan di Afrika Selatan. Menggunakan eksplorasi literatur tentang industri kreatif, nilai industri, implikasi dan strategi pembangunan, lingkungan kebijakan dan tantangan yang mempengaruhi industri, hasil studi menyimpulkan bahwa industri kreatif merupakan kelompok kewirausahaan yang mempengaruhi ekonomi berkelanjutan suatu Negara. Tidak berbeda dengan Gouvea & Vora (2018) yang melakukan studi untuk menilai stabilitas pendapatan ekspor produk kreatif dari 57 negara selama periode 2003-2011. Metode yang digunakan adalah Model Indeks Tunggal (SIM) dan hasil studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besar dalam kinerja ekspor 57 Negara selama periode pengamatan. Beberapa kategori produk kreatif dari 57 Negara tersebut menawarkan manfaat yang lebih baik dalam upaya menstabilisasi pendapatan ekspor Negara.

## METODE

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan didukung data kualitatif untuk mengetahui potensi dan prioritas industri kreatif skala mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Data yang digunakan dalam studi ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan alat instrumen berupa kuisisioner didukung dengan kondisi eksisting di lapangan berupa foto-foto, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan data yang relevan yang diperoleh dari instansi terkait.

Pendekatan non probability sampling digunakan dalam studi ini dalam menentukan sampel, yaitu pemilihan responden yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang diperoleh dari pelaku UMKM di 10 (sepuluh) kecamatan sebagai sampel, yaitu Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Seranau, Cempaga, Kota Besi, Telawang, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut dan Teluk Sampit dengan periode amatan dari bulan Oktober 2021 sampai bulan November 2021.

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) atau Analisis Kuadran, *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dan Analisis SWOT. Desain pengambilan sampel pada studi ini menggunakan teknik purposive sampling karena responden dalam metode AHP adalah expertise/pakar yang memiliki kepakaran dan keterlibatan dalam kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah (Sandriana et.al., 2015:93). Proses pengolahan data dan analisis data dilakukan

melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Pada studi ini, digunakan beberapa variabel yang berperan dan memberi pengaruh kepada sasaran yang dicapai dengan penjabaran sebagai mana di tunjukkan dalam tabel 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Ekonomi Kreatif dan Pelaku UMKM Ekonomi Kreatif di Indonesia

Ekonomi kreatif mulai dikembangkan di Indonesia pada Tahun 2006 dan geliatnya semakin menguat setelah diselenggarakannya Pekan Produk Budaya Indonesia pada Tahun 2007 yang kemudian berubah menjadi Pekan Produk Kreatif Indonesia pada Tahun 2009. Keyakinan akan masa depan sektor ekonomi kreatif membuat Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF. BEKRAF merupakan lembaga non kementerian yang bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan bertugas membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dibidang ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif di Indonesia mampu memberikan kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Sepanjang Tahun 2010-2019, angka PDB sektor ekonomi kreatif terus meningkat seiring dengan tren kontribusi terhadap perekonomian nasional yang juga positif. PDB ekonomi kreatif terus meningkat hingga mencapai Rp. 1.153,4 triliun pada Tahun 2019 dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor kuliner 41,47 persen, fesyen 1768

**Tabel 1.** Indikator dan Variabel Penelitian

SASARAN	INDIKATOR	VARIABEL
Identifikasi Potensi Dan Prioritas Industri Kreatif Skala Mikro, Kecil, dan Menengah	SDM, Bahan baku, Industri, Pembiayaan/Modal, Akses dan Perluasan Pasar, Teknologi dan Infrastruktur, serta Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• X1 = aktor pada subsektor</li> <li>• X2 = tingkat kompetensi SDM</li> <li>• X3 = lembaga pendidikan</li> <li>• X4 = perlindungan tenaga kerja</li> <li>• X5 = aspek material bahan baku</li> <li>• X6 = aspek originalitas bahan baku</li> <li>• X7 = jenis produk yang dihasilkan</li> <li>• X8 = kuantitas dan sebaran usaha</li> <li>• X9 = sumber pembiayaan/modal</li> <li>• X10 = akses pemasaran</li> <li>• X11 = kegiatan promosi</li> <li>• X12 = perkembangan IT</li> <li>• X13 = infrastruktur</li> <li>• X14 = aspek regulasi</li> <li>• X15 = aspek apresiasi</li> <li>• X16 = aspek partisipasi</li> </ul>
Penentuan Strategi Pengembangan Industri Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuatan (<i>Strengths</i>)</li> <li>• Kelemahan (<i>Weakness</i>)</li> <li>• Peluang (<i>Opportunities</i>)</li> <li>• Ancaman (<i>Threats</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuatan: unik dan berbasis kearifan lokal, tenaga kerja terampil, daya saing, dan nilai tambah</li> <li>• Kelemahan: kualitas SDM, kreativitas dan inovasi, modal dan bahan baku, HKI, pola kemitraan, teknologi, manajemen usaha, dan pemasaran</li> <li>• Peluang: dukungan Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat lokal</li> <li>• Ancaman: persaingan antar UMKM dan keberadaan pelaku usaha luar daerah</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis (2021)

persen, dan kriya 14,99 persen (Kemenparekraf, 2020: 134). Namun di Tahun 2020, nilai PDB ekonomi kreatif mengalami kontraksi sebesar 1,6 persen akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, PDB ADHB ekonomi kreatif Tahun 2018-2020 mengalami tren positif walaupun sempat mengalami pertumbuhan -2,39 persen di Tahun 2020.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM), jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada Tahun 2018 sebanyak 64,19 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,07

persen atau Rp. 8.573 triliun melalui pembayaran pajak. Daya serap tenaga kerja UMKM mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia. UMKM mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi terutama pasca krisis ekonomi (Novita & Siregar, 2015:124), serta menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi (Ananda & Susilowati, 2017:120).

Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) menyebutkan bahwa UMKM yang berkembang saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta, dan industri pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif. Sektor industri kreatif diyakini mampu bertahan ketika

berbagai sektor lain dilanda krisis keuangan global. Oleh karena itu, pemerintah mulai melirik industri kreatif sebagai alternatif roda penggerak ekonomi yang akan terus berputar dan berpotensi untuk dikembangkan karena bermanfaat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan.

**B. Potensi UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu wilayah penting dan strategis di Kalimantan Tengah. Kabupaten dengan luas wilayah 16.796 Km2 memiliki sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam serta berbagai kegiatan berbasis perkebunan, pariwisata, perikanan, industri, pertanian dan peternakan. Selain didukung potensi alam yang cukup besar, Kotawaringin Timur memiliki sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan dan menggerakkan

ekonomi kreatif. Wilayah ini memiliki jumlah UMKM terbesar se-Kalimantan, yaitu 31.838 UMKM (Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 dan <https://sampit.prokal.co/read/news/27408-jumlah-umkm-di-kotim-terbesar-se-kalimantan.html>, akses 03 Oktober 2020.). Hasil survey yang dilakukan terhadap 61 pelaku UMKM di 10 kecamatan diperoleh bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki produk-produk lokal yang berpotensi besar untuk dikembangkan, seperti gula semut, kopi, Virgin Coconout Oil (VCO), teh bajakah, olahan nanas (sirup dan selai nanas), kerupuk amplang, kerupuk udang, eco printing, kerajinan rotan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Timur cukup inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki. Adapun karakteristik responden pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Karakteristik Responden Pelaku UMKM

No.	KATEGORI	SUB KATEGORI	F	%
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	25	40,98
		Perempuan	36	59,02
2.	Usia	< 26 tahun	0	0,00
		26 - 35 tahun	13	21,31
		36 – 45 tahun	19	31,15
		46 – 55 tahun	18	29,51
		> 55 tahun	11	18,03
3.	Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	3	4,92
		SD/MI/Paket A	18	29,51
		SMP/MTs/Paket B	3	4,92
		SMA/SMK/MA/Paket C	14	22,95
		Diploma (D1/D2/D3)	1	1,64
		Sarjana (D4/S1)	19	31,15
4.	Lokasi	Pascasarjana (S2/S3)	3	4,92
		Kecamatan Baamang	11	18,03
		Kecamatan Cempaga	1	1,64
		Kecamatan Kota Besi	1	1,64
		Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	13	21,31
		Kecamatan Mentaya Hilir Utara	7	11,48
		Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	5	8,20
		Kecamatan Pulau Hanaut	8	13,11
		Kecamatan Seranau	7	11,48
		Kecamatan Telawang	3	4,92
Kecamatan Teluk Sampit	5	8,20		

Sumber: Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan 61 pelaku UMKM yang dijadikan sampel pada studi ini, masing-masing pelaku usaha memiliki unit usaha meliputi: (1) Kuliner (34 unit usaha); (2) Kriya (15 unit usaha); (3) Fesyen (3 unit usaha); (4) Seni Pertunjukan (6 unit usaha); (5) Fotografi (1 unit usaha); (6) Desain Produk (1 unit usaha); dan (7) Penerbitan (1 unit usaha). Keberadaan sub sektor kuliner yang sangat dominan tentunya tidak terlepas dari posisi Kabupaten Kotawaringin Timur yang strategis dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua se-Kalimantan Tengah. Hal ini membuat kebutuhan akan makanan menjadi meningkat dan menarik banyak pihak untuk membuka usaha di bidang kuliner. Berbagai macam kuliner bagi masyarakat dalam berbagai kelas sosial tersedia di wilayah ini.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020 telah mengganggu perekonomian global, tidak terkecuali sektor UMKM yang mengalami tekanan cukup besar. Kebijakan pembatasan aktivitas yang diberlakukan di beberapa wilayah berakibat pada terhentinya aktivitas ekonomi dengan penurunan permintaan dan terganggunya rantai pasokan. Selama pandemi COVID-19, pola konsumsi barang dan jasa beralih dari offline menjadi platform online. Adanya perubahan pada pola konsumsi tersebut membuat para pelaku UMKM memiliki kesempatan meningkatkan usahanya melalui sistem perdagangan elektronik yang mana pemasaran sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih menggunakan inovasi pemasaran online. Hal ini membuat pelaku UMKM dituntut untuk lebih aktif dalam pengembangan inovasi dan lebih kreatif. Hasil survey terhadap 61 pelaku UMKM menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, sebanyak 57,38 persen pelaku UMKM cenderung memasarkan produknya secara online, menggunakan media sosial seperti FB, IG, WA, Youtube dan market place. Pandemi COVID-19

menjadi momentum akselerasi transformasi digital yang harus dikuasai oleh pelaku UMKM serta ajang pembuktian bahwa produk-produk dalam negeri dan kebutuhan nasional dapat dipenuhi.

### C. Penentuan Sub Sektor Unggulan

Setelah menginventarisasi usaha industri kreatif berdasarkan sub sektor yang ada, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kinerja 17 sub sektor dengan berpedoman pada tujuh dimensi. Penilaian dilakukan berdasarkan pembobotan yang telah ditentukan dalam pedoman Bekraf. Hasil penilaian pada masing-masing sub sektor kemudian dianalisis dengan membandingkannya dengan jumlah unit usaha industri kreatif yang ada. Dipilihnya ketujuh dimensi Bekraf dan jumlah unit usaha dalam mengidentifikasi keunggulan masing-masing sub sektor tentu dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan variabel dimensi perlu dilakukan untuk mengetahui daya dukung dari masing-masing dimensi terhadap pengembangan. Selanjutnya, variabel keberadaan unit usaha tentunya juga memegang peranan yang penting dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Variabel jumlah unit usaha industri kreatif dan variabel masing-masing dimensi dianalisis menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) atau yang lebih dikenal dengan Analisis Kuadran. Hasil penilaian terhadap kinerja 17 sub sektor industri kreatif yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan pembobotan yang telah ditentukan sebagaimana terlihat pada tabel di berikut ini.

**Tabel 3.** Kinerja Sub Sektor Industri Kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Dimensi Sub Sektor Unggulan Bekraf

No.	Sub Sektor	Dimensi Sub Sektor Unggulan						
		SDM	Bahan Baku	Jumlah Industri	Sumber Pembiayaan	Akses & Perluasan Pasar	Penggunaan Teknologi & Infrastruktur	Kelembagaan
1.	Kuliner	3.680	1.380	2.030	520	1.392	3.204	1.035
2.	Kriya	2.280	765	530	260	984	1.470	420
3.	Fesyen	400	165	100	26	96	135	75
4.	Seni Pertunjukan	1.240	225	250	104	300	540	195
5.	Fotografi	100	15	30	13	24	105	15
6.	Desain Produk	100	15	20	13	24	75	15
7.	Penerbitan	100	15	90	13	48	90	30
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.137,14</b>	<b>368,57</b>	<b>435,71</b>	<b>135,57</b>	<b>409,71</b>	<b>802,71</b>	<b>255,00</b>

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa dalam dimensi SDM yang terlibat, sub sektor kuliner memiliki nilai paling tinggi, sedangkan sub sektor fotografi dan desain produk tercatat memiliki nilai paling rendah. Dalam dimensi muatan bahan baku lokal dan sumber pembiayaan, sub sektor kuliner juga tercatat memiliki nilai tertinggi, sedangkan sub sektor fotografi, desain produk, dan penerbitan memiliki nilai paling kecil. Sementara dalam dimensi jumlah industri, sub sektor kuliner tercatat memiliki nilai paling tinggi, sedangkan sub sektor desain produk memiliki skor paling kecil. Hal ini disebabkan jumlah unit usaha pada sub sektor tersebut tercatat paling kecil. Dalam dimensi akses perluasan pasar dan kelembagaan, sub sektor fotografi dan desain produk memiliki nilai paling rendah. Terakhir sub sektor desain produk tercatat memiliki skor paling kecil dalam dimensi penggunaan teknologi & infrastruktur.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya hasil penilaian kinerja masing-masing sub sektor berdasarkan dimensi pengembangan ekonomi kreatif kemudian dianalisis menggunakan IPA atau analisis kuadran. Dengan menggunakan program SPSS IBM versi 25, hasil analisis aplikasikan ke dalam diagram kartesius untuk memetakan potensi masing-masing sub sektor dalam berbagai dimensi yang terbagi dalam empat kategori, yaitu

unggul, potensial, prospektif dan tertinggal. Hasil pemetaan terhadap potensi sub sektor industri kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur pada masing-masing dimensi terlihat pada tabel 4.

Setelah melakukan pemetaan sub sektor berdasarkan tujuh dimensi yang ada, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap skor keseluruhan. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai sub sektor unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu membandingkan jumlah unit usaha dengan skor seluruh dimensi pada masing-masing sub sektor. Sub sektor dengan jumlah skor total tinggi tentunya lebih unggul jika dibandingkan dengan sub sektor yang memiliki nilai total skor di bawahnya. Dengan menggunakan IPA digunakan sebagai alat analisis, hasil analisis diaplikasikan ke dalam diagram kartesius untuk memetakan potensi masing-masing sub sektor.

Perbandingan antara jumlah unit usaha dan total skor keseluruhan dimensi pada masing-masing sub sektor dapat dilihat pada tabel 5.

Hasil analisis terhadap unit usaha dan total skor keseluruhan dimensi menunjukkan bahwa terdapat dua sub sektor yang masuk dalam kategori unggul, yaitu kuliner dan kriya. Kedua sub sektor tersebut tercatat selain memiliki unit



**Tabel 4.** Hasil Pemetaan Sub Sektor Industri Kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur

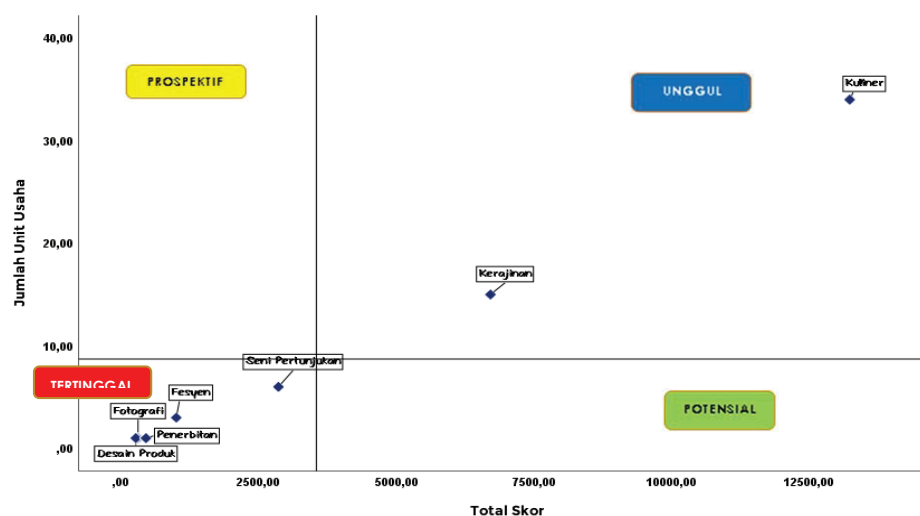
No.	Dimensi	Sub Sektor Hasil Pemetaan (Kategori)			
		Unggulan	Potensial	Berkembang	Tertinggal
1.	SDM Yang Terlibat	Kuliner & Kriya	Seni Pertunjukan	-	Fesyen, Desain Produk, Fotografi & Penerbitan
2.	Bahan Baku Lokal	Kuliner & Kriya	-	-	Fesyen, Desain Produk, Seni Pertunjukan, Fotografi & Penerbitan
3.	Jumlah Industri	Kuliner & Kriya	-	-	Fesyen, Desain Produk, Seni Pertunjukan, Fotografi & Penerbitan
4.	Sumber Pembiayaan	Kuliner & Kriya	-	-	Fesyen, Desain Produk, Seni Pertunjukan, Fotografi & Penerbitan
5.	Akses dan Perluasan Pasar	Kuliner & Kriya	-	-	Fesyen, Desain Produk, Seni Pertunjukan, Fotografi & Penerbitan
6.	Penggunaan Teknologi dan Infrastruktur	Kuliner & Kriya	-	-	Fesyen, Desain Produk, Seni Pertunjukan, Fotografi & Penerbitan
7.	Kelembagaan	Kuliner & Kriya	-	-	Fesyen, Desain Produk, Seni Pertunjukan, Fotografi & Penerbitan

Sumber : Hasil Analisis IPA (2022)

**Tabel 5.** Perbandingan Unit Usaha Industri Kreatif dengan Total Skor Seluruh Dimensi Menurut Sub Sektor di Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Sub Sektor	Jumlah Unit Usaha	Skor Total Seluruh Dimensi
1.	Kuliner	34	13.241
2.	Kriya	15	6.709
3.	Fesyen	3	997
4.	Seni Pertunjukan	6	2.854
5.	Fotografi	1	302
6.	Desain Produk	1	262
7.	Penerbitan	1	446
	<b>Rata-rata</b>	<b>61</b>	<b>3.544,43</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2022)



**Gambar 1.** Analisis IPA Sub Sektor Industri Kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Skor Keseluruhan Dimensi  
 Sumber : Hasil Pengolahan Data (2022)

usaha yang cukup banyak, total skor keseluruhan dimensi lebih tinggi dibanding lima sub sektor lain. Meskipun secara eksisting kedua sub sektor tersebut tergolong dalam kategori unggul baik secara unit usaha dan dimensi ekonomi kreatif, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak memperhatikan perkembangan kedua sektor tersebut. Pendampingan masih perlu terus dilakukan dalam upaya menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah memberikan kemudahan terkait dengan perizinan mengingat salah satu kendala yang dihadapi beberapa pelaku usaha sub sektor kuliner adalah ijin edar atau ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat sebanyak 61 pelaku usaha telah memiliki Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPP-IRT pada Tahun 2022.

Sementara itu, hasil analisis juga diperoleh bahwa tidak terdapat sub sektor ekonomi kreatif yang masuk dalam kategori potensial dan berkembang. Justru terdapat lima sub sektor yang masuk dalam kategori tertinggal, yaitu sub sektor fesyen, desain produk, seni pertunjukan, fotografi dan penerbitan. Kelima sub sektor tersebut tercatat memiliki jumlah unit usaha yang kurang memadai dan kinerja dimensi ekonomi kreatif yang belum maksimal. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait memiliki tugas yang besar dalam mengintervensi kebijakan guna mendorong sub sektor yang masuk dalam kategori tersebut agar dapat berkembang. Intervensi yang perlu dilakukan adalah menjamin iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan kelima subsektor tersebut. Diharapkan dengan iklim usaha yang kondusif unit usaha kelima sub sektor tersebut dapat berkembang. Upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah berupaya

membuat regulasi yang dapat menjadi payung hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya bagi sub sektor yang belum terformalkan. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk dapat berpartisipasi dalam event seperti pameran guna mempromosikan produk secara lebih luas. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah pembinaan terkait inovasi dan diversifikasi produk sehingga produk yang dihasilkan semakin bervariasi dan dapat menarik minat masyarakat luas. Namun demikian, sebelum kedua hal tersebut dilakukan maka terlebih dahulu perlu memperhatikan kualitas produk yang akan dipasarkan.

Selanjutnya melalui pemetaan di atas Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tugas utama Pemerintah Daerah adalah memastikan sub sektor unggulan agar tetap terjaga kinerjanya dan berupaya mendorong sub sektor tertinggal untuk dapat memperbaiki kinerjanya. Perhatian serupa juga harus diberikan kepada sub sektor yang berpotensi untuk berkembang dan memiliki prospek yang bagus di masa depan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan dampak bagi perbaikan kinerja dimensi ekonomi kreatif pada sub sektor yang tertinggal. Dengan demikian diharapkan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi kinerja ekonomi daerah.

#### **D. Prioritas Penentuan Sub Sektor Industri Kreatif**

Hasil olah data yang dikumpulkan dari responden terhadap penilaian 7 (tujuh) dimensi diperoleh bahwa dimensi muatan bahan baku

termasuk kedalam kriteria tertinggi, sedangkan dimensi kelembagaan tergolong dalam kategori terendah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

### E. Analisis SWOT UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif

Secara umum UMKM kreatif mengandalkan potensi keunikan dan kearifan lokal yang dimiliki

**Tabel 6.** Bobot Dimensi Sub Sektor Industri Kreatif Unggulan Di Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Dimensi	Bobot
1.	Muatan Bahan Baku	0,48281
2.	Sumber Daya Manusia (SDM)	0,23391
3.	Akses dan Perluasan Pasar	0,10001
4.	Industri	0,09085
5.	Sumber Pembiayaan	0,04166
6.	Penggunaan Teknologi dan Infrastruktur	0,02548
7.	Kelembagaan	0,02527

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Software *Super Decision* 2022)

Berdasarkan orientasi yang berfokus pada kelompok industri kreatif skala mikro, kecil dan menengah dengan pengisian kuisisioner menggunakan skala Saaty dan dilakukan pengolahan data menggunakan metode AHP, diperoleh gambaran bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi dan peluang besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dari 17 sub sektor industri kreatif yang diidentifikasi, diperoleh bahwa sektor industri kreatif kuliner dan kerajinan memiliki peringkat bobot tertinggi dibanding sektor lainnya seperti terlihat pada tabel berikut ini.

daerah sebagai upaya dalam pengembangan dan pembangunan perekonomian wilayah. Potensi keunikan dan kearifan lokal tersebut dapat meliputi: (1) kuliner (makanan dan minuman tradisional); (2) budaya lokal (ritual dan upacara adat, permainan tradisional); (3) busana lokal (pakaian adat dan motif kain); (4) seni pertunjukan (tarian, sastra, cerita rakyat, dan pewayangan); dan (5) seni visual (lukisan, kerajinan, ornamen, dan relief). Beberapa permasalahan dalam pengembangan ekonomi kreatif dihadapi Kabupaten Kotawaringin Timur, baik dari aspek SDM, bahan baku, industri, teknologi,

**Tabel 7.** Penentuan Sub Sektor Industri Kreatif Dominan Skala Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kabupaten Kotawaringin Timur

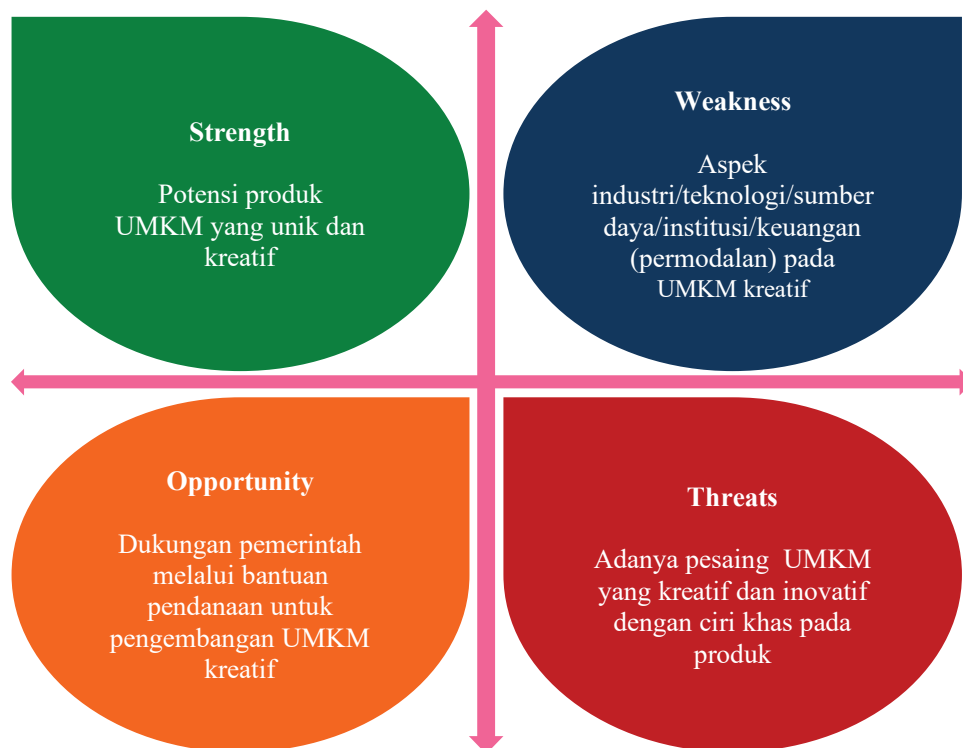
No.	Sub Sektor	Bobot	Peringkat
1.	Kuliner	0,222880	1
2.	Kriya	0,183593	2
3.	Desain Produk	0,170530	3
4.	Seni Pertunjukan	0,132754	4
5.	Penerbitan	0,1232240	5
6.	Fesyen	0,104703	6
7.	Fotografi	0,062299	7

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Software *Super Decision* 2022)

kelembagaan, dan keuangan/permodalan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dialami pelaku UMKM industri kreatif di wilayah ini adalah: (1) Kurangnya promosi dan pemasaran produk; (2) Keterbatasan SDM yang berkompeten dan akses permodalan; (3) Ijin Edar Produk. Tidak adanya izin usaha resmi mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat laju usaha; (4) Kurang memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan; (5) Distribusi barang terbatas akibat akses transportasi sulit; (6) Kurangnya dukungan pemerintah; dan (7) Rendahnya inovasi produk dan penerapan informasi teknologi. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikurangi dengan adanya dukungan pemerintah, salah satunya memberikan bantuan dana dan stimulus kepada pelaku UMKM kreatif dan memberi kemudahan dalam perijinan.

Permasalahan UMKM kreatif akan menjadi kelemahan jika tidak segera mendapat perhatian dari pemerintah dan dikhawatirkan

dapat terhambat oleh pesaing. Selain itu, ancaman/hambatan lain yang tidak dapat diprediksi dapat berpotensi mengganggu pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur. Potensi dan kelemahan merupakan faktor internal yang dijadikan acuan dalam analisis faktor strategi internal, sedangkan peluang dan ancaman adalah faktor eksternal pada analisis faktor strategi eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi UMKM kreatif, seperti bahan baku, keuangan, operasional, SDM, manajemen, dan pemasaran dalam unit usaha. Sementara faktor eksternal merupakan faktor-faktor di luar UMKM kreatif berupa ekonomi, industri dan lingkungan bisnis makro, politik, hukum, teknologi kependudukan, dan sosial budaya. Potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman dijabarkan dalam bentuk matriks SWOT yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam strategi pengembangan dan pembangunan UMKM kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur.



**Gambar 2.** Matriks SWOT UMKM  
Sumber : Hasil Pengolahan Data (2022)

## F. Strategi Pengembangan Sub Sektor Industri Kreatif

Industri kreatif yang telah diklasifikasikan menjadi 17 subsektor memiliki tantangan masing-masing, dan karakter yang khas yang mana hal ini berimbas pada pengembangannya. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup besar. Hal ini terlihat dari hasil analisis terhadap 17 sub sektor industri kreatif yang mana diperoleh 2 (dua) sub sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu kuliner dan kriya. Meskipun demikian, terdapat pula hal yang masih perlu diperhatikan oleh aktor-aktor ekonomi kreatif dalam memaksimalkan peluang pengembangan ekraf, yaitu penyelarasan aktivitas komunitas kreatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 61 pelaku UMKM di 10 kecamatan diperoleh beberapa permasalahan umum yang dihadapi para pelaku usaha. Permasalahan utama yang dialami responden UMKM khususnya usaha mikro dalam pengembangan usaha adalah pemasaran dan modal usaha. Keterbatasan modal bagi usaha mikro mengakibatkan produksi menjadi terbatas dan pemasaran produk masih bersifat konvensional, keliling dan menunggu pesanan. Belum adanya tempat aktualisasi produk UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur menyebabkan banyak orang belum mengenal produk hasil olahan UMKM baik industri produktif maupun industri kreatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembentukan sentra industri kreatif untuk mendukung pengembangan industri kreatif bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sementara itu, kualitas SDM responden UMKM di Kotawaringin Timur cukup baik walaupun latar belakang pendidikan pelaku usaha tersebut didominasi lulusan SD. Untuk itu, perlu

adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia para pelaku usaha terutama dalam proses pembuatan produk dan pemasaran.

Dalam rangka menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan memperkuat kemampuan industri kreatif agar dapat bersaing dengan produk-produk ekonomi kreatif impor diperlukan kebersamaan dan sinergi dari semua stakeholder pelaku ekonomi kreatif baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Kolaborasi hexa-helix antara pemerintah, swasta, intelektual, komunitas kreatif, media dan investor perlu diterapkan hingga membentuk situasi industri kreatif yang sehat dan meningkatkan daya saing ekspor produk. Selain itu, keterkaitan dengan sektor-sektor lain baik ke belakang maupun keterkaitan ke depan dengan pemasok yang menyerap subsektor ekonomi kreatif perlu diperkuat.

Adapun fungsi kunci dalam pengembangan hexa helix adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah: fungsi regulasi dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
2. Swasta: fungsi implementasi bisnis dan pasar;
3. Intelektual: fungsi “knowledge” untuk analisis perkembangan dan temuan dalam ekonomi kreatif;
4. Komunitas kreatif: penggerak kegiatan kreatif yang dapat bertransformasi menjadi konsep kewirausahaan kreatif;
5. Media : fungsi publisitas dan citra positif sekaligus pemasaran produk industri kreatif;
6. Investor: fungsi penguatan permodalan untuk pengembangan rintisan baru industry kreatif.

Penggunaan produk lokal dan kampanye kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk senantiasa menggunakan produk dalam negeri dapat menjadi salah satu solusi pembangunan industri ke depan. Selain itu,

**Tabel 8.** Permasalahan Umum Yang Dihadapi Responden Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Sub Sektor Industri Kreatif

No.	Permasalahan	Persentase	Peringkat
1.	Pemasaran	32,71	1
2.	Modal usaha	18,69	2
3.	Alat produksi terbatas	16,82	3
4.	Pelatihan	11,21	4
5.	Bahan baku	9,35	5
6.	Ijin edar	6,54	6
7.	Pandemi COVID-19	3,74	7
8.	<i>Packaging</i>	0,93	8

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2022)

kerjasama antar individu juga diperlukan untuk menghindari terciptanya iklim persaingan yang tidak sehat. Para pelaku UMKM berbasis ekonomi kreatif harus senantiasa menjaga mutu produk yang dihasilkan serta meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menghasilkan karya-karya baru. Peningkatan kreatifitas bagi para pelaku UMKM dapat dilakukan melalui serangkaian proses pelatihan dari pemerintah seperti manajemen pengelolaan usaha, manajemen pemasaran dan keuangan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam studi ini adalah sebagai berikut: Pertama, Kegiatan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur cukup menjanjikan. Hasil survey terhadap 61 pelaku UMKM di Kotawaringin Timur menunjukkan beberapa unit usaha tersebar ke dalam masing-masing sub sektor ekonomi kreatif, yaitu sub sektor kuliner, kerajinan, fesyen, seni pertunjukan, fotografi, desain produk, dan penerbitan. Kedua, Keberadaan sub sektor kuliner masih mendominasi sub sektor industri kreatif di wilayah ini yang mana sebanyak 34 unit atau 56,67 persen bergerak di sub sektor ini. Selanjutnya sub sektor kriya menempati posisi kedua, yang mana sebanyak 15 unit usaha ekonomi kreatif atau 25 persen bergerak di sub sektor ini. Ketiga, Hasil

analisis kuadran (IPA) menunjukkan bahwa sub sektor industri kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur dipetakan ke dalam dua kategori yaitu unggul dan tertinggal. Terdapat dua sub sektor tergolong dalam kategori unggul, yaitu kuliner dan kriya. Sementara sub sektor fesyen, fotografi, desain produk, seni pertunjukan, dan penerbitan tergolong dalam kategori tertinggal. Sementara hasil analisis AHP diperoleh bahwa sub sektor kuliner dan kerajinan merupakan sub sektor prioritas karena memiliki peringkat bobot tertinggi disbanding sektor lain.

## REKOMENDASI

Memperhatikan keunggulan dan kelemahan tujuh dimensi ekonomi kreatif (SDM, muatan bahan baku, jumlah industri, pembiayaan, akses dan perluasan pasar, teknologi dan infrastruktur, serta kelembagaan) pada masing-masing sub sektor, kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memperkuat dimensi ekonomi kreatif adalah:

1. Memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam ekonomi kreatif;
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan masing-masing sub sektor ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal

- dalam upaya memperkuat karakter budaya lokal pada produk-produk ekonomi kreatif;
4. Mendorong diversifikasi produk yang dihasilkan unit usaha pada masing-masing sub sektor;
  5. Menjamin kejelasan dan kemudahan dalam proses pengurusan ijin usaha agar unit usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terformalkan;
  6. Memberikan akses terhadap sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses produksi masing-masing sub sektor;
  7. Memfasilitasi promosi produk-produk yang dihasilkan sub sektor ekonomi kreatif;
  8. Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait penggunaan teknologi informatika dalam kegiatan sub sektor ekonomi kreatif;
  9. Menginisiasi penyusunan regulasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
  10. Memfasilitasi pemberian apresiasi kepada sub sektor ekonomi kreatif di Kotawaringin Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abisuga Oyekunle, O. A., & Sirayi, M. (2018). The Role of Creative Industries as A Driver for A Sustainable Economy: A Case of South Africa. *Creative Industries Journal*, 11(3), 225–244. <https://doi.org/10.1080/17510694.2018.1480850>.
- Akhmad, S., & Hidayat, R. (2015). Pemetaan Potensi Industri Kreatif Unggulan Madura. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 12(2), 155–165.
- Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2017). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 120–142.
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(2), 233–247. <https://doi.org/10.24967/psn.v2i1.1452>
- Bappeda Kota Semarang, U. N. S. (2021). Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Semarang.
- Caballero-Morales, S. O. (2021). Innovation as Recovery Strategy for SMEs in Emerging Economies during The COVID-19 Pandemic. *Research in International Business and Finance*, 57, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101396>.
- Damanik, J. & Weber, H. (2006). Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta. Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- (2008). Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 (Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015). Departemen Perdagangan Republik Indonesia: Jakarta.
- Departemen UMKM Bank Indonesia. (2015). Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia. Bank Indonesia.
- Gouvea, R., & Vora, G. (2018). Creative Industries and Economic Growth: Stability of Creative Products Exports Earnings. *Creative Industries Journal*, 11(1), 22–53. <https://doi.org/10.1080/17510694.2017.1416529>.

- Hoddemah, & Rolianah, W. S. (2018). Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 255–277. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.106-129>.
- Howkins, J. (2002). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Edisi Pertama. London Penguin Books.
- Irawan, A. (2015). Ekonomi Kreatif Sebagai Suatu Solusi Mensejahterakan Masyarakat Dalam Meningkatkan Tingkat Perekonomian. Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis (SNEB), 1–5.
- Kememparekraf. (2020). *Statistik Ekonomi Kreatif 2020* (M. S. Dr. Bhakti Nur Avianto, S.IP. (ed.); Pertama). Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kustanto, M. (2018). Identifikasi Subsektor Ekonomi Kreatif Unggulan di Kabupaten Sidorajo. *PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL PENELITI TAHUN 2018 “PERCEPATAN INOVASI IMPLEMENTATIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,”* September, 572–582.
- Novita, D., & Siregar, G. (2015). Identifikasi Komoditas Dan Jenis Usaha Unggulan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah Kota Tanjungbalai. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian*.
- Nugraha, H. S., Amaruli, R. J., & Darwanto. (2017). Potensi UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Daerah. *Jurnal Dialektika Publik*, 2(1), 30–43.
- Pascasuseno, A. (2014). *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Bedah Cetak Biru Ekonomi Kreatif: Yogyakarta.
- Sandriana, N., Hakim, A., & Saleh, C. (2015). *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster di Kota Malang*. *Reformasi*, 5(1), 89–100.
- Sorotan Media. (2019). Apa itu Industri 4.0 dan bagaimana Indonesia menyongsongnya. Diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media).
- Setyadi, S., & Budiarto, M. S. (2020). Potensi Dan Prioritas Industri Kreatif Skala Mikro, Kecil Dan Menengah Di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 118–128.
- Sukarno, G., Rasyidah, R., & Saadah, K. (2020). Improve Creative Industry Competitiveness Penta Helix and Human Capital in Digital Era. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200325.014>.
- Sumartik., & Larassaty, A. (2016). Geliat Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Branding UMKM Di Sidoarjo. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakri*, 334–349.
- Wiradharma, G., Arisanty, M., & Mahmudah, D. (2021). Sebagai Media Diseminasi Informasi Dan Branding Ekonomi Kreatif Kabupaten/ Kota Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 25(1), 46–60.





# **BAPPEDALITBANG**

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)

## **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Diponegoro No. 60 Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah  
Telp (0536)3221715, 3221645, Fax (0536) 3221217

email : [bappeda.kalteng@gmail.com](mailto:bappeda.kalteng@gmail.com)